



**2021**  
**LKIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL**  
**KEPULAUAN RIAU**

**PU PR**  
**SIGAP MEMBANGUN NEGERI**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau periode 2021 dengan lancar. Terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh tim yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya demi tersusunnya Dokumen LKIP ini. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 dimana BPJN Kepulauan Riau bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada dalam memberikan laporan kinerja sebagai tolak ukur capain keberhasilan pada tahun 2021. Laporan Kinerja disusun berdasarkan sasaran program penyelenggaraan jalan dengan pengukuran berdasarkan indikator kinerja Aksesibilitas Jalan Nasional, Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Rating Keselamatan Jalan Nasional. Pengukuran dengan indikator kinerja menghasilkan output kegiatan yang ada pada Satuan Kerja di lingkungan BPJN Kepulauan Riau. Berdasarkan pengukuran tersebut didapatkan realisasi terhadap target kinerja, tujuan dan sasaran program sebagai pencapaian kinerja BPJN Kepulauan Riau pada tahun 2021 yang disusun kedalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang transparan kepada seluruh pihak yang terkait sebagai sarana untuk mengetahui tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta pencapaian tahun 2021 di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau. Laporan Kinerja ini juga dibuat sebagai acuan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja di BPJN Kepulauan Riau dan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPJN Kepulauan Riau tahun 2021 ini, diharapkan dapat dihasilkan pencapaian kinerja yang maksimal dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dengan berdasarkan kepada peraturan yang berlaku. Ucapan maaf juga kami sampaikan apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau tahun 2021.

Batam, Januari 2022  
Kepala Balai  
  
**Ir. Faizal, M.Si**  
NIP. 196409121996031002



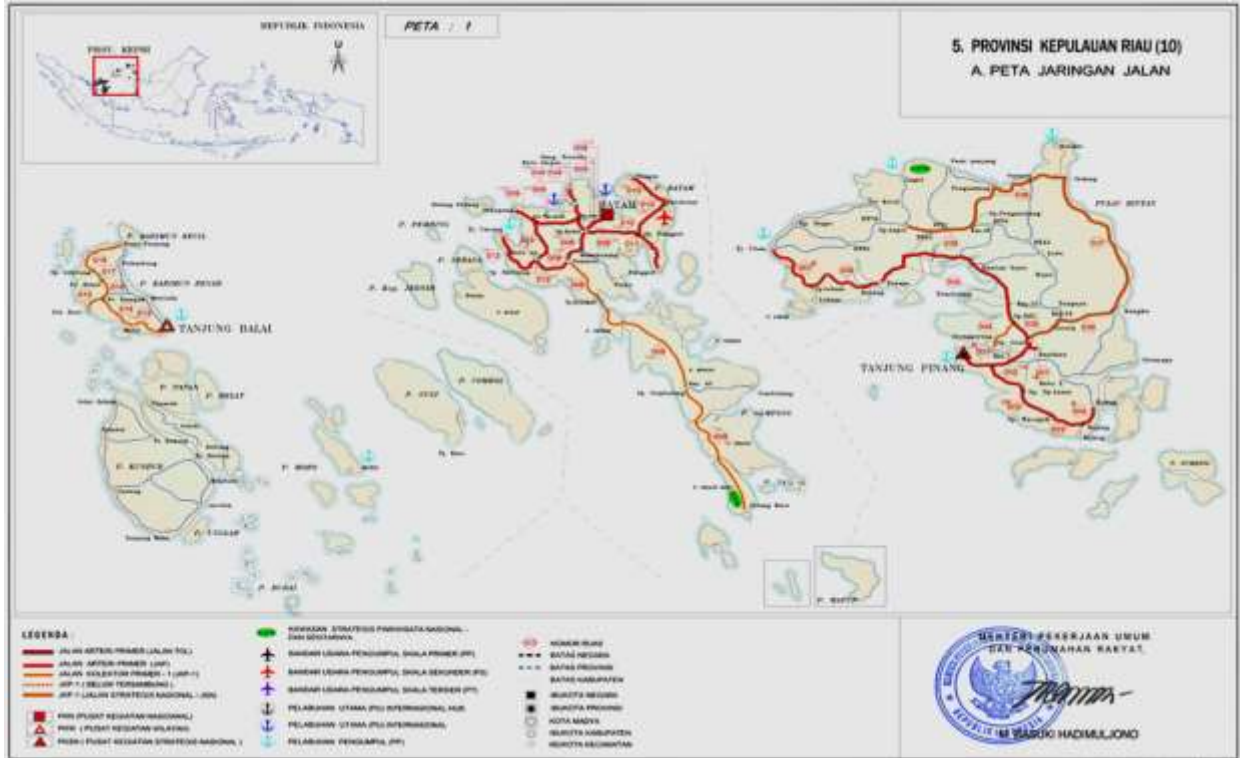
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang dengan tingkatan satuan kerja, unit organisasi dan K/L dalam bentuk: a) Rencana Strategis; b) Perjanjian Kinerja; c) Pengukuran Kinerja; d) Pengelolaan Data Kinerja; e) Pelaporan Kinerja; dan f) Reviu dan Evaluasi Kinerja. Dalam rangka menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PTR/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri dimaksud diamanatkan bahwa “Unit organisasi Menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan unit organisasi untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra Kementerian”. Selain itu, diamanatkan pula bahwa “Unit kerja/unit pelaksana teknis menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan unit kerja/unit pelaksana teknis untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra entitas di atasnya.” dan “Satuan kerja (satker) menyusun dokumen perencanaan lainnya berpedoman pada Renstra entitas di atasnya.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga. Tugas dari BPJN Kepulauan Riau sebagaimana tertuang dalam pasal 104 Permen PUPR 16/PRT/M/2020 adalah melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dengan total panjang ruas 586,83 Km terdiri dari Jalan Arteri (JAP) sepanjang 196,93 Km dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sepanjang 389,90 Km. Lokasi ruas Jalan Nasional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada pada Kota/Kabupaten :

1. Kota Batam
2. Kota Tanjungpinang
3. Kabupaten Bintan
4. Kabupaten Kepulauan Anambas
5. Kabupaten Natuna
6. Kabupaten Lingga
7. Kabupaten Karimun

# Ruas Jalan Nasional BPJN Kepulauan Riau



# Daftar Ruas Jalan Nasional BPJN Kepulauan Riau

NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	JAP (KM)	JRP-1 (KM)
1	001 11 R	J. HANG TUAN (TANJUNG PINANG)	5,92	5,92	
2	001 12 R	J. AGUS SALIM (TANJUNG PINANG)	5,73	5,73	
3	001 13 R	J. USMAN HARUN (TANJUNG PINANG)	5,93	5,93	
4	001 14 R	J. FOS BISSARDI (TANJUNG PINANG)	5,95	5,95	
5	001 15 R	J. WIRATA (TANJUNG PINANG)	1,20	1,20	
6	001 16 R	J. BASUKI RAHMAT (TANJUNG PINANG)	1,26	1,26	
7	001 17 R	J. A. YAM (TANJUNG PINANG)	1,80	1,80	
8	001 18 R	J. RH. FISABILILLAH (TANJUNG PINANG)	4,54	4,54	
9	001 19 R	J. S. I. RAJANTHAN (TANJUNG PINANG)	2,05	2,05	
10	001 1A R	J. SP. ARI SUKPTO - DESEK (TANJUNG PINANG)	6,33	6,33	
11	001 1B R	J. M. BANGSAPA (SP. RUPU - BANGSAPA RUP)	2,30	2,30	
12	002 11 R	J. RH. FISABILILLAH (SP. SAHU - SP. DIMPAS LAMA (TG. TANJUNG))	2,37	2,37	
13	002 12 R	J. SP. DIMPAS LAMA - SP. RACOPER (TG. TANJUNG)	7,63	7,63	
14	002 1 R	SP. RACOPER - KUNING (SE. BATAI) (KAB. BINTAN)	7,97	7,97	
15	004 11 R	J. BERKARI (KAB. BINTAN)	5,13	5,13	
16	004 12 R	J. KESAN NEMAS (KAB. BINTAN)	5,48	5,48	
17	004 13 R	J. TANAH KUNING (KAB. BINTAN)	5,71	5,71	
18	004 14 R	J. BANG BETAU (KAB. BINTAN)	5,37	5,37	
19	004 15 R	J. HANG JEBAT (KAB. BINTAN)	5,47	5,47	
20	004 16 R	J. HANG TUAN (KAB. BINTAN)	5,14	5,14	
21	004 17 R	J. BRIVAYUTAN - PELABUHAN (KAB. BINTAN)	0,80	0,80	
22	005 1 R	SP. DESEK (KM 16) - SP. BUSUNG	32,00	32,00	
23	006 1 R	SP. BUSUNG - SP. LORAN	12,80	12,80	
24	007 11 R	SP. LORAN - TANJUNG UBAH	3,44	3,44	
25	008 11 R	BATAM CENTRE - SP. FRANKY (J. A. YAM) (BATAM)	1,73	1,73	
26	008 12 R	SP. FRANKY - SP. KARI (J. A. YAM) (BATAM)	3,33	3,33	
27	008 13 R	SP. KARI - MELAK KUNING (J. A. YAM) (BATAM)	3,82	3,82	
28	008 14 R	MELAK KUNING - TEMBESI (A. LETEN SUPRATTO) (BATAM)	4,91	4,91	
29	008 15 R	TEMBESI - TANJUNG BERBAT	7,76	7,76	
30	008 16 R	TANJUNG BERBAT - SP. SEMBILANG	25,83	25,83	
31	008 17 R	SP. SEMBILANG - PEL. GALANG	30,03	30,03	
32	008 11 R	SP. KARI - SP. JAM (J. HANG SUHRMAN) (BATAM)	3,36	3,36	
33	009 12 R	SP. JAM - SEI HARAPAN (J. GAJAH MADA) (BATAM)	5,67	5,67	
34	009 13 R	SEI HARAPAN - SEKUPANG (J. RH. MARTADINATA) (BATAM)	5,92	5,92	
35	010 11 R	SP. KERS - SP. PUNDIR (J. RH. SUHRMAN) (BATAM)	4,37	4,37	
36	010 12 R	SP. PUNDIR - BATU BESAR (J. HANG TUAN) (BATAM)	7,04	7,04	
37	010 13 R	BATU BESAR - MONDEA (J. HANG JEBAT - J. HANG LERU) (BATAM)	16,03	16,03	
38	011 11 R	SP. PUNDIR - TELAGA PUNDIR (J. MASAGGERSI) (BATAM)	11,84	11,84	
39	012 11 R	TEMBESI - BATU AJI (A. LETEN SUPRATTO)	5,65	5,65	
40	012 12 R	BATU AJI - TANJUNG LINGUNG (J. H. BRILLEN KATIRRI)	5,00	5,00	
41	013 11 R	TG. BALAI - MERAL	5,18		5,18
42	014 1 R	MERAL - PARIK RAMPAN	4,99		4,99
43	015 1 R	PARIK RAMPAN - PELABUHAN BORO	3,15		3,15
44	016 1 R	PARIK RAMPAN - PARIK BENDU	2,44		2,44
45	017 1 R	PARIK BENDU - SP. JELUTUNG	1,37		1,37
SUB TOTAL 1			296,82	184,43	72,39

NO.	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	JAP (KM)	JRP-1 (KM)
46	018 1 R	SP. JELUTUNG - PARIK RAMPAN	5,11		5,11
47	018 11 R	DAK - TANJUNG BUTON	9,97		9,97
48	020 11 R	DAK - SP. LUMBUNG	7,84		7,84
49	021 1 R	SP. LUMBUNG - SP. RESUN	3,22		3,22
50	022 11 R	SP. RESUN - PEL. SUNDAI YENAI	12,18		12,18
51	023 11 R	DABO - KOTE	17,13		17,13
52	024 1 R	KOTE - JAYOH	6,80		6,80
53	025 1 R	JAYOH - PELABUHAN BORO (SEI BULO)	6,48		6,48
54	026 1 R	SELAT LAMPA - SP. SEKUNYAM	14,18		14,18
55	027 1 R	SP. SEKUNYAM - DESA CEMAGA	23,93		23,93
56	028 1 R	DESA CEMAGA - DEI LELU	21,90		21,90
57	029 11 R	DEI LELU - BAKAS (SP. LAUTAMAU)	9,39		9,39
58	030 11 R	BAKAS - SP. TANJUNG	12,43		12,43
59	031 1 R	SP. TANJUNG - TANJUNG DATUK	34,87		34,87
60	032 1 R	TANJUNG DATUK - TELUK BUTON	1,76		1,76
61	033 11 R	J. H. SUPRIHORO (SP. SEI HARAPAN - SP. BANGSAPA BATU AJI)	8,00	8,00	
62	034 11 R	J. H. DUYUNG (PEL. BATU AMPAR - SP. BALU CENTRE)	3,90	3,90	
63	034 12 R	BALU CENTRE - SP. SEI LADI (IB)	1,80	1,80	
64	035 1 R	KM 16 - SP. DESEK - DESEK	5,94		5,94
65	036 1 R	DESEK - KANGKA	5,85		5,85
66	037 1 R	KANGKA - GALANG	30,54		30,54
67	038 1 R	GALANG - SP. PENJURANGAN (KM 25)	14,85		14,85
68	039 1 R	SP. PENJURANGAN - SP. LAGOH	21,18		21,18
69	040 1 R	SP. SUNDAI BESAR - PEL. PANJUNG	14,00		14,00
70	041 1 R	TANJUNGA - SP. BAYE	9,30		9,30
71	042 1 R	PERINTILAU - PATALAMAM	18,30		18,30
72	043 1 R	PAYULAMAN - PEL. BORO	3,83		3,83
73	044 1 R	SP. RUMAH SEDI - DEANGGARAN	10,00		10,00
SUB TOTAL 2			336,82	194,63	207,38
TOTAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU			633,64	379,06	279,77





Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga dimana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program tahunan pembangunan jalan dan penyusunan rencana pelaksanaan jalan;
2. Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan;
3. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa;
4. Pengendalian penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan;
5. Pengendalian dan pengawasan pengadaan tanah jalan nasional pengadaan tanah jalan bebas hambatan dan jalan tol;
6. Pengendalian pencegahan/mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan;
7. Pengendalian perencanaan dan pengawasan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak perencanaan dan pengawasan;
8. Pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan nasional termasuk penyesuaian kontrak pelaksanaan konstruksi;
9. Penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
10. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
11. Pelaksanaan audit keselamatan jalan;
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal jalan;
13. Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi;
14. Pengadaan, pemanfaatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
15. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik Negara selaku Unit Akuntansi Wilayah serta laporan kinerja;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga serta koordinasi dengan instansi terkait;
17. Penyediaan konsultasi teknik perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan; dan
18. Dukungan verifikasi data jaringan dan usulan pemrograman jalan daerah.

## TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan jalan periode 2020-2024 yang diharapkan dicapai dalam memenuhi :

1. Mewujudkan Program Infrastruktur Konektivitas jalan Nasional dengan sasaran utama yaitu meningkatnya konektivitas wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2. Meningkatkan aksesibilitas jalan, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional untuk memperoleh kinerja pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh
3. Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur jalan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan infrastruktur jalan yang berkelanjutan untuk mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing
5. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional
6. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau program penyelenggaraan jalan

Sasaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang jalan yang diharapkan dicapai dalam memenuhi :

1. Menjadi bagian dari sasaran pembangunan nasional di bidang jalan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai dengan peningkatan aksesibilitas, pemeringkatan kondisi jalan, dan pemeringkatan keselamatan jalan nasional;
3. Sasaran sebagai keluaran (output) dari tiap-tiap kegiatan yang tercakup dalam program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja, baik Ditjen Bina Marga maupun Satuan Kerja di lingkungan BPJN Kepulauan Riau;
4. Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam infrastruktur konektivitas umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional;
5. Pelaksanaan fungsi dalam melakukan administrasi yang umumnya terkait dengan administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga diharapkan dapat memenuhi tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam rencana strategis Ditjen Bina Marga yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional, menambah kapasitas jaringan Jalan Nasional dan turut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian guna mendukung daya saing industri startegis Nasional;

2. Kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis;
4. Peningkatan infratraktur dibidang jalan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
5. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi;
6. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dibidang jalan yang bersih dan terpercaya;
7. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi; dan
8. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

## PENCAPAIAN KINERJA



Lingkup tugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada ruas Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau sepanjang 586,83 Km. Pengukuran kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional dapat dilihat pada Tabel berikut ini:





# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tugas dan Fungsi .....	3
1.3 Struktur Organisasi .....	5
1.4 Isu Strategis .....	8
1.5 Kondisi umum wilayah Kerja BPJN Kepulauan Riau .....	9
1.6 Permasalahan Utama (strategic issues) dan tantangan yang dihadapi .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>19</b>
2.1 Uraian Singkat Renstra .....	20
2.1.1 Tujuan Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau .....	23
2.1.2 Sasaran Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau .....	24
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau .....	24
2.2 Perjanjian Kinerja .....	25
2.3 Metode Pengukuran .....	28
2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) - Waktu Tempuh .....	30
2.3.2 Indikator Kinerja Program - 1 (IKP - 1) (Aksesibilitas) .....	30
2.3.3 Indikator Kinerja Program – 2 (IKP – 2) (Rating Kondisi Jalan) .....	31
2.3.4 Indikator Kinerja Program – 3 (IKP – 3) (Tingkat Keselamatan Jalan) .....	36
2.4 Target Tahun ini Menurut Rencana Strategis .....	37
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI</b> .....	<b>39</b>
3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	39
3.1.1 Informasi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin .....	39
3.1.2 Informasi Kepegawaian berdasarkan Golongan .....	40
3.1.3 Informasi Kepegawaian berdasarkan Usia .....	41
3.1.4 Informasi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan .....	42
3.1.5 Informasi Kepegawaian berdasarkan Jabatan .....	42
3.2 Sarana Prasarana .....	43
3.3 DIPA .....	43
3.3.1 Alokasi DIPA dan penjelasan perubahan .....	43
3.3.2 Komposisi pendanaan .....	48
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>49</b>
4.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	49
4.1.1 Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun .....	52
4.1.2 Panjang Jembatan dibangun .....	55
4.1.3 Panjang jalan yang terpelihara .....	58

4.1.4 Panjang jalan yang ditingkatkan .....	64
4.1.5 Panjang jembatan yang dipelihara .....	77
4.1.6 Panjang jembatan yang ditingkatkan .....	81
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi .....	84
4.3 Realisasi Anggaran .....	85
4.3.1 Analisis atas efisiensi sumber daya terhadap capaian kinerja dan anggaran .....	86
4.4 Paket Strategis .....	87
4.5 Paket Diresmikan dan Penghargaan .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
5.1 Permasalahan .....	91
5.2 Rekomendasi .....	91
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>



**BAB I**

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang dengan tingkatan satuan kerja, unit organisasi dan K/L. Serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penyajian Sistem Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021 ini memuat gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, rencana strategic dan program serta tingkat capaian kinerja program selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan LaKIP ini merupakan upaya dan langkah-langkah yang tepat dalam mengukur tingkat pencapaian keberhasilan kinerja suatu program dan kegiatan yang dilakukan.

Laporan Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau merupakan perwujudan atas kewajiban Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024. Sistem Akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem tersebut membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang kontinyu dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi organisasi.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk menyusun pelaporan kinerja harus menyajikan informasi tentang :

- a. Uraian Singkat Organisasi;
- b. Rencana dan Target Kinerja yang ditetapkan;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Evaluasi dan Analisis Kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

## 1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan

Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. Penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;
- c. Pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;
- d. Penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan Jalan Nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- e. Penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;
- f. Penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalandan jembatan termasuk penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
- g. Pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya;
- h. Sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*);
- i. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;
- j. Penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- k. Pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan dan jembatan;
- l. Pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- m. Pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;
- n. Penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
- o. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
- p. Koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayahkerjanya;
- q. Pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;
- r. Pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;
- s. Evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;
- t. Penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;



- u. Pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan;
- v. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- w. Penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- x. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;
- y. Penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan
- z. Pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.

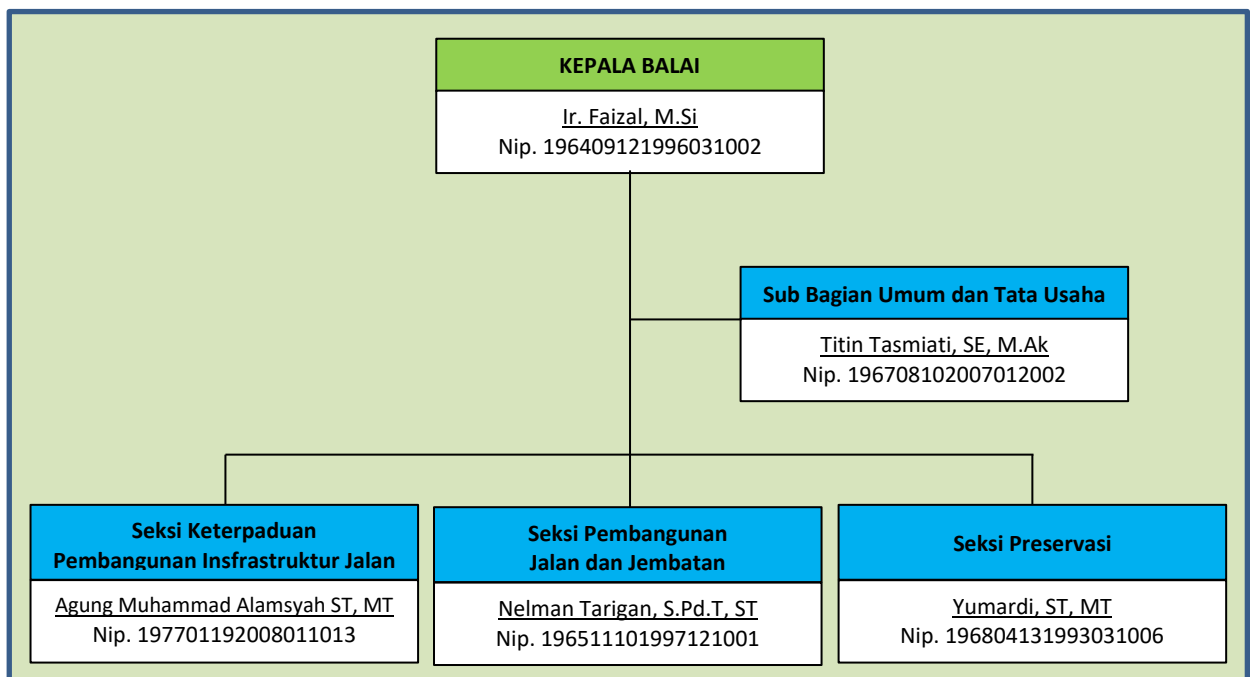
### 1.3 Struktur Organisasi

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau memiliki struktur organisasi kerja sebagai berikut :

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau memiliki susunan organisasi terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Tata Usaha;
2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Preservasi;

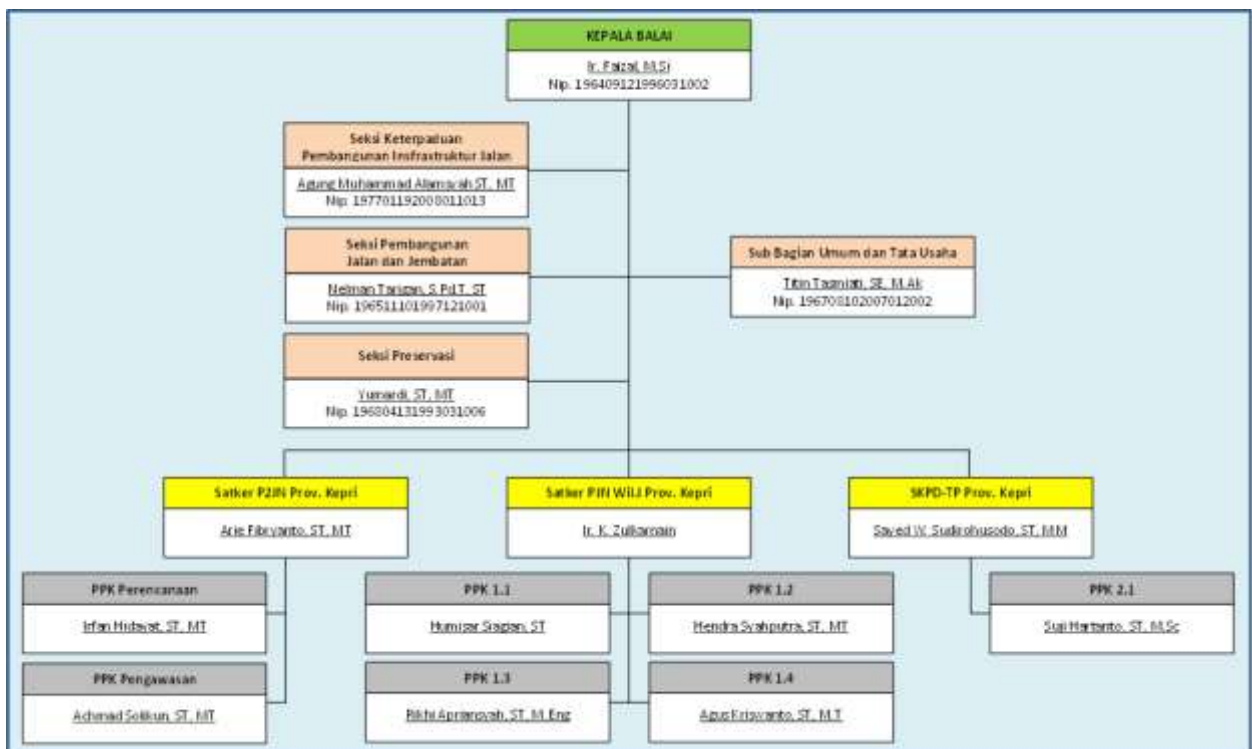
Gambar 1.3.1 Struktur Organisasi Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau



Susunan unit organisasi yang berada di wilayah kerja Balai Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
  - PPK Perencanaan
  - PPK Pengawasan
2. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
  - PPK 1.1
  - PPK 1.2
  - PPK 1.3
  - PPK 1.4
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah - Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
  - PPK 2.1

Gambar 1.3.2 Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau



1. Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan;
  - c. Pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan,

pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan dan penetapan leger Jalan Nasional, penyusunan laporan berkala Balai, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai, dan penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Balai.

2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan program pengadaan lahan jalan nasional, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaandan pengawasan jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan danjembatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerjabalai, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi data jaringan dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah, penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan, evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, penyusunan rencana, program dan anggaran perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, dan penyusunan usulan perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendaliandan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi, melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol, melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian, melaksanakan penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan

jembatan yang berada di jalan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya, melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahandan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait pembangunan jalan dan jembatan, evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.

4. Seksi Preservasi mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan audit keselamatan jalandan jembatan, koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan jembatan, penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan, dan sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*).

#### **1.4 Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dirumuskan dengan mendasarkan pada hasil identifikasi isu strategis berdasarkan tantangan dan kebijakan RPJMN tahun 2020-2024.

### 1.4.1 Kondisi umum wilayah Kerja BPJN Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2002 dengan luas wilayah 252.601 Km<sup>2</sup> (95 persennya adalah perairan dengan 2.408 pulau besar dan kecil) dan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 1.973.043 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Lingkup Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dengan total panjang ruas 586,83 Km terdiri dari Jalan Arteri (JAP) sepanjang 196,93 Km dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) sepanjang 389,90 Km. Lokasi ruas Jalan Nasional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau berada pada Kota/Kabupaten :

#### 1. Pulau Bintan

Pulau Bintan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada pulau Bintan penanganan dilakukan oleh PPK 1.1 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau panjang ruas 90,63 Km dan PPK 2.1 SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau panjang ruas 90,50 Km dengan total panjang ruas 181,13 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.1 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dan PPK 2.1 SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau BPJN Kepulauan Riau.

Peta Ruas Jalan Pulau Bintan



Ruas Jalan Penaganan PPK 1.1 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	005			SP. GESEK (KM 16) - SP. BUSUNG	32,00
2	006			SP. BUSUNG - SP. LOBAM	12,86
3	007	11	K	SP. LOBAM - TANJUNG UBAN	3,84
4	035			KM. 16 / SP. GESEK - GESEK	5,54
5	036			GESEK - KANGKA	5,85
6	037	11	K	KANGKA - SIALANG	30,54
TOTAL JALAN NASIONAL					90,63



Ruas Jalan Penanganan PPK 2.1 SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	003			SP. WACOPEK - KIJANG (SEI ENAM) (KAB. BINTAN)	7,87
2	004	11		JL. BERDIKARI (KAB. BINTAN)	0,13
3	004	12	K	JL. KEBUN NENAS (KAB. BINTAN)	0,48
4	004	13	K	JL. TANAH KUNING (KAB. BINTAN)	0,71
5	004	14	K	JL. BAREK BETAWI (KAB. BINTAN)	0,37
6	004	15	K	JL. HANG JEBAT (KAB. BINTAN)	0,47
7	004	16	K	JL. HANG TUAH (KAB. BINTAN)	0,14
8	004	17	K	JL. SRIBAYINTAN - PELABUHAN (KAB. BINTAN)	0,60
9	038			SIALANG - SP. PENGUNDANG (KM. 46)	14,55
10	039			SP. PENGUNDANG - SP. LAGOI	21,15
11	001	11	K	JL. HANG TUAH (TANJUNG PINANG)	0,82
12	001	12	K	JL. AGUS SALIM (TANJUNG PINANG)	0,72
13	001	13	K	JL. USMAN HARUN (TANJUNG PINANG)	0,93
14	001	14	K	JL. YOS SOEDARSO (TANJUNG PINANG)	0,95
15	001	15	K	JL. WIRATNO (TANJUNG PINANG)	1,20
16	001	16	K	JL. BASUKI RAHMAT (TANJUNG PINANG)	1,26
17	001	17	K	JL. A. YANI (TANJUNG PINANG)	1,80
18	001	18	K	JL. RH. FISABILILLAH (TANJUNG PINANG)	4,54
19	001	19	K	JL. D. I. PANJAITAN (TANJUNG PINANG)	2,05
20	001	1A	K	JL. SP. ADI SUCIPTO - GESEK (TANJUNG PINANG)	6,33
21	001	1B	K	JLN. BANDARA (SP. RSUP - BANDARA RHF)	2,56
22	044			SP. RUMAH SAKIT - SEANGGARANG	10,90
23	002	11	K	JL. RH. FISABILILLAH (KP. HAJI) - SP. DOMPAK LAMA (TG. PINANG)	2,37
24	002	12	K	JL. SP. DOMPAK LAMA - SP. WACOPEK (TG. PINANG)	7,63
TOTAL JALAN NASIONAL					90,50

#### Informasi Umum Pulau Bintan:

Pemerintah Kota Tanjungpinang didirikan pada tahun 2001, berdasarkan Undang - Undang Nomor: 5 tahun 2001 dengan luas wilayah 239,5 Km<sup>2</sup> (luas daratan 131,54 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 202.215 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari 57 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3, 4, dan 5 Tahun 2014. Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 kecamatan dan 18 kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Bintan didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang - Undang Nomor : 53 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2000 dengan luas wilayah 88.038,54 Km<sup>2</sup> (luas daratan 1.946,13 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 153.020 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Bintan terdiri dari 38 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 2012, yang terdiri dari 2 Sekretariat, 14 Dinas, 8 Badan, 1 Kantor, 1 Inspektorat, 1 Satpol PP, 1 RSUD dan 10 Kecamatan dengan 36 desa dan 16 diantaranya berstatus kelurahan.

#### Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Bintan:

- a. PPK 1.1
  - Preservasi Jalan Sp. Gesek (KM 16) - Tanjung Uban - Sialang
  - Rehabilitasi Jembatan Kawal 3 Cs
- b. PPK 2.1
  - Preservasi Jalan KM 16 (Sp. Gesek) - Kijang Cs - Sialang Sp. Lagoi

2. Pulau Batam dan Galang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada pulau Batam penanganan dilakukan oleh PPK 1.2 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dengan total panjang ruas 160,18 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.2 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau BPJN Kepulauan Riau.

Petai Ruas Jalan Pulau Batam



Ruas Jalan Penaganan PPK 1.2 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	008	11	K	BATAM CENTRE - SP. FRANKY (JL. A. YANI) (BATAM)	1,72
2	008	12	K	SP. FRANGKY - SP. KABIL (JL. A. YANI) (BATAM)	1,93
3	008	13	K	SP. KABIL - MUKA KUNING (JL. A. YANI) (BATAM)	3,82
4	008	14	K	MUKA KUNING - TEMBESI (JL. LETJE SUPRAPTO)	4,91
5	008	15	K	TEMBESI - TANJUNG BERIKAT	7,76
6	008	16	K	TANJUNG BERIKAT - SP. SEMBULANG	25,83
7	008	17	K	SP. SEMBULANG - PEL. GALANG	30,03
8	009	11	K	SP. KABIL - SP. JAM (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM)	3,39
9	009	12	K	SP. JAM - SEI HARAPAN (JL. GAJAH MADA) (BATAM)	8,67
10	009	13	K	SEI HARAPAN - SEKUPANG (JL. RE MARTADINATA) (BATAM)	3,92
11	010	11	K	SP. KABIL - SP. PUNGGUR (JL. JEND. SUDIRMAN) (BATAM)	6,27
12	010	12	K	SP. PUNGGUR - BATU BESAR (JL. HANG TUAH) (BATAM)	7,04
13	010	13	K	BATU BESAR - NONGSA (JL. HANG JEBAT, JL. HANG LEKIU) (BATAM)	15,03
14	011	11	K	SP. PUNGGUR - TELAGA PUNGGUR (JL. HASANUDDIN) (BATAM)	11,64
15	012	11	K	TEMBESI - BATU AJI (JLN. LETJEN SUPRAPTO)	5,65
16	012	12	K	BATU AJI - TANJUNG UNCANG (JLN. BRIGJEN KATAMSO)	9,09
17	033	11	K	JLN. DIPONEGORO (SP. SEI HARAPAN - SP. BASECAMP BATU AJI)	8,00
18	034	11	K	JLN. DUYUNG (PEL. BATU AMPAR - SP. BALOI CENTRE)	3,90
19	034	12	K	BALOI CENTRE - SP. SEI LADI (UIB)	1,60
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>160,18</b>

### Informasi Umum Pulau Batam dan Galang:

Pemerintah Kota Batam didirikan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. Luas wilayah 426.563,28 ha (luas daratan 108.265 ha dan luas perairan/laut 318.298,28 ha) dan jumlah penduduk sebanyak 1.188.985 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kota Batam terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 8 Tahun 2007, Nomor : 9 Tahun 2007, Nomor : 10 Tahun 2007, Nomor : 11 Tahun 2007, Nomor : 12 Tahun 2007, Nomor : 13 Tahun 2007, Nomor : 6 Tahun 2013 dan Nomor : 7 Tahun 2013. Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan dengan 64 Kelurahan.

### Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Batam dan Galang:

- a. Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang terdiri atas:
  - b. Pelebaran Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tanjung Berikat 1 Km
  - c. Rehabilitasi Jembatan Raja Haji Fisabilillah Cs
3. Pulau Lingga dan Pulau Karimun
- Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada Pulau Lingga dan Pulau Karimun penanganan dilakukan oleh PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dengan total panjang ruas 96,70 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan BPJN Kepulauan Riau.

### Petai Ruas Jalan Pulau Lingga



Ruas Jalan Penanganan PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	019	11	K	DAIK - TANJUNG BUTON	5,97
2	020	11	K	DAIK - SP. LIMBUNG	7,88
3	021			SP. LIMBUNG - SP. RESUN	3,23
4	022	11	K	SP. RESUN - PEL. SUNGAI TENAM	12,18
5	040			SP. SUNGAI BESAR - PEL. PANCUR	14,00
6	023	11	K	DABO - KOTE	17,13
7	024			KOTE - JAGOH	9,60
8	025	11	K	JAGOH - PELABUHAN RORO (SEI BULUH)	0,46
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>70,45</b>

Petai Ruas Jalan Pulau Karimun



Ruas Jalan Penanganan PPK 1.3 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	013	11	K	TG. BALAI - MERAL	3,19
2	014			MERAL - PARIT RAMPAK	6,59
3	015			PARIT RAMPAK - PELABUHAN RORO	3,15
4	016	11	K	PARIT RAMPAK - PARIT BENUT	2,44
5	017	12	K	PARIT BENUT - SP. JELETUNG	1,37
6	018	13	K	SP. JELETUNG - PASIR PANJANG	9,51
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>26,25</b>

Informasi Umum Pulau Lingga dan Pulau Karimun:

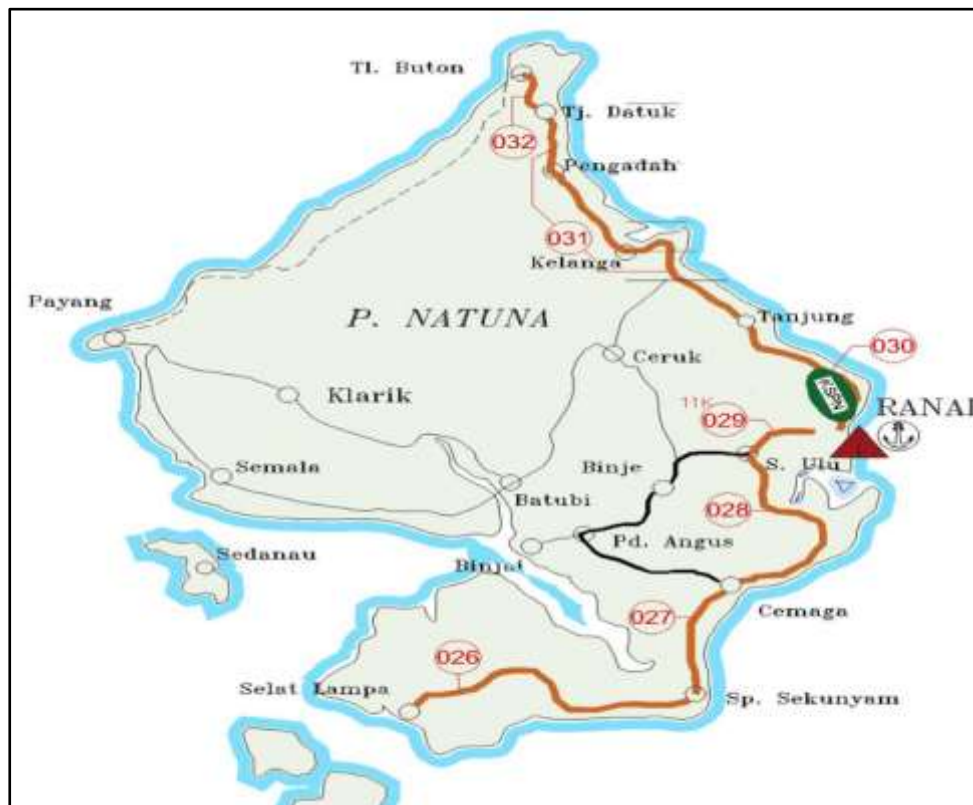
Pemerintah Kabupaten Lingga didirikan pada tahun 2003, berdasarkan Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341) dengan luas wilayah 45.456,7162 Km<sup>2</sup> (luas daratan 2.117,72 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 43.338,9962 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 88.591 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Lingga terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 s.d 10 Tahun 2011 Kabupaten Lingga terdiri dari 9 kecamatan dengan 75 desa dan 7 diantaranya berstatus kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Karimun didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang - Undang Nomor : 53 tahun 1999 dengan luas wilayah 7.984 Km<sup>2</sup> (luas daratan 1.524 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 225.298 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Karimun terdiri atas 44 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Kabupaten Karimun terdiri atas 12 kecamatan dengan 42 desa dan 29 diantaranya berstatus kelurahan.

Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Lingga dan Pulau Karimun:

- a. Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur
  - b. Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang
  - c. Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel Roro
  - d. Rehabilitasi Jembatan Kp.Pahang Cs
4. Pulau Natuna dan Pulau Anambas
- Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1), Lokasi ruas jalan pada Pulau Natuna dan Pulau Anambas penanganan dilakukan oleh PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau dengan total panjang ruas 79,79 Km. Berikut ditampilkan peta Jalan Nasional berikut data panjang jalan nasional dalam wilayah kerja PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan BPJN Kepulauan Riau.

Peta Ruas Jalan Pulau Natuna

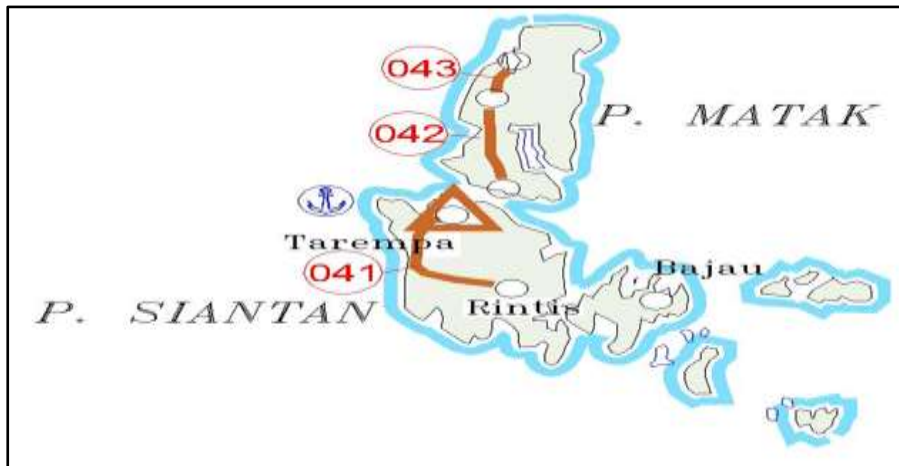




Ruas Jalan Penaganan PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	026	12	K	SELAT LAMPA - SP. SEKUNYAM	14,18
2	027	13	K	SP. SEKUNYAM - DESA CEMAGA	23,65
3	028	14	K	DESA CEMAGA - SEI ULU	21,80
4	029	11	K	SEI ULU - RANAI	9,39
5	030	11	K	RANAI - SP. TANJUNG	12,43
6	031			SP. TANJUNG - TANJUNG DATUK	34,67
7	032			TANJUNG DATUK - TELUK BUTON	1,76
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>48,86</b>

Petai Ruas Jalan Pulau Anambas



Ruas Jalan Penaganan PPK 1.4 PJN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS ( KM )
1	039			TAREMPA - SP. RINTIS	9,50
2	040			PENINTING - PAYALAMAN	18,00
3	041			PAYALAMAN - PEL. RORO	3,43
<b>TOTAL JALAN NASIONAL</b>					<b>30,93</b>

Informasi Umum Pulau Natuna dan Pulau Anambas:

Pemerintah Kabupaten Natuna didirikan pada tahun 1999, berdasarkan Undang - Undang Nomor : 53 tahun 1999 dengan luas wilayah 264.198,37 Km<sup>2</sup> (luas daratan 2.001,30 Km<sup>2</sup> dan lautan 262.197,07 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 74.520 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Natuna terdiri dari 45 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2011. Kabupaten Natuna terdiri dari 12 kecamatan dengan 73 desa dan 6 diantaranya berstatus kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terbentuk melalui Undang - Undang Nomor: 33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008, terdiri dari 7 Kecamatan dan terdiri atas 283 pulau. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah 46.664 Km<sup>2</sup> (luas daratan 634,37 Km<sup>2</sup> dan luas lautan 46.029,27 Km<sup>2</sup>) dan jumlah penduduk sebanyak 40.414 jiwa (data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016). Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 33 SKPD dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011 dan Peraturan Daerah Nomor: 01 Tahun 2012 tanggal 6 Februari 2012 tentang Pembentukan Badan pengelolaan perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas. 33 SKPD tersebut terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD, 2 (dua) sekretariat, Inspektorat, 6 (enam) Badan, 14 (empat belas) Dinas, 3 (tiga) Kantor, dan 7 (tujuh) Kecamatan.

Informasi Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Pulau Natuna dan Anambas:

- a. Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton
- b. Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro
- c. Preservasi Jalan Tarempa - Rintis
- d. Rehabilitasi Jembatan Kerani Cs
- e. Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik
- f. Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs
- g. Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)

#### **1.4.2 Permasalahan Utama (strategic issues) dan tantangan yang dihadapi**

Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjelaskan bahwa penyelenggaraan jalan pada hakikatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perkembangan antardaerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan (*road infrastructures for all*). Dalam konteks etika kebijakan tersebut, penyelenggaraan jalan harus mampu memberikan akses bagi semua penduduk Indonesia. Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah harus menjamin tersedianya akses jalan ke semua wilayah sesuai dengan kewenangan, berdasarkan SPM (pasal 37 (1) Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004) yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata. Termasuk dalam aspek aksesibilitas dan keselamatan juga harus dijamin ketersediaan/ pelayanannya bagi kaum disabilitas (berkebutuhan khusus) serta responsif terhadap isu gender.

Sektor jalan, mengalami perubahan regulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2004 tentang Jalan (pengganti Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1980) yang memperkenalkan pembagian status jalan sebagai respons atas otonomi daerah, serta mereduksi peran Jasa Marga dalam pengelolaan jalan tol (serta menginisiasi pembentukan BPJT) yang membuka peluang bagi swasta untuk lebih banyak berperan dalam investasi jalan tol.

Harmonisasi regulasi antar sektor sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jalan dimana masih terdapat beberapa:

- a. Hambatan pengadaan tanah merupakan salah satu faktor penentu tercapainya target pembangunan/ pelebaran jalan/jalan tol (termasuk ijin penggunaan kawasan hutan);

- b. Penetapan sejumlah pusat kegiatan (PKN, PKW, PKSN, termasuk simpul transportasi (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A) dalam RTRWN (PP 13/2017) serta dalam dokumen rencana induk setiap moda transportasi (Rencana Induk Perkeretaapian Nasional/RIPNas, Rencana Induk Pelabuhan Nasional/RIPN, Tataan Kebandarudaraan Nasional/ TKN, Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/RIJLLAJ) mengharuskan adanya tambahan akses jalan nasional ke titik - titik strategis tersebut;
  - c. Perubahan status jalan berkonsekuensi logis terhadap pengelolaan aset negara dan kewajiban penyediaan pendanaannya melalui APBN atau APBD, termasuk penggunaan DAK bidang jalan;
  - d. Upaya percepatan penyelesaian Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera perlu mendapatkan dukungan regulasi dan kebijakan dari sektor - sektor terkait, khususnya dalam pengadaan tanah (termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan/IPPKH, Izin Kolaborasi), pendanaan dan pembiayaan, serta regulasi terkait aspek teknis lainnya.
  - e. Munculnya usulan - usulan terkait dukungan sektor (K/L lain), termasuk arahan khusus melalui Direktif maupun kebijakan insidental lainnya, berakibat pada perubahan prioritas alokasi pendanaan penyelenggaraan jalan untuk mendukung program insidental tersebut. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan adanya ketidaktercapaian penanganan jalan/jembatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra, bahkan termasuk sulitnya untuk pencapaian target kemandapan jalan Nasional eksisting.
1. Permasalahan yang dihadapi
    - Adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran, menyebabkan pemotongan (Refocusing) realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan berkurangnya target penanganan.
    - Kondisi infrastruktur jalan yang belum cukup memadai diwilayah kerja BPJN Kepulauan Riau sesuai dengan Standart Jalan Nasional.
    - Belum adanya pembangunan jalan lingkar dilokasi penanganan kawasan Perbatasan.
    - Tidak tertata dan terarahnya pengaturan lokasi industri yang semata hanya mengikuti/mendekati lokasi dimana tersedia fasilitas jalan utama, yang berakibat menumpuknya volume lalu lintas.
    - Masih terdapat jalan dalam kondisi rusak.
    - Belum optimalnya pelayanan drainase skala perkotaan, ditandai masih adanya titik-titik banjir.
    - Belum terbangunnya infrastruktur jalan yang diprioritaskan untuk konektivitas ke kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata, pertanian, dan perikanan.
  2. Tantangan yang dihadapi
    - Mewujudkan program pemerintah yang tertuang dalam nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran khususnya dikawasan perbatasan.
    - Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau antara lain: sebanyak 19 Pulau Terdepan di Provinsi Kepulauan Riau (Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Natuna 7, Anambas 5), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menjadi tantangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Mewujudkan kebutuhan struktur ruang jalan yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengintegritaskan infrastruktur jalan pusat-pusat kegiatan pemukiman , industri dan perdagangan jasa sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- Jarak tempuh antar Kabupaten/Kota dan jarak tempuh antar pulau juga menjadi tantangan untuk penyediaan sarana dan prasarana darat laut untuk mempercepat waktu tempuh.
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan pada kawasan strategis yang berbatasan dengan negara lain.
- Mendukung Rencana Pembangunan Pelabuhan Utama Natuna / Pelabuhan Internasional di Teluk Buton (Cargo, Logistik Industri Migas) dan mendukung akses pertahanan keamanan nasional.



**BAB II**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2024, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha - usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2024.

Visi Kementerian PUPR 2020 - 2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020 - 2024 dalam RPJMN 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

*“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan;
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan;

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang makin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang makin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis;
6. Peningkatan infratraktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi;
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya;
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi; dan
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Sasaran Kementerian PUPR Sasaran strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan empat misi dan menggunakan pendekatan metode balanced scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam empat perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (strategy map) sebagaimana digambarkan pada Gambar:



Pada bagian ini disampaikan tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020 - 2024 yang disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor : 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020 - 2024.

Tujuan dan sasaran Ditjen Bina Marga 2020 - 2024 secara terstruktur dirumuskan dalam peta strategi (strategy map) mengikuti konsep Balanced Score Card (BSC), dan dikelompokkan ke dalam 4 perspektif, yakni :

1. Stakeholder Perspectives (SP), mewakili perspektif kepentingan rakyat Indonesia, yang memandatkan pelaksanaan pemerintahan (termasuk penyelenggaraan jalan) untuk periode 2020 - 2024 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih (berikut dengan jajaran Kabinetnya);
2. Customer Perspectives (CP), mewakili perspektif kepentingan pengguna (customer) jalan yang dilindungi haknya untuk mendapatkan layanan jalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. Internal Business Perspectives (IBP), mewakili perspektif internal Ditjen Bina Marga untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara jalan (pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan) dengan sebaik - baiknya, secara efektif dan efisien sesuai kaidah peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Learning and Growth Perspectives (LGP), mewakili perspektif Ditjen Bina Marga dalam menyediakan sumber daya (SDM, keuangan, kelembagaan, sarana prasarana serta informasi pendukung) yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang diembankan.

Oleh karena itu, tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan Nasional pada periode 2020 - 2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut :

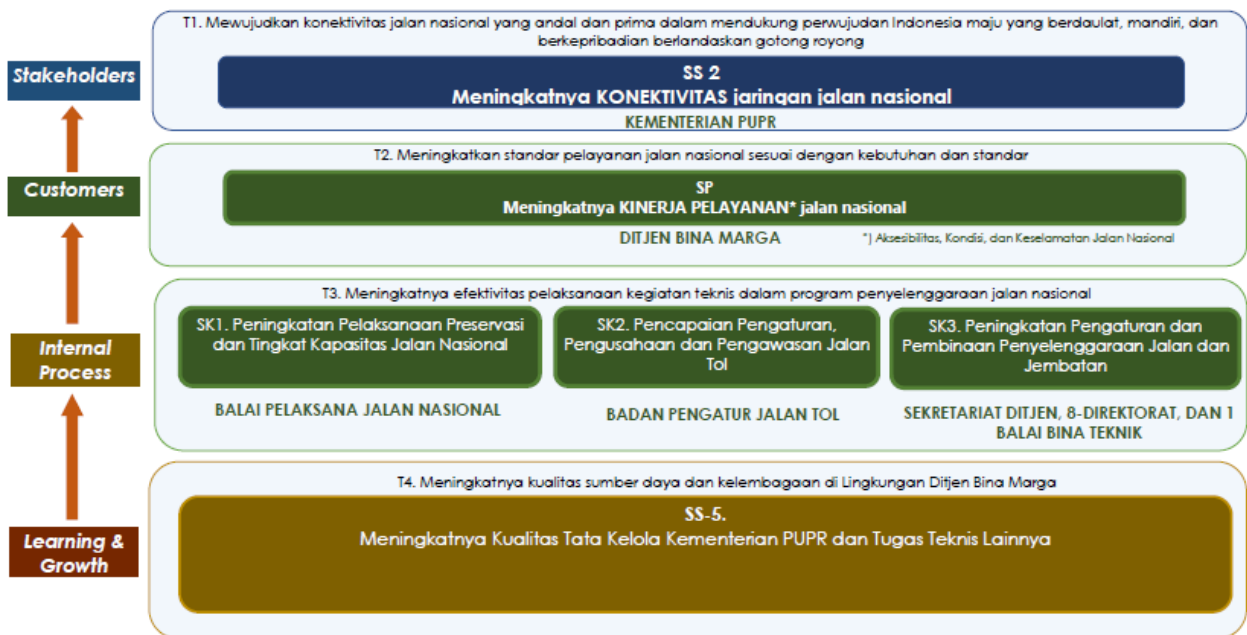
1. Mewujudkan konektivitas jalan Nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
2. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan Nasional;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.

Masing - masing tujuan Ditjen Bina Marga tersebut di atas, mewakili setiap perspektif dalam *Balanced Score Card* (BSC), yakni :

1. Mewakili tujuan dari *stakeholders perspectives* (pemberi mandat) yang dalam periode RPJMN 2020 - 2024 menginginkan terwujudnya konektivitas jalan Nasional (agenda Pembangunan Nasional PN.5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang diturunkan dalam PP2 (Infrastruktur ekonomi) dengan sasaran utama yaitu meningkatnya konektivitas wilayah);
2. Mewakili tujuan dari *customer perspectives*, yakni pengguna jalan Nasional dapat memperoleh kinerja pelayanan jalan Nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan Nasional;
3. Mewakili tujuan pada level *Internal Business Perspectives*, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Bina Marga (sesuai Undang - Undang Nomor : 38 Tahun 2004 maupun Peraturan Menteri PUPR Nomor : 03/PRT/M/2019) melalui serangkaian kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan, yang implementasinya dilaksanakan oleh setiap Unit Eselon II Pusat maupun UPT/Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga;
4. Mewakili tujuan pada level *Learning and Growth Perspectives*, sebagai upaya dari Ditjen Bina Marga untuk memenuhi modal dasar organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri atas tiga jenis sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran strategis (SS) merupakan sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi bagian dari sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat Gambar, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam BSC, sasaran ini berada di level stakeholders perspectives yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah (presiden dan wakil presiden terpilih c.q. Menteri PUPR dan Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran program (SP) “Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional” merupakan sasaran dari program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (outcome) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur BSC, sasaran ini berada di level customer perspectives Hal itu mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program infrastruktur konektivitas), yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai dengan peningkatan aksesibilitas, pemeringkatan kondisi jalan, dan pemeringkatan keselamatan jalan nasional. Berkaitan dengan indikator kinerja program Renstra Ditjen Bina Marga tahun 2020-2024, tingkat aksesibilitas jalan nasional menghubungkan 966 pusat kegiatan berskala pelayanan nasional. Meningkatnya jumlah pusat kegiatan berskala nasional ini menyebabkan turunnya angka Aksesibilitas jalan nasional pada perhitungan baseline 2019.
3. Sasaran Kegiatan (SK) merupakan sasaran sebagai keluaran (output) dari tiap-tiap kegiatan yang tercakup dalam program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja, baik pusat maupun balai di lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur BSC, sasaran ini berada di level internal business process perspectives (IBPP) dan learning and growth perspectives (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga. Sesuai dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya terkelompok menjadi dua hal sebagai berikut.
  - a. Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam infrastruktur konektivitas umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional sesuai dengan Pasal 4 (a.) dalam UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan) atau dalam Pasal 184 butir a-h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Karena kegiatan ini terkait dengan proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada di level IBPP.
  - b. Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai dengan Pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait dengan administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum, dan hubungan masyarakat. Karena sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level LGP.



Gambar 2. 4 Peta Strategi Ditjen Bina Marga Tahun 2020-2024

### 2.1.1 Tujuan Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau memiliki tujuan yang merupakan turunan dari tujuan Ditjen Bina Marga yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam Renstra tahun 2020-2024, yaitu:

1. Mewujudkan Program Infrastruktur Konektivitas jalan Nasional dengan sasaran utama yaitu meningkatnya konektivitas wilayah untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2. Meningkatkan aksesibilitas jalan, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional untuk memperoleh kinerja pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh
3. Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur jalan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan infrastruktur jalan yang berkelanjutan untuk mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing
5. Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional
6. Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau program penyelenggaraan jalan

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional dan Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Pencapaian tujuan program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau dalam pelaksanaannya diukur dengan menggunakan Indikator kinerja yang yaitu :

1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
2. Rating Kondisi Jalan Nasional
3. Rating Keselamatan Jalan Nasional
4. Tingkat Dukungan Manajemen

Mendukung terlaksananya tujuan program infrastruktur dalam menyelenggarakan jalan Nasional pada periode tahun 2020 untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan.

### **2.1.2 Sasaran Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau**

Sasaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang jalan yang diharapkan dicapai dalam memenuhi :

1. Menjadi bagian dari sasaran pembangunan nasional di bidang jalan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun;
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai dengan peningkatan aksesibilitas, pemeringkatan kondisi jalan, dan pemeringkatan keselamatan jalan nasional;
3. Sasaran sebagai keluaran (output) dari tiap-tiap kegiatan yang tercakup dalam program infrastruktur konektivitas yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja, baik Ditjen Bina Marga maupun Satuan Kerja di lingkungan BPJN Kepulauan Riau;
4. Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam infrastruktur konektivitas umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional;
5. Pelaksanaan fungsi dalam melakukan administrasi yang umumnya terkait dengan administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum, dan hubungan masyarakat.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga diharapkan dapat memenuhi tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam rencana strategis Ditjen Bina Marga yaitu:

1. Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional, menambah kapasitas jaringan Jalan Nasional dan turut serta dalam pembangunan dan peningkatan perekonomian guna mendukung daya saing industri startegis Nasional;
2. Kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis;
4. Peningkatan infratraktur dibidang jalan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;
5. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi;
6. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dibidang jalan yang bersih dan terpercaya;
7. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi; dan
8. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur

### **2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau**

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau memiliki Arah Kebijakan yang merupakan turunan dari Arah Kebijakan Ditjen Bina Marga yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional dalam Renstra tahun 2020-2024 berdasarkan IKK, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja pelayanan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional sesuai dengan program penyelenggaraan Jalan yang ditargetkan di tahun 2020
2. Meningkatkan kualitas perencanaan terhadap infrastruktur dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagai bahan perbaikan kedepannya
3. Mewujudkan pencapaian terhadap kinerja pembangunan jalan dan jembatan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan dan kepatuhan internal dalam penyelenggaraan jalan

Mendukung terlaksananya arah kebijakan dalam menyelenggarakan jalan Nasional pada periode tahun 2021 untuk periode Renstra Tahun 2020-2024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melakukan strategi dalam kegiatan Program Penyelenggaraan Jalan:

1. Melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan nasional dalam rangka mencapai kondisi jalan sesuai target rating kondisi dan target rating jalan berkeselamatan
2. Melakukan Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas jalan nasional (jalan strategis pada lintas utama pulau, kawasan prioritas, simpul transportasi, dan jalan bebas hambatan )
3. Penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional
4. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional bidang jalan dan jembatan, keselamatan jalan, layanan teknik, dan pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem informasi manajemen jalan dan jembatan

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Penyusunan perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja dengan memenuhi kriteria: a. Spesifik; b. Dapat terukur; c. Dapat dicapai; d. Berjangka waktu tertentu; dan e. Dapat dipantau dan dikumpulkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja bertujuan Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Melalui perjanjian kinerja, menyajikan informasi meliputi sasaran strategis Kementerian, indikator kinerja sasaran strategis, target dan anggaran, serta tanda tangan para pihak yang berjanji; perjanjian kinerja unit organisasi menyajikan informasi meliputi sasaran program, indikator kinerja program, target dan anggaran, serta tanda tangan para pihak yang berjanji; dan perjanjian kinerja unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja menyajikan



informasi meliputi sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target dan anggaran, serta tanda tangan para pihak yang berjanji.

Perjanjian Kinerja tahun 2021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau ditetapkan dan disampaikan tepat waktu pada Januari 2021 (dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat dimana Perjanjian kinerja Kementerian ditetapkan Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian disahkan. Perjanjian kinerja unit organisasi/unit kerja/unit pelaksana teknis/satuan kerja disepakati oleh Pimpinan entitas yang bersangkutan dengan Pimpinan entitas di atasnya dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disahkan.

Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Awal / Rekapitulasi Output Awal BPJN Kepulauan Riau TA 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100 %	100,00 %
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	83,33 %	83,33 %
	<b>Rincian Output</b>		
	CBC 008 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	3,75 Km	9,61 Km
	a. Pembangunan Jalan	3,75 Km	9,61 Km
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	3,75 Km	9,61 Km
	CBF 007 Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	19,11 M	83,49 M
	a. Pembangunan Jembatan	19,11 M	83,49 M
	b. Pembangunan Jembatan Gantung	- M	1,00 Unit
CBC 002 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1,00 Km	4,80 Km	
	<b>IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100 %	100,00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2,46 %	2,54 %
	<b>Rincian Output</b>		
	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	554,07 Km	578,01 Km
	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	22,05 Km	14,07 Km
	a. Rehabilitasi / Rekonstruksi Daerah Bencana	- Km	0,60 Km
	b. Pemeliharaan Preventif	2,93 Km	0,45 Km
	c. Rehabilitasi Minor Jalan	12,99 Km	3,90 Km
	d. Rehabilitasi Mayor Jalan	1,55 Km	3,27 Km
	e. Rekonstruksi Jalan	4,13 Km	5,01 Km
	f. Penanganan Longsoran	0,45 Km	0,84 Km
	g. Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	- M	6.530,00 M
	CDC 004 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	22,43 Km	29,19 Km
	- Penanganan Drainase	22,43 Km	29,19 Km
	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	5.642,90 M	4.703,90 M
	CDF 002 Preservasi Jembatan	475,20 M	3.272,60 M
a. Rehabilitasi Jembatan	475,20 M	1.737,90 M	
b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	- M	1.534,70 M	
	<b>IKSP 2 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100,00 %	100,00 %
	Parameter <i>Rating Keselamatan Jalan Nasional</i>	4,40 %	4,40 %
	<b>Rincian Output</b>		
CDC 004 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	- Km	- Km	

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran  
Rp 435.857.895

Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Revisi / Rekapitulasi Output BPJN Revisi Kepulauan Riau TA 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>			
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	83,00 %	83,00 %	
	<b>Rincian Output</b>			
	<b>CBC 008</b>	<b>Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)</b>	<b>3,75 Km</b>	<b>9,61 Km</b>
		a. Pembangunan Jalan	3,75 Km	9,61 Km
		- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	3,75 Km	9,61 Km
	<b>CBF 007</b>	<b>Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)</b>	<b>19,11 M</b>	<b>83,49 M</b>
		a. Pembangunan Jembatan	19,11 M	83,49 M
		b. Pembangunan Jembatan Gantung	- M	1,00 Unit
	<b>CBC 002</b>	<b>Pelebaran Jalan Menambah Lajur</b>	<b>1,00 Km</b>	<b>4,80 Km</b>
	<b>IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>			
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>			
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>		2,46	2,69
	<b>Rincian Output</b>			
	<b>CDC 001</b>	<b>Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan</b>	<b>549,07 Km</b>	<b>121,22 Km</b>
	<b>CDC 016</b>	<b>Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)</b>	<b>- Km</b>	<b>456,75 Km</b>
	<b>CDC 002</b>	<b>Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan</b>	<b>22,05 Km</b>	<b>13,60 Km</b>
		a. Rehabilitasi / Rekonstruksi Daerah Bencana	- Km	0,60 Km
		b. Pemeliharaan Preventif	2,93 Km	0,45 Km
		b. Rehabilitasi Minor Jalan	12,99 Km	3,90 Km
		d. Rehabilitasi Mayor Jalan	1,55 Km	3,27 Km
		e. Rekonstruksi Jalan	4,13 Km	4,46 Km
		f. Penanganan Longsor	0,45 Km	0,92 Km
		g. Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	- M	6.530,00 M
	<b>CDC 021</b>	<b>Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)</b>	<b>- Km</b>	<b>1,25 Km</b>
		a. Penanganan Longsor	-	1,25 Km
	<b>CDC 004</b>	<b>Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan</b>	<b>22,43 Km</b>	<b>0,05 Km</b>
		- Penanganan Drainase	22,43 Km	0,05 Km
	<b>CDC 020</b>	<b>Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)</b>	<b>- Km</b>	<b>46,97 Km</b>
		- Penanganan Drainase	- Km	46,97 Km
	<b>CDC 029</b>	<b>Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)</b>	<b>- Km</b>	<b>3,00 Km</b>
		a. Penanganan Longsor	- Km	3,00 Km
<b>CDF 001</b>	<b>Preservasi Rutin Jembatan</b>	<b>5.642,90 M</b>	<b>- M</b>	
<b>CDF 014</b>	<b>Preservasi Rutin Jembatan (PEN)</b>	<b>- M</b>	<b>4.704,10 M</b>	
<b>CDF 002</b>	<b>Preservasi Jembatan</b>	<b>475,20 M</b>	<b>3.272,70 M</b>	
	a. Rehabilitasi Jembatan	475,20 M	1.738,00 M	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	- M	1.534,70 M	
<b>CBR 001</b>	<b>Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	<b>- Dok</b>	<b>4,00 Dok</b>	
<b>CBR 002</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik</b>	<b>1,00 Dok</b>	<b>1,00 Dok</b>	
<b>IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>				
<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>				
Parameter <i>Rating Keselamatan Jalan Nasional</i>		4,30	4,30	
<b>Rincian Output</b>				
<b>CDC 020</b>	<b>Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)</b>	<b>- Km</b>	<b>234,55 Km</b>	
	- Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	- Km	231,91 Km	
	- Penanganan Bahu Diperkeras	- Km	2,64 Km	

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran  
Rp 455.620.610.000

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau dalam membuat Perjanjian Kinerja berdasarkan Permen PUPR nomor 16/PRT/M/2020 dengan wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau.

Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau semula Perjanjian Kinerja Awal dan menjadi Perjanjian Kinerja Revisi dikarenakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, diperlukan pedoman penyusunan Program, Kegiatan, dan Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Penyusunan Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bertujuan untuk memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga, Mitra Kerja KIL di Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas dalam mempersiapkan Program, Kegiatan, dan Keluaran (Output) Kementerian/Lembaga beserta sasaran dan indikator serta informasi kinerja lainnya, yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KIL), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KIL), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

Ruang Lingkup Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran mencakup:

- a. Penjelasan Umum Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
- b. Redesain Program;
- c. Redesain Kegiatan; dan
- d. Redesain Output (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output.

Selain itu perubahan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran, menyebabkan pemotongan (Refocusing) realokasi penghematan anggaran dampak dari pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa arahan Dirjen Bina Marga dimana tertuang dari Surat Dirjen Bina Marga nomor PR. 0303-Db/152 tanggal 03 Februari 2021 hal Penghematan Belanja Direktorat Jenderal Bina Marga, Surat Dirjen Bina Marga Perihal Revisi DIPA Direktorat Jenderal Bina Marga Dalam Rangka Refocusing Belanja Tahap IV dan Tindaklanjut Midterm Review dan Surat Dirjen Bina Marga Perihal Optimalisasi Anggaran Sumber Dana Rupiah Murni TA. 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga. Terhadap kebijakan tersebut menyebabkan perubahan terhadap target penanganan dan relokasi anggaran tahun 2021 pada Perjanjian Kinerja disetiap Satker yang ada diwilayah Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau.

### **2.3 Metode Pengukuran**

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melakukan pengukuran pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran sasaran strategis dilakukan melalui survei tersendiri dan pengukuran berbasis outcome (*outcome based*), pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator kinerja (*output*) pada Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SiPP) dan e-Monitoring Kementerian PUPR dengan target kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Metode pengukuran untuk mengevaluasi hasil kinerja diuraikan pada tabel metode pengukuran untuk sasaran program dan pada tabel metode pengukuran untuk sasaran kegiatan.

Tabel Metode Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Program

No.	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Melalui perhitungan kemantapan kondisi jalan. Melalui perhitungan waktu tempuh yang merupakan fungsi dari kondisi IRI, Lebar Perkerasan dan Volume Capacity Ratio (VCR)	Hasil Survey

Tabel Metode Pengukuran Kinerja untuk Sasaran Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan / Output	Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	e-Monitoring
2.	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	e-Monitoring
3.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan pelebaran Jalan Menambah Lajur	e-Monitoring
4.	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rutin jalan	e-Monitoring
5.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	e-Monitoring
6.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	e-Monitoring
7.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	e-Monitoring
8.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	e-Monitoring
9.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	e-Monitoring
10.	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	e-Monitoring
11.	Preservasi Rutin Jembatan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rutin Jembatan	e-Monitoring
12.	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Rutin Jembatan (PEN)	e-Monitoring
13.	Preservasi Jembatan	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Pemeliharaan Jembatan	e-Monitoring

14.	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Total Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	e-Monitoring
15.	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Total Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	e-Monitoring
16.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Total Panjang Jalan yang mendapatkan Penanganan Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	e-Monitoring
17.	Layanan Sarana Internal	Total Layanan Sarana Internal	e-Monitoring
18.	Layanan Prasarana Internal	Total Layanan Prasarana Internal	e-Monitoring
19.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Total Layanan Dukungan Manajemen Satker	e-Monitoring
20.	Layanan Perkantoran	Total Layanan Perkantoran	e-Monitoring

### 2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) - Waktu Tempuh

Konektivitas' pada Perencanaan Jangka Menengah 2020-2024 didefinisikan sebagai waktu tempuh per 100 km. Rata-rata waktu tempuh di Indonesia saat ini adalah 2,4-2,5 jam/100 km, yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, yang memiliki waktu tempuh rata-rata dibawah 2,0 jam/100 km. Waktu tempuh yang tinggi dapat berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan dapat menghambat daya saing Indonesia di dunia global. Diharapkan pada tahun 2024 dapat diwujudkan dominasi jaringan jalan nasional yang memiliki waktu tempuh dibawah 1,9 jam/100 km (dengan kecepatan rata-rata 50 km/jam). Rumus yang digunakan adalah:

$$Waktu Tempuh = \frac{100}{S} \text{ (jam per 100 km)}$$

S: Kecepatan rata-rata, (km/jam).

Pengamatan kecepatan rata-rata perjalanan dilakukan pada koridor-koridor terpilih dan dikelompokkan untuk masing-masing rute berdasarkan kondisi topografi, lebar dan perkerasan (standar) jalan, volume lalu lintas dan lain-lain.

### 2.3.2 Indikator Kinerja Program - 1 (IKP - 1) (Aksesibilitas)

Aksesibilitas didefinisikan sebagai persentase jumlah simpul/kawasan/wilayah strategis yang sudah terhubung oleh jalan nasional. Sejumlah simpul/kawasan/wilayah strategis tersebut meliputi PKN, PKW, PKSN, KSPN, KEK, KI, PU, PP, Bandar udara. Persentase jumlah pusat kegiatan dan simpul transportasi yang terakses langsung dengan jalan nasional. Dalam hal ini pusat kegiatan atau simpul transportasi didefinisikan telah terakses bila jalan nasional telah terhubung sampai dengan pintu masuk (gate) dari masing-masing pusat kegiatan. Khusus untuk Pelabuhan, Bandara, Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimana jalan akses berada dalam kewenangan operator/pengembang (developer), maka akses jalan nasional hanya sampai pada titik awal jalan yang dikelola oleh operator/developer.

$$TI = \frac{SN_a}{\sum SN} \times 100 (\%)$$

Dimana:

- TI : Tingkat Aksesibilitas (%)
- $SN_a$  : Jumlah Pusat Kegiatan yang telah terakses Jalan Nasional
- $\sum SN$  : Total jumlah Pusat Kegiatan

### 2.3.3 Indikator Kinerja Program – 2 (IKP – 2) (Rating Kondisi Jalan)

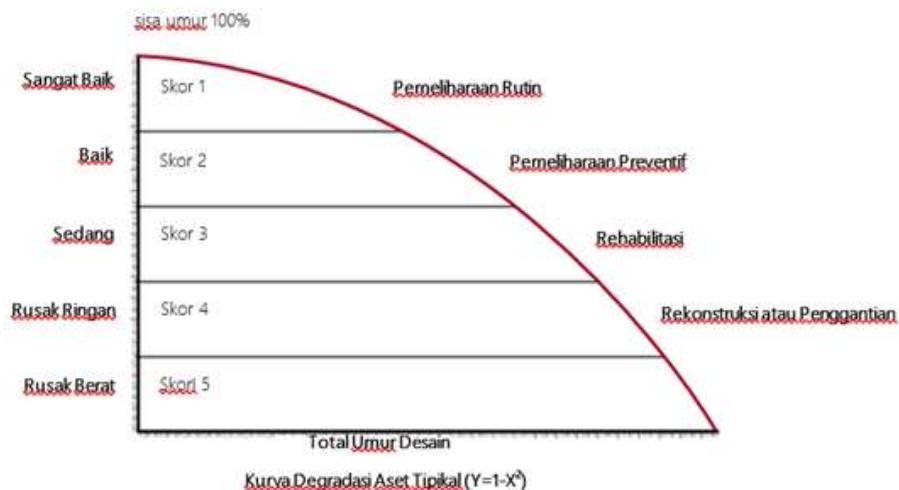
IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:

- Kekasaran / *Roughness* (nilai international roughness index, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (Pavement Strength)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektivitas Drainase	15%

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5, dimana skor 1 menunjukkan bahwa kondisi jalan masih sangat baik atau baru, sedangkan skor 5 menunjukkan bahwa kondisi jalan rusak berat. Setiap komponen juga memiliki skor individu yang berupa bilangan bulat dalam rentang 1 sampai 5. Setiap skor kemudian dikalikan dengan faktor pembobot yang telah ditentukan untuk memperoleh nilai IKP Komponen Final. Namun bila ada setidaknya satu dari keempat IKP Komponen tersebut memperoleh skor 5, maka nilai IKP Rating Kondisi Jalan Final secara otomatis adalah 5. Nilai Final ini mengindikasikan perlu adanya penanganan/perbaikan pada segmen tersebut untuk mencapai tingkat layanan yang disyaratkan.



Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa IKU Kondisi Jalan merupakan rerata terbobot dari empat komponen KPI individu yaitu kekasaran (IRI), kondisi permukaan

perkerasan (PCI), sisa umur perkerasan (residual pavement strength), dan efektivitas drainase (drainase permukaan dan bawah permukaan). Pada bab ini, masing-masing komponen IKU individu akan diulas secara terperinci.

Perlu dipahami bahwa data yang diambil dan digunakan adalah dalam penilaian indikator ini adalah data segmen per 100m pada setiap lajur, sesuai yang tersedia di database Subdit ADPS. Nantinya masing-masing segmen memiliki 4 nilai KPI individu, dan KPI final sebagai rerata terbobot dari 4 nilai KPI individu tersebut.

IKU Kondisi Jalan merupakan rerata terbobot dari empat komponen KPI individu yaitu :

- Kekasaran (IRI)
- Kondisi permukaan perkerasan (PCI)
- Sisa umur perkerasan (*residual pavement strength*)
- Efektivitas drainase (drainase permukaan dan bawah permukaan).

a. KPI Individu – Kekasaran / Roughness (IRI)

Dalam menilai IKU Kekasaran/ *Roughness KPI* diperlukan data IRI untuk setiap tipe perkerasan per 100m yang dikelompokkan dalam 2 tipe, yaitu berpenutup dan tanpa penutup. **Error! Reference source not found.** berikut menunjukkan pengelompokan tipe perkerasan berdasarkan material perkerasannya.

Kode Perkerasan	Material Perkerasan	Tipe Perkerasan	Kode Perkerasan	Material Perkerasan	Tipe Perkerasan
1	Tanah	Tanpa Penutup	11	Lataston (HRS)	Berpenutup
2	Japat (AWCAS) / Kerikil	Tanpa Penutup	12	HRSSA	Berpenutup
3	Telford/Macadam Terbuka	Berpenutup	13	Slurry Seal	Berpenutup
4	Burtu	Berpenutup	14	Macro Seal	Berpenutup
5	Burda	Berpenutup	15	Micro Asbuton	Berpenutup
6	Penetrasi Macadam 1 Lapis	Berpenutup	16	DGEM	Berpenutup
7	Penetrasi Macadam 2 Lapis	Berpenutup	17	SMA	Berpenutup
8	Lasbutag (Butas)	Berpenutup	18	DMA	Berpenutup
9	Aspal Beton (AC)	Berpenutup	19	HSWC	Berpenutup
10	Latasbum (NACAS)	Berpenutup	21	Beton	Berpenutup

Pada tabel di bawah ini menunjukkan sistem penilaian IKU Kekasaran (IRI) dengan Skala Penilaian KPI Roughness.

Tabel Skala Penilaian KPI Roughness

Skor KPI	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
1	Sangat Baik	IRI < 2	IRI < 4
2	Baik	2 ≤ IRI < 4	4 ≤ IRI < 9
3	Sedang	4 ≤ IRI < 6	9 ≤ IRI < 13
4	Rusak Ringan	6 ≤ IRI < 8	13 ≤ IRI < 14
5	Rusak Berat	IRI ≥ 8	IRI ≥ 14

IKU Individu Kekasaran adalah **bilangan bulat** dalam skala 1 - 5.

- b. KPI Individu - Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition Index*  
 KPI individu Kondisi Permukaan Jalan dihitung berdasarkan data PCI yang tersedia. Tabel di bawah ini menunjukkan sistem skala penilaian KPI untuk PCI.

Tabel Skala Penilaian KPI PCI

IKU Kondisi Permukaan Jalan	Deskripsi	Rentang PCI <sub>final</sub>
1	Sangat Baik	PCI > 85
2	Baik	70 < PCI ≤ 85
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25

KPI Individu PCI adalah **bilangan bulat** dalam skala 1 - 5.

- c. KPI Individu – Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Structural Life*  
 Dalam menghitung Sisa Umur Perkerasan (RSL) diperlukan data lendutan/defleksi yang menggambarkan kondisi struktural suatu segmen jalan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung RSL:

- 1) Menghitung Nilai Struktural Perkerasan / *Structural Number of Pavement* (SNP)

$$SNP = \frac{167}{d_0^{0.57}} \quad \text{Persamaan 3}$$

dimana:

SNP = Nilai Struktural Perkerasan

$d_0$  = defleksi sensor  $d_0$  FWD yang sudah dinormalisasi ke beban 50 kN (microns)

- 2) Menghitung Sisa Kapasitas Struktural / *Remaining Structural Capacity* (CAP)

$$CAP = \left\{ \frac{[SNP - (K_i * 1.05)]}{[K_g * 2.135]} \right\}^{\frac{1}{K_c * 0.175}} \quad \text{Persamaan 4}$$



dimana:

$CAP$  = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)

$SNP$  = Nilai Stuktural Perkerasan

$K_i, K_g, K_c$  = faktor kalibrasi berdasarkan tipe perkerasan  
(aspal full depth digunakan sebagai default)

Tabel Faktor Kalibrasi K

Jenis Perkerasan	$K_i$	$K_g$	$K_c$
Aspal Tipis Tak Terikat	1.650	0.925	2.100
Aspal Tipis Stabilised	1.700	0.700	2.800
Aspal Full Depth	0.000	1.930	0.610

3. Menghitung Sisa Umur Perkerasan / Remaining Structural Life (RSL)

$$RSL = \frac{LN \left( \frac{CAP+r+MESA*(1+r)}{MESA} \right)}{LN(1+r)} - 1 \quad \text{Persamaan 5}$$

dimana :

$RSL$  = Sisa Umur Perkerasan (dalam tahun)

$CAP$  = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)

$SNP$  = Nilai Stuktural Perkerasan

$r$  = Laju pertumbuhan lalu lintas

Apabila data lendutan/defleksi tidak tersedia, nilai RSL dapat diperoleh dengan pendekatan terhadap nilai IRI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{\ln \frac{IRI-1.52}{6.48}}{-0.074} \quad \text{Persamaan 6}$$

jika  $IRI = 0$  atau tidak ada data, maka diambil nilai  $RSL = 9$  (tahun)

jika  $IRI < 2$ , maka diambil nilai  $RSL = 35$  (tahun)

Bila nilai  $RSL_{IRI}$  kurang dari 0, maka diambil nilai  $RSL = 0$  sesuai persamaan berikut:

$$RSL_{approx} = \max(RSL_{IRI}, 0) \quad \text{Persamaan 7}$$

Nilai  $RSL_{final}$  adalah nilai minimum antara  $RSL_{approx}$  atau 50 sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{final} = \min(RSL_{approx}, 50) \quad \text{Persamaan 8}$$

Tabel Skala Penilaian KPI RSL

Skor KPI	Deskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	$RSL > 15$
2	Baik	$10 < RSL \leq 15$
3	Sedang	$5 < RSL \leq 10$
4	Rusak Ringan	$1 < RSL \leq 5$
5	Rusak Berat	$RSL \leq 1$

Nilai KPI Individu RSL adalah bilangan bulat dalam skala 1 – 5

d. KPI Individu - Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness*

Terdapat 2 sub-komponen penting dalam menentukan nilai KPI Efektivitas Drainase, yaitu kondisi drainase permukaan dan kondisi drainase subsoil. Nilai KPI Efektivitas Drainase final adalah rata-rata terbobot dari kedua sub-komponen tersebut. Efektivitas drainase permukaan mengindikasikan seberapa baik air mengalir dari permukaan jalan. Nilai KPI efektivitas drainase permukaan merupakan fungsi dari permukaan perkerasan dan kondisi bahu jalan. Faktor penunjang lainnya adalah *terrain*, dimana daerah berbukit atau pegunungan dapat meningkatkan nilai KPI daripada daerah datar.

Efektivitas drainase subsoil mengindikasikan seberapa baik air mengalir dari perkerasan jalan dan sekelilingnya (termasuk *cross road drainage*). Nilai KPI efektivitas drainase permukaan merupakan fungsi dari a) persyaratan drainase subsoil; b) desain, konstruksi, dan pemeliharaan drainase subsoil; c) kondisi infrastruktur drainase subsoil. Karena keterbatasan data yang tersedia saat ini, digunakan sistem penilaian KPI Efektivitas Drainase yang sederhana untuk jangka pendek. Seiring dengan berjalannya waktu dan ketersediaan data yang makin lengkap, akan digunakan sistem penilaian KPI Efektivitas Drainase jangka panjang.

Dalam mengolah KPI Efektivitas Drainase Permukaan digunakan pendekatan menggunakan data kondisi permukaan perkerasan (PCI) dan data *terrain* per 100m.

Efektifitas Drainase Permukaan

Tabel di bawah ini menunjukkan sistem penilaian KPI untuk Efektivitas Drainase Permukaan.

Skor KPI	Deskripsi	Kombinasi PCI dan <i>Terrain</i> Datar		Kombinasi PCI dan <i>Terrain</i> Berbukit/Pegunungan	
		Rentang $PCI_{raw}$	<i>Terrain</i>	Rentang $PCI_{raw}$	<i>Terrain</i>
1	Sangat Baik	$PCI > 85$	Datar	$PCI > 70$	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	$70 < PCI \leq 85$	Datar	$55 < PCI \leq 70$	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	$55 < PCI \leq 70$	Datar	$25 < PCI \leq 55$	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	$25 < PCI \leq 55$	Datar	$PCI \leq 25$	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	$PCI \leq 25$	Datar		

Efektifitas Drainase Subsoil

Dalam mengolah KPI Efektivitas Drainase Subsoil digunakan pendekatan menggunakan data ketersediaan infrastruktur drainase dan data *terrain* per 100m.

Tabel di bawah ini menunjukkan sistem penilaian KPI untuk Efektivitas Drainase Subsoil.

Skor KPI	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	<i>Terrain</i>
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak / Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	Ya	Datar
5	Rusak Berat	Tidak / Tidak ada data	Datar

Nilai KPI Efektivitas Drainase final adalah rata-rata terbobot dari kedua komponen tersebut di atas dengan rasio pembobotan 80% drainase permukaan dan 20% drainase subsoil. Apabila salah satu dari kedua komponen mendapatkan skor 5, maka nilai KPI Efektivitas Drainase final otomatis adalah 5.

e. KPI Final

KPI final suatu segmen merupakan rata-rata terbobot dari keempat komponen tersebut di atas dengan faktor pembobot sesuai dengan **Error! Reference source not found.**. Dalam menentukan faktor pembobot untuk masing-masing komponen harus selaras dengan prioritas Bina Marga dan sesuai dengan proporsi kepentingannya. Faktor pembobotan ditetapkan oleh protokol Direktorat Jenderal Bina Marga yang akan disepakati lebih lanjut. Pembobotan dapat disesuaikan di level Nasional, Balai, Provinsi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Faktor Pembobot KPI Final

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%

Jika salah satu dari komponen memiliki skor 5, maka skor keseluruhan pada segmen tersebut otomatis adalah 5.

### 2.3.4 Indikator Kinerja Program – 3 (IKP – 3) (Tingkat Keselamatan Jalan)

Indikator Kinerja Program – 3 (Tingkat Keselamatan Jalan) terdiri dari nilai komposit yang terbobot dari 2 komponen individu yakni IKP Komponen Kecelakaan dan IKP Komponen Blackspot. IKP Komponen Kecelakaan diperoleh dari rasio angka kecelakaan terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu (provinsi/Balai/Pulau/Nasional). Sedangkan IKP Komponen Blackspot diperoleh dari rasio jumlah blackspot terhadap jumlah populasi pada level pelaksana tertentu. IKP Komponen Kecelakaan

$$IKP_{kecelakaan} = \frac{\text{Indeks Kecelakaan}}{60} * 5$$

*jika Indeks Kecelakaan ≤ 15, maka diambil nilai  $KPI_{kecelakaan} = 1$*

*jika Indeks Kecelakaan > 60, maka diambil nilai  $KPI_{kecelakaan} = 5$*

Dimana

$$\text{Indeks Kecelakaan} = \frac{\text{Total kecelakaan terbobot}}{\text{Populasi (juta)}}$$

IKP Komponen Blackspot

$$IKP_{blackspot} = \frac{\text{Indeks Blackspot}}{8} * 5$$

*jika Indeks Blackspot ≤ 2, maka diambil nilai  $KPI_{blackspot} = 1$*

*jika Indeks Blackspot > 8, maka diambil nilai  $KPI_{blackspot} = 5$*

Dimana

$$\text{Indeks Blackspot} = \frac{\text{Total blackspot}}{\text{Populasi (juta)}}$$

IKP Tingkat Keselamatan Final dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{IKP Kecelakaan} : \text{IKP Blackspot} = 70\% : 30\%$$

## 2.4 Target Tahun ini Menurut Rencana Strategis

Target tahun 2021 pada Rencana Strategis (Renstra) dimana seluruh target dari sasaran program dengan indikator kinerja/output kegiatan tahun 2021 dijabarkan di dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau 2020-2024. Berdasarkan Renstra tahun 2021 target sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4.1 Target Sasaran Program Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target
1.	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Jalan Nasional	IKP 1 - Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (Persentase PKN, PKW, PKS, dan simpul transportasi nasional yang telah diakses jalan nasional)	%	83,00
		IKP 2 - Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai rating terhadap indikator IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan)	-	2,69
		IKP 3 - Tingkat Rating Keselamatan Jalan Nasional nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi serta jumlah titik blackspot per populasi)	-	4,30

Pengukuran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional berdasarkan sasaran program tahun 2021 pada indikator kinerja dengan output kegiatan yaitu:


1. Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun
  - Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP),
2. Panjang Jembatan dibangun
  - Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP),
3. Panjang jalan yang terpelihara
  - Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan
  - Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)
4. Panjang jalan yang ditingkatkan
  - Pelebaran Jalan Menambah Lajur
  - Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan
  - Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)
  - Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan
  - Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)
  - Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)

5. Panjang jembatan yang dipelihara
  - Preservasi Rutin Jembatan (PEN),
6. Panjang jembatan yang ditingkatkan
  - Preservasi Jembatan

Adapun perbandingan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau tahun 2021.

Tabel Perbandingan Target Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis (Renstra)

No.	Output	Satuan	Target			Keterangan
			Renstra	Awal (PK Revisi)	Revisi DIPA Akhir	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional</b>						
<b>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>						
1.	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km	14,90	9,61	10,58	
2.	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	M	25,68	83,49	95,47	
3.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	3,80	4,80	4,80	
<b>Rating Kondisi Jalan Nasional</b>						
1.	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	586,83	121,22	121,22	
2.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	Km	-	456,75	456,75	
3.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	-	13,60	13,60	
4.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	Km	-	1,25	1,25	
5.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	158,94	0,05	0,05	
6.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km	-	46,97	46,97	
7.	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	Km	-	3,00	3,00	
8.	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	M	-	4.704,10	4.704,10	
9.	Preservasi Jembatan	M	-	3.272,60	3.272,70	
10.	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1,00	4,00	4,00	
11.	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	1,00	1,00	1,00	
<b>Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>						
13.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km	-	234,55	234,55	
<b>Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>						
<b>IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</b>						
14.	Layanan Sarana Internal	Unit	1,00	2,00	2,00	
15.	Layanan Prasarana Internal	Unit	1,00	2,00	2,00	
16.	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1,00	4,00	4,00	
17.	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	3,00	3,00	



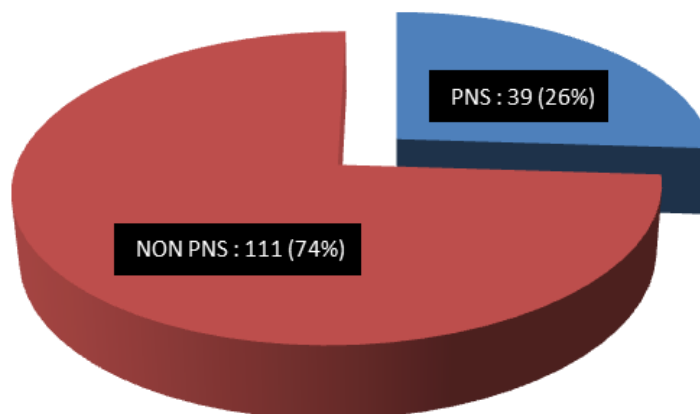
**BAB III**

## BAB III KAPASITAS ORGANISASI

### 3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam suatu organisasi perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang keberlangsungan suatu organisasi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau didukung oleh sejumlah sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia, dan pangkat/golongan. Total keseluruhan jumlah pegawai di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau adalah 150 orang, yang terdiri dari 39 orang PNS dan 111 orang Non PNS.

Gambar 3.1 Grafik Status Kepegawaian Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau

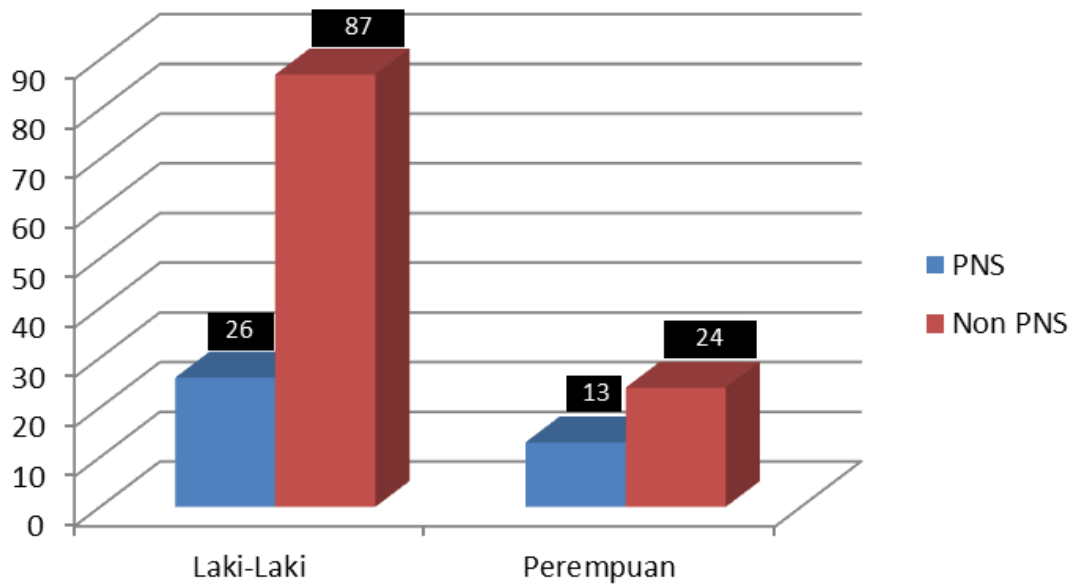


Sumber daya manusia yang mendukung kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau dapat digolongkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan usia. Adapun informasi rinci mengenai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau, sebagai berikut :

#### 3.1.1 Informasi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Jenis Kelamin yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2021, PNS dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang sedangkan perempuan 13 orang dan Non PNS jenis Kelamin pria sebanyak 87 orang sedangkan perempuan 24 orang.

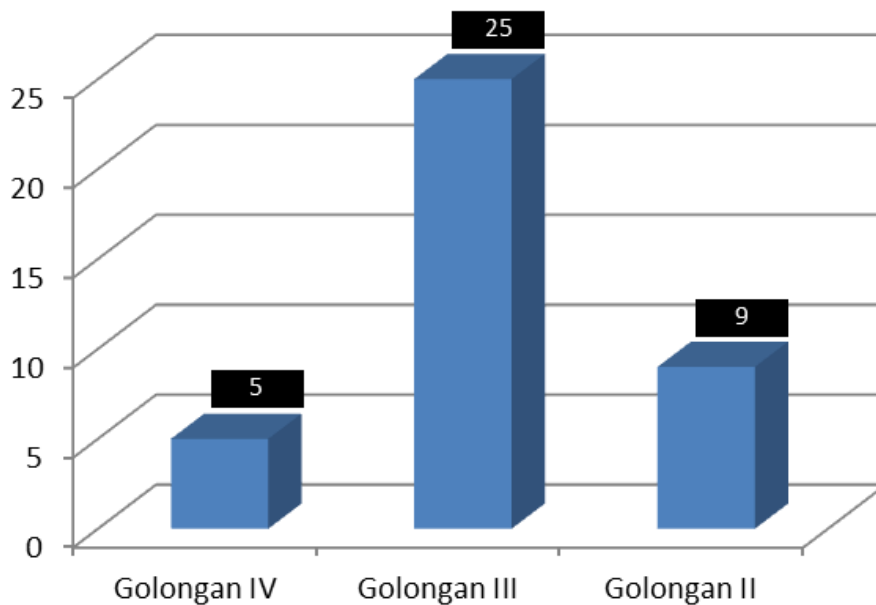
Gambar 3.1.1 Grafik Informasi SDM PNS dan Non PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



### 3.1.2 Informasi Kepegawaian berdasarkan Golongan

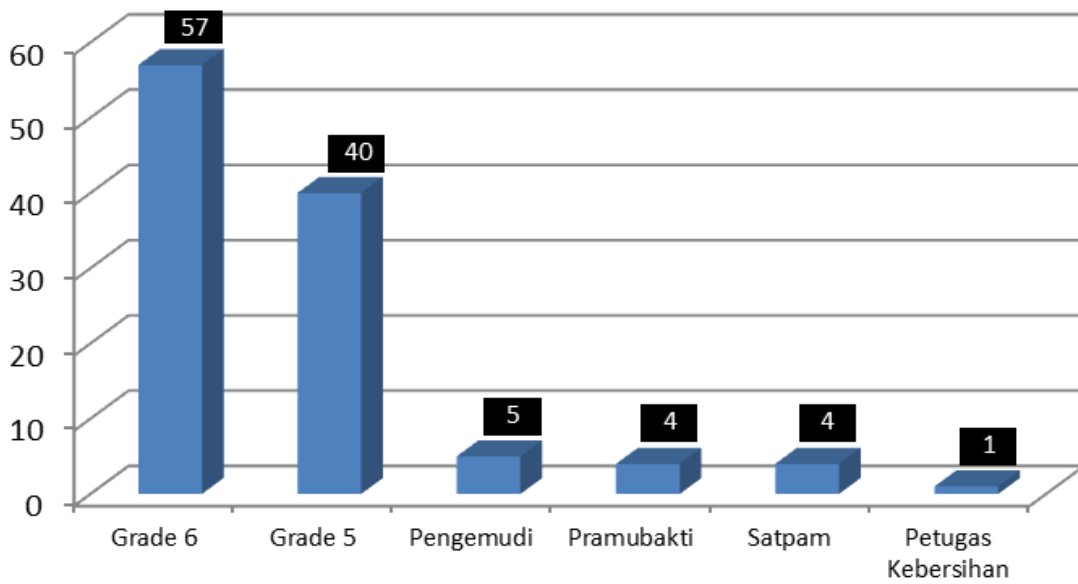
Berdasarkan Golongan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2021, PNS dengan Golongan IV (empat) sebanyak 5 orang, Golongan III (tiga) sebanyak 25 orang dan Golongan II (dua) sebanyak 9 orang. Sedangkan Non PNS dengan Grade 6 (enam) sebanyak 57 orang, Grade 5 (lima) sebanyak 40 orang, Pengemudi 5 orang, Pramubakti 4 orang, Satpam 4 orang dan Petugas Kebersihan 1 orang.

Gambar 3.1.2.1 Grafik Informasi SDM PNS Berdasarkan Golongan





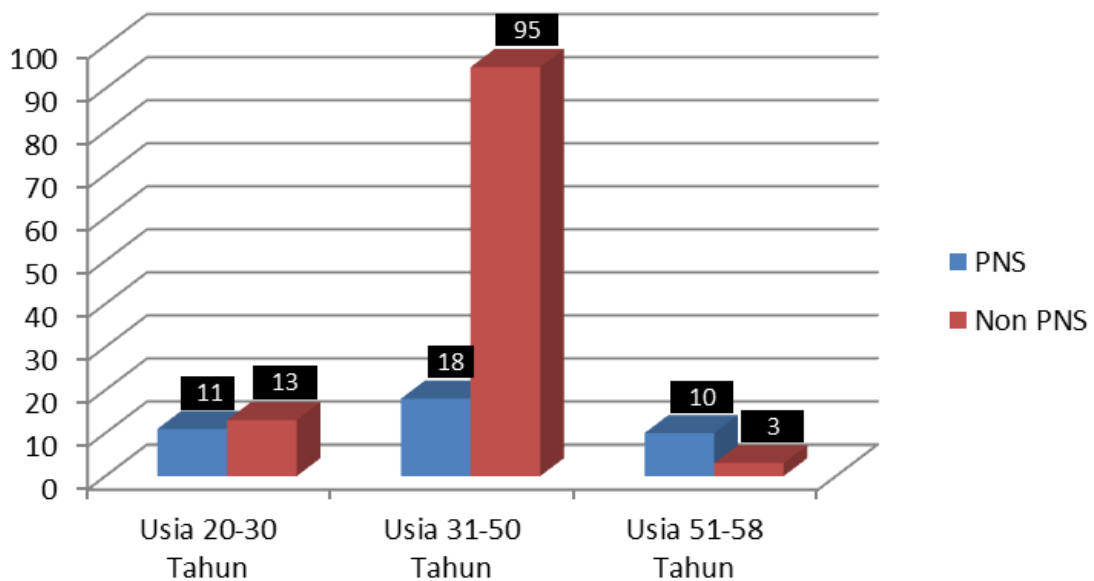
Gambar 3.1.2.2 Grafik Informasi SDM Non PNS Berdasarkan Grade



### 3.1.3 Informasi Kepegawaian berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2021, PNS dengan usia 51 - 58 tahun sebanyak 10 orang, dengan usia 31 - 50 tahun sebanyak 18 orang dan usia 20 - 30 sebanyak 11 orang. Sedangkan Non PNS dengan usia 51 - 58 tahun sebanyak 3 orang, dengan usia 31 - 50 tahun sebanyak 95 orang dan usia 20-30 sebanyak 13 orang.

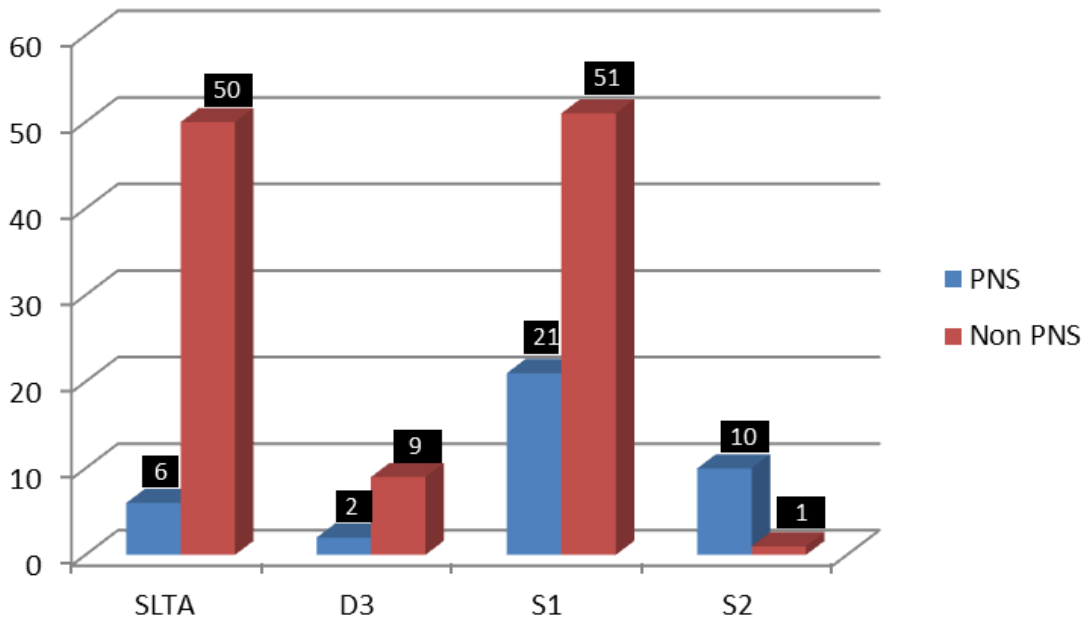
Gambar 3.1.3 Grafik Informasi SDM PNS dan Non PNS Berdasarkan Usia



### 3.1.4 Informasi Kepegawaian berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Pendidikan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2021, PNS dengan pendidikan S2 sebanyak 10 orang, dengan pendidikan S1 sebanyak 21 orang, dengan pendidikan D3 sebanyak 2 orang dan pendidikan SLTA sebanyak 6 orang. Sedangkan Non PNS dengan pendidikan S2 sebanyak 1 orang, dengan pendidikan S1 sebanyak 51 orang, dengan pendidikan D3 sebanyak 9 orang dan pendidikan SLTA sebanyak 50 orang.

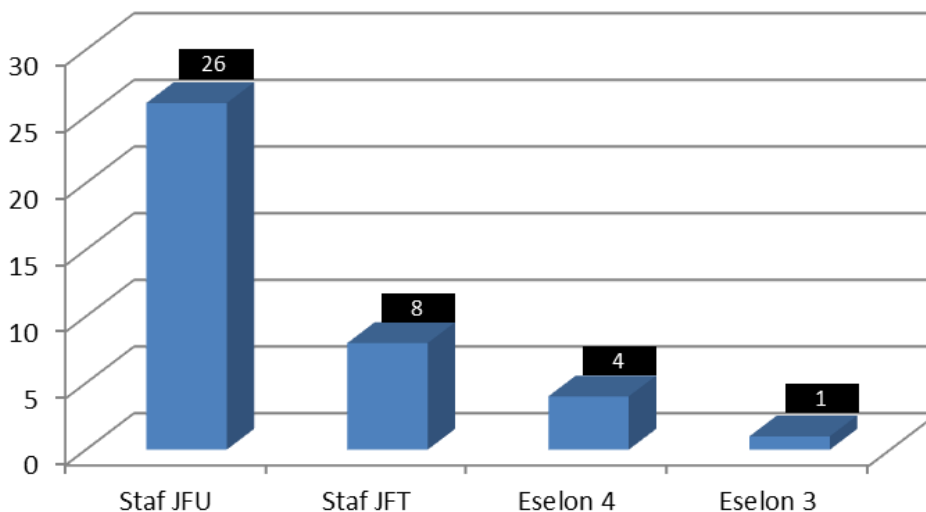
Gambar 3.1.4 Grafik Informasi SDM PNS Berdasarkan Pendidikan



### 3.1.5 Informasi Kepegawaian berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Jabatan yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada Tahun 2021, PNS dengan Jabatan Eselon 3 sebanyak 1 orang, dengan Jabatan Eselon 4 sebanyak 4 orang, dengan Jabatan Staf JFT sebanyak 8 orang dan Jabatan JFU sebanyak 26 orang.

Gambar 3.1.5 Grafik Informasi SDM PNS Berdasarkan Jabatan



## 3.2 Sarana Prasarana

Dalam melakukan tugas dan fungsinya di wilayah kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau belum didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai dikarenakan baru terbentuknya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau berdasarkan Permen PUPR nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana sebelumnya wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau berada dibawah BPJN Jambi. Dalam hal sarana dan prasarana yang dimiliki Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau belum ada serah terima aset antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau sehingga belum adanya pencatatan Aset di Simak BMN.

### 3.3 DIPA

#### 3.3.1 Alokasi DIPA dan penjelasan perubahan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Kepulauan Riau

Pada Awal tahun 2021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau yang terdiri dari 4 (tiga) satker mendapatkan pagu Anggaran sebesar Rp. 435.857.895.000,- dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan. Perubahan terjadi disebabkan adanya Rekapitulasi Penghematan Belanja dan pemotongan (refocusing) realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19 serta pemenuhan kebutuhan terhadap penanganan yang berkelanjutan sehingga menyebabkan perubahan pagu anggaran menjadi Rp. 470.390.686.000,- ditahun 2021. Berikut disampaikan kronologis perubahan pagu pnggaran tahun 2021 di wilayah kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau.

Tabel 3.3.1 Alokasi DIPA

No	Kode	Satuan Kerja	PAGU (Rp.000)	
			Awal	Revisi
1	329039	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	12.868.321	19.919.868
2	420125	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU	26.304.529	26.644.313
3	498585	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	372.862.690	390.424.812
4	902083	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	23.822.355	33.401.693
<b>Total</b>			<b>435.857.895</b>	<b>470.390.686</b>

Tabel 3.3.1 Perubahan Alokasi DI PA BPJN Kepulauan Riau dan Penjelasannya

No	Balai/Satker	DIPA	Tanggal DIPA	Alokasi Anggaran (Rp)	Kode DS	Pengesahan Revisi	Keterangan
1.	Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Awal	23 November 2020	26.304.529.000	0850-9302-2812-5249	DJA	DIPA Awal.
		01	17 Februari 2021	25.340.293.000	8451-2976-9403-8233	DJA	Rekapitulasi Penghematan Belanja berdasarkan Surat Dirjen Bina Marga nomor PR. 0303-Db/152 tanggal 03 Februari 2021 hal Penghematan Belanja Direktorat Jenderal Bina Marga
		02	15 April 2021	25.340.293.000	8451-2976-9403-8233	Kanwil DJPB KEPRI	1. Revisi POK / Pemutakhiran Data 2. Revisi Penyesuaian Halaman III DIPA
		03	30 Juni 2021	26.157.292.000	6318-9039-8369-2360	DJA	Penghematan Belanja Pegawai di Lingkungan BPJN Kepulauan Riau berdasarkan Nota Dinas Sesditjen Bina Marga nomor 53/ND/B5/2021 tanggal 25 Mei 2021 Hal Exercise Penghematan Belanja Pegawai Direktorat Jenderal Bina Marga
		04	27 Agustus 2021	25.239.997.000	3546-1014-0445-6093	DJA	Surat Dirjen Bina Marga Perihal Revisi DIPA Direktorat Jenderal Bina Marga Dalam Rangka Refocusing Belanja Tahap IV dan Tindaklanjutan Midterm Review
		05	04 November 2021	26.644.313.000	2311-7860-8650-6189	DJA	Surat Dirjen Bina Marga Perihal Optimalisasi Anggaran Sumber Dana Rupiah Murni TA. 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga
		06	02 Desember 2021	26.644.313.000	2311-7860-8650-6189	Kanwil DJPB KEPRI	1. Revisi POK / Pemutakhiran Data 2. Revisi Penyesuaian Halaman III DIPA
2.	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau	Awal	23 November 2020	372.862.690.000	3719-0864-3639-9592	DJA	DIPA Awal.
		01	17 Februari 2021	358.393.606.000	9889-1702-4157-6760	DJA	1. Revisi <i>refocusing</i> realokasi anggaran dana Sisa Lelang 2. Perubahan Nama KPA 3. Ralat/penyesuaian Volume target penanganan pada PPK
		02	15 April 2021	358.393.606.000	9889-1702-4157-6760	Kanwil DJPB KEPRI	1. Revisi POK / Pemutakhiran Data 2. Revisi Penyesuaian Halaman III DIPA

		03	30 Juni 2021	360,967,749,000	1362-1200-6020-5587	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merupakan Alokasi Anggaran dari BA BUN (BA 999.08) dalam rangka Penanganan Longsoran senilai Rp. 2.574.143</li> <li>2. Perubahan Akun CPHMA semula 523134 (Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan) menjadi 523131 (Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan)</li> <li>3. Revisi Layanan Perkantoran</li> <li>4. Pergeseran Antar Keluaran Padat Karya PPK 1.3</li> <li>5. Pergeseran Antar Keluaran Padat Karya PPK 1.4</li> </ol>
		04	16 Juli 2021	381.253.048.000	8129-3054-5328-8820	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Alokasi Anggaran BA BUN (BA.999.08) Paket Padat Karya senilai Rp.20.285.299.000</li> <li>2. Revisi Halaman III DIPA</li> <li>3. Pergeseran alokasi anggaran antar subkomponen PPK 1.1 dan PPK 1.3</li> <li>4. Pergeseran alokasi Layanan Perkantoran</li> </ol>
		05	22 Juli 2021	368,596,264,000	4101-3057-8996-9032	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Refocusing Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Fisabilillah CS (Refocusing) senilai 6.071.265.000</li> <li>2. Refocusing Dana Sisa Lelang Pembangunan Jalan Teluk Buton – Sei Tekan senilai Rp. 6.585.519.000</li> </ol>
		06	27 Agustus 2021	377.854.774.000	5005-2426-0300-0400	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Alokasi penanganan Marka Kuning masing-masing PPK Satker PJN 1 Kepri</li> <li>2. Pergeseran Layanan Umum PPK 1.3 dan PPK 1.4</li> <li>3. Alokasi Pengadaan alat perangkat pengolah data dan komunikasi</li> <li>4. Alokasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</li> <li>5. Alokasi Anggaran Pencegahan Penyebaran Covid- 19</li> <li>6. Alokasi Pemeliharaan Ruang Kantor</li> </ol>
		07	06 Oktober 2021	377.854.774.000	5005-2426-0300-0400	Kanwil DJPB KEPRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergeseran antar komponen dalam 1 paket Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban Sialang (Pulau Bintan) PPK 1.1 Provinsi Kepulauan Riau (PA)</li> <li>2. Pergeseran alokasi anggaran Layanan Perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Satker</li> <li>3. Ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA</li> </ol>

		08	04 November 2021	375.654.736.000	8668-9574-7881-4810	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Anggaran Sumber Dana Rupiah Murni TA. 2021 Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Klarik 5 , Paket Pekerjaan Tambahan Padat Karya Perbaikan Lereng PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau ,Paket Pekerjaan Tambahan Padat Karya Revitalisasi Drainase PPK 1.4 dan Rosin</li> <li>2. Pergeseran alokasi anggaran Layanan Perkantoran dan Layanan Umum Satker Induk</li> <li>3. Pergeseran Padat Karya Penanganan Marka Jalan dari Pulau Anambas ke Pulau Natuna</li> <li>4. Perubahan RO Padat Karya ke RO Padat Karya PEN</li> </ol>
		09	24 November 2021	390,424,812,000	9427-4167-2907-0508	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Paket SBSN Pembangunan Jalan Dan Jembatan Teluk Buton - Klarik Di Kab.Natuna</li> <li>2. Revisi POK Padat Karya Pemeliharaan Rutin PPK 1.3</li> </ol>
3.	Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Naasional Provinsi Kepulauan Riau	Awal	23 November 2020	23.822.355.000	6593-0713-6558-6876	DJA	DIPA Awal.
		1	17 Februari 2021	23.396.289.000	1640-2959-3466-0454	DJA	Alokasi Anggaran Berkurang Revisi <i>refocusing</i> Realokasi Anggaran dampak dari Pandemi Covid-19
		2	25 Maret 2021	23.396.289.000	1640-2959-3466-0454	Kanwil DJPB KEPRI	Alokasi Anggaran Tetap Balance Budget
		3	27 Agustus 2021	33.563.648.000	3015-5271-1686-0033	DJA	Alokasi Anggaran Bertambah Revisi <i>refocusing</i> Realokasi Anggaran
		4	04 November 2021	33.401.693.000	8294-0743-9825-9531	DJA	Alokasi Anggaran Berkurang Penghematan Anggaran
		5	19 November 2021	33.401.693.000	8294-0743-9825-9531	Kanwil DJPB KEPRI	Alokasi Anggaran Tetap Balance Budget
		6	30 November 2021	33.401.693.000	8294-0743-9825-9531	Kanwil DJPB KEPRI	Alokasi Anggaran tetap Balance Budget
4.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP)	Awal	23 November 2020	12.868.321.000	8280-8959-6735-6012	DJA	DIPA Awal.
		01	17 Februari 2021	12.006.016.000	6866-6696-3023-9085	DJA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan Sisa Lelang</li> <li>2. Revisi <i>refocusing</i> Realokasi Anggaran dampak dari Pandemi Covid-19</li> </ol>
		02	16 Juli 2021	17.595.717.000	2068-1516-7204-7438	DJA	Penambahan Program PEN secara Padat Karya

		03	27 Agustus 2021	19.920.581.000	2941-4612-0195-8474	DJA	Penambahan penuntasan Marka Kuning secara Padat Karya dan penambahan anggaran penanganan Pandemi Covid-19
		04	20 September 2021	19.920.581.000	2941-4612-0195-8474	Kanwil DJPB KEPRI	1. Revisi POK Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 2. Ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA
		05	11 Oktober 2021	19.920.581.000	2941-4612-0195-8474	Kanwil DJPB KEPRI	1. Revisi POK Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 2. Ralat rencana penarikan dana halaman III DIPA
		06	04 November 2021	19.919.868.000	0059-1331-4001-9878	DJA	1. Optimalisasi Anggaran TA.2021 2. Pemidahan Paket2 Padat Karya ke KRO-RO PEN Padat Karya

### 3.3.2 Komposisi pendanaan (RPM, PHLN, SBSN, dll) pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau

Untuk Komposisi pendanaan DIPA TA. 2021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau terbagi menjadi pendanaan RPM dan SBSN, sedangkan pendanaan PHLN di TA. 2021 tidak ada. Untuk Total Pagu DIPA Awal TA. 2021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau adalah sebesar Rp. 435.857.895.000,- dibagi menjadi Rp. 380.152.224.000 untuk pendanaan RPM (Rupiah Murni) dan Rp. 55.705.671.000 untuk pendanaan SBSN. Selanjutnya terdapat perubahan, revisi terhadap Pagu DIPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau menjadi Rp. 470.390.686.000, yang dibagi menjadi Rp. 399.914.939.000 untuk pendanaan RPM (Rupiah Murni) dan Rp. 70.475.747.000 untuk pendanaan SBSN.


Tabel 3.3.2 Komposisi pendanaan BPJN Kepulauan Riau PerSumber Dana TA. 2021

NO	KODE	SATUAN KERJA	AWAL				REVISI			
			PAGU (Rp.000)				PAGU (Rp.000)			
			RPM	SBSN	PHLN	TOTAL	RPM	SBSN	PHLN	TOTAL
1	329039	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	12.868.321	-	-	12.868.321	19.919.868	-	-	19.919.868
2	420125	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU	26.304.529	-	-	26.304.529	26.644.313	-	-	26.644.313
3	498585	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	317.157.019	55.705.671	-	372.862.690	319.949.065	70.475.747	-	390.424.812
4	902083	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	23.822.355	-	-	23.822.355	33.401.693	-	-	33.401.693
		<b>TOTAL</b>	<b>380.152.224</b>	<b>55.705.671</b>	<b>-</b>	<b>435.857.895</b>	<b>399.914.939</b>	<b>70.475.747</b>	<b>-</b>	<b>470.390.686</b>

Isu Terkait Anggaran adanya perubahan kebijakan yang terkait dengan keuangan dan anggaran yang Rekapitulasi Penghematan Belanja, pemotongan (refocusing) realokasi anggaran dampak dari pandemi Covid-19 serta pemenuhan kebutuhan terhadap penanganan yang berkelanjutan.

Adapun pemotongan (Refocusing) realokasi penghematan anggaran dampak dari pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa arahan Dirjen Bina Marga dimana tertuang dari Surat Dirjen Bina Marga nomor PR. 0303-Db/152 tanggal 03 Februari 2021 hal Penghematan Belanja Direktorat Jenderal Bina Marga, Surat Dirjen Bina Marga Perihal Revisi DIPA Direktorat Jenderal Bina Marga Dalam Rangka Refocusing Belanja Tahap IV dan Tindaklanjut Midterm Review dan Surat Dirjen Bina Marga Perihal Optimalisasi Anggaran Sumber Dana Rupiah Murni TA. 2021 di Direktorat Jenderal Bina Marga. Terhadap kebijakan tersebut menyebabkan perubahan terhadap target penanganan dan relokasi anggaran tahun 2021 pada Perjanjian Kinerja disetiap Satker yang ada diwilayah Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau.





**BAB IV**

## BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau akan menguraikan mengenai (1) capaian kinerja organisasi yang merupakan informasi mengenai realisasi kinerja dalam bentuk bentuk realisasi fisik dan keuangan tahun anggaran 2021 terhadap perjanjian kinerja 2021 dan rencana penyerapan keuangan yang telah ditetapkan serta analisis keberhasilan dan kegagalan yang mempengaruhi capaian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau; (2) Perbandingan kinerja organisasi yang merupakan perbandingan kinerja tahun anggaran 2021 dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun anggaran 2018 dan 2019; (3) Realisasi anggaran yang merupakan analisis atas efisiensi sumber daya di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau.

Dengan demikian, maka akuntabilitas kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 yang diturunkan dari review rencana kinerja tahunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020 - 2024.

### 4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau saat ini sangat terkait dengan kemantapan jalan nasional dan aksesibilitas wilayah. Kegiatan preservasi jalan dan jembatan meningkatkan kemantapan jalan Nasional, sedangkan kegiatan pelebaran dan pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan aksesibilitas suatu wilayah.

Proses pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dari program dan sasaran pada penetapan kinerja tahun 2021 dilaksanakan dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator output dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau. Data realisasi kegiatan berasal dari realisasi DIPA pada akhir tahun kegiatan. Adapun capaian kinerja organisasi yang digolongkan dalam tiap output adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Sat.	Target
1.	Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Jalan Nasional	IKP 1 - Tingkat Akseibilitas Jalan Nasional (Persentase PKN, PKW, PKSN, dan simpul transportasi nasional yang telah diakses jalan nasional)	%	83,00
		IKP 2 - Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai rating terhadap indikator IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan)	-	2,69
		IKP 3 - Tingkat Rating Keselamatan Jalan Nasional nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi serta jumlah titik blackspot per populasi)	-	4,30

Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2021

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	Deviasi	KETERANGAN
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	83,00	83,00	0	
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	-	2,69	2,10	-0,59	
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	-	4,30	4,30	0	

Perhitungan terhadap capaian Tingkat Akseibilitas Jalan Nasional dapat terpenuhi sesuai dengan target 83% dimana semua indikator kinerja/output kinerja dapat direalisasikan 100%, sedangkan untuk Rating Kondisi Jalan Nasional dari target 2,69 yang dapat terpenuhi 2,09 dimana indikator kinerja/output yang terealisasi 128,71% untuk capaian kinerja di tahun 2021.

Kegiatan dengan indikator kinerja/output terhadap Rating Keselamatan Jalan Nasional termasuk dalam kegiatan di tahun 2021 tetapi pelaksanaan pada Rating Keselamatan jalan Nasional belum terealisasi keseluruhannya sehingga capaian yang terealisasi tetap atau 100.

Kemantapan Jalan Nasional BPJN Kepulauan Riau Tahun 2021

TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL (SK 2015)	Total Panjang Survey	Kondisi Semester 2 Tahun 2021			
		Baik	Sedang	R. Ringan	R. Berat
(Km)	SM. 1&2 2020				
586,87	578,991	333.88 Km	224.50 Km	7.33 Km	6.55 Km
		563.37 Km		13.87 Km	
		97,60 %		2,40 %	
		MANTAP		TIDAK MANTAP	

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Realisasi Fisik Tahun Anggaran 2021

Sasaran Program / Output	Satuan	Capaian Kinerja Fisik					Keterangan	
		Target		Realisasi	Capaian			
		Awal (PK Revisi)	Dipa Revisi Akhir		Thd Awal	Thd Akhir		
<b>Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun</b>								
CBC 008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km	9,61	10,58	8,45	87,92	79,86	
	a Pembangunan Jalan	Km	9,61	10,58	8,45	87,92	79,86	
<b>Panjang Jembatan dibangun</b>								
CBF 007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	M	83,49	95,47	83,49	100,00	87,45	
	a Pembangunan Jembatan	M	83,49	95,47	83,49	100,00	87,45	
	b Pembangunan Jembatan Gantung	Unit	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
<b>Panjang jalan yang terpelihara</b>								
CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	121,22	121,22	121,22	100,00	100,00	
CDC 016	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	Km	456,75	456,75	456,75	100,00	100,00	
<b>Panjang jalan yang ditingkatkan</b>								
CBC 002	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	4,80	4,80	4,80	100,00	100,00	
CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	13,60	13,60	13,60	100,00	100,00	
	a Rehabilitasi / Rekonstruksi Daerah Bencana	Km	0,60	0,60	0,60	100,00	100,00	
	b Pemeliharaan Preventif	Km	0,45	0,45	0,45	100,00	100,00	
	c Rehabilitasi Minor Jalan	Km	3,90	3,90	3,90	100,00	100,00	
	d Rehabilitasi Mayor Jalan	Km	3,27	3,27	3,27	100,00	100,00	
	e Rekonstruksi Jalan	Km	4,46	4,46	4,46	100,00	100,00	
	f Penanganan Longsoran	Km	0,92	0,92	0,92	100,00	100,00	
	g Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	M	6.530,00	6.530,00	6.530,00	100,00	100,00	
CDC 021	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	Km	1,25	1,25	1,25	100,00	100,00	
	a Penanganan Longsoran	Km	1,25	1,25	1,25	100,00	100,00	
CDC 004	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	0,05	0,05	0,05	100,00	100,00	
	- Penanganan Drainase	Km	0,05	0,05	0,05	100,00	100,00	
CDC 020	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km	281,52	281,52	281,52	100,00	100,00	
	- Penanganan Drainase	Km	46,97	46,97	46,97	100,00	100,00	
	- Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	231,91	231,91	231,91	100,00	100,00	
	- Penanganan Bahu Diperkeras	Km	2,64	2,64	2,64	100,00	100,00	
CDC 029	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	Km	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
<b>Panjang jembatan yang dipelihara</b>								
CDF 014	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	M	4.704,10	4.704,10	4.704,10	100,00	100,00	
<b>Panjang jembatan yang ditingkatkan</b>								
CDF 002	Preservasi Jembatan	M	3.272,60	3.272,70	3.272,70	100,00	100,00	
	a Rehabilitasi Jembatan	M	1.737,90	1.738,00	1.738,00	100,01	100,00	
	b Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	1.534,70	1.534,70	1.534,70	100,00	100,00	
<b>Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>								
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
EAD 002	Layanan Sarana Internal	Unit	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
EAE 003	Layanan Prasarana Internal	Unit	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
EAA 005	Layanan Perkantoran	Layanan	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	

#### 4.1.1 Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun

Pada tahun 2021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau memiliki pekerjaan pembangunan jalan yaitu Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) dimana pembangunan ini lanjutan dari tahun 2020, dan Pembangunan Jalan Teluk Buton - Sei Tekan.

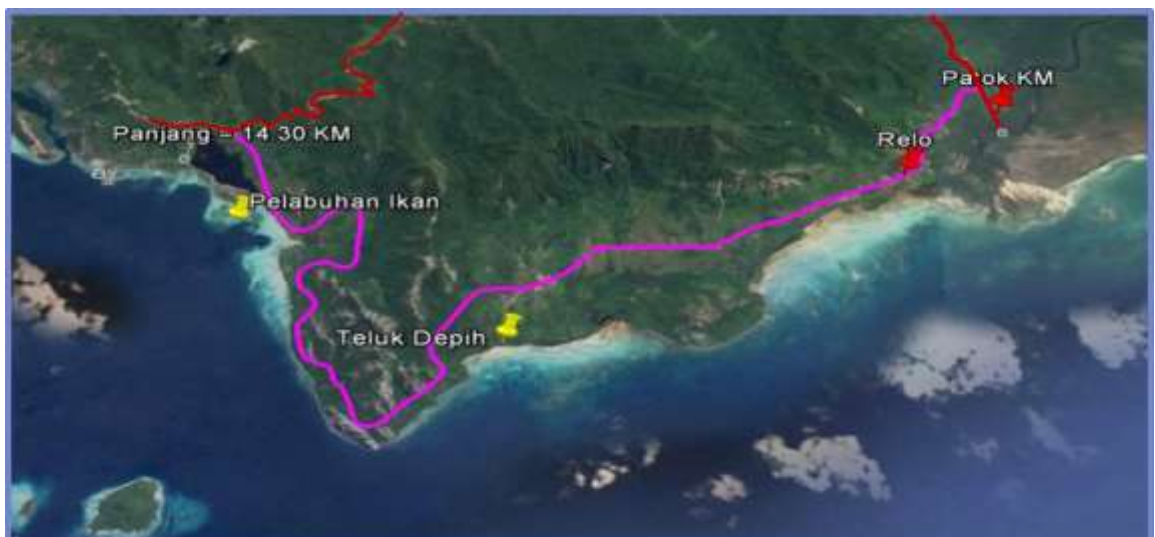
Tabel Capaian Kinerja Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL (PK REVISI)	DIPA REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
1.	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP)	KM	9,61	10,58	8,45	87,92	79,86
<b>SATKER PJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	KM	9,61	10,58	8,45	87,92	100

1. Pembangunan jalan yaitu Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)
  - a. Ringkasan Paket

Paket	: Pembangunan Jalan Selat Lampa – Teluk Depih – Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC)
Lokasi	: Kepulauan Riau – Natuna
Panjang Penanganan	: 7.10 km
Sumber Dana	: APBN
Nilai Pagu Th 2020	: Rp 18.141.720.000,00
Nilai Pagu Th 2021	: Rp 41.770.923.000,00
Nilai Kontrak	: Rp 68.156.714.000,00
Tanggal Kontrak	: 08 September 2020
Nomor Kontrak	: HK.0201/SP-HS/PJN-PPK1.4/IX/2020/07
Penyedia Jasa	: PT. Nusa Konstruksi Engineering, TBK
Konsultan Pengawas	: PT. Surya Marzq Konsultindo
Masa Pelaksanaan	: 365 Hari Kalender
Rencana PHO	: 01 Maret 2022
Rencana FHO	: 01 Maret 2023

- b. Peta Lokasi



- c. Dokumentasi Kegiatan



2. Pembangunan Jalan Teluk Buton - Sei Tekan

a. Ringkasan Paket

Paket	: Pembangunan Jalan Teluk Buton – Sei Tekan
Lokasi	: Kepulauan Riau – Natuna
Panjang Penanganan	: 4.90 Km
Sumber Dana	: APBN
Nilai Pagu	: Rp 43.494.543.000,00
Nilai Kontrak	: Rp 36.909.024.000,00
Nomor Kontrak	: HK.0201/SP-HS/PJN-PPK1.4/II/2021/03
Tanggal Kontrak	: 25 Februari 2021
Penyedia Jasa	: PT. Amanah Anak Negeri
Konsultan Pengawas	: PT. Surya Marzq Konsultindo Kso PT. Seecons
Masa Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
Rencana PHO	: 22 Oktober 2021
Rencana FHO	: 22 Oktober 2022

b. Peta Lokasi





c. Dokumentasi Kegiatan



**Manfaat:** Pembangunan Jalan tahun 2021 dilaksanakan Pembangunan Jalan yang bertujuan untuk membuka trase baru dan pembangunan jalan baru sehingga jalan tersebut dapat dilalui masyarakat, dimana pelaksanaannya dilaksanakan untuk pengalihan trase jalan yang sudah ada dan pembangunan jalan baru agar mampu mempersingkat jarak tempuh dan mengurangi kendala terhadap jalan yang sudah ada sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan prekonomian antar wilayah didaerah tersebut.

Sasaran Pembangunan Jalan dimana akan terbangunnya jalan lingkur pulau natuna, akses ke pusat pelayanan kawasan industri berbasis migas, wisata laut dan kawasan pertanian, akses ke rencana pembangunan dermaga samudra dan bandara internasional natuna, mendukung akses pertahanan (komi artileri TNI AD), mendukung Rencana Pembangunan Pelabuhan Utama Natuna / Pelabuhan Internasional di Teluk Buton (Cargo, Logistik Industri Migas).

**Kendala:** Pembangunan Jalan Teluk Buton Klarik dan Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Depih Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) dan Pembangunan Jalan Teluk Buton - Sei Tekan dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Menigkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal tercapainya pelaksanaan program penyelenggaran jalan untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Depih Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) dan Pembangunan Jalan Teluk Buton - Sei Tekan terselesaikan 100% sesuai dengan target revisi ahir dan pembangunannya berlanjut ke tahun 2022 karena pekerjaan tersebut Multy Years.

#### 4.1.2 Panjang Jembatan dibangun

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan di daerah Kabupaten Natuna, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan pada Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs, Pembangunan Jembatan Klarik 5 dan Pembangunan Jembatan Gantung di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel Capaian Kinerja Panjang Jembatan dibangun

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL (PK REVISI)	DIPA REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
1.	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	M	83,49	95,47	83,49	100	87,45
<b>SATKER PJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Pembangunan Jembatan	M	83,49	83,49	83,49	100	100

#### 1. Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs

##### a. Ringkasan Paket

Paket	: Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs
Lokasi	: Kepulauan Riau – Natuna
Panjang Penanganan	: 82,00 m
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2021
Nilai Pagu th 2020	: Rp 8.064.500.000,00
Nilai Pagu th 2021	: Rp 26.498.565.000,00
Nilai Kontrak	: Rp 34.550.815.000,00
Tanggal Kontrak	: 10 Agustus 2020
Nomor Kontrak	: HK.0201/SP-HS/PJN-PPK1.4/VIII/2020/06
Penyedia Jasa	: PT. Nada Pratama
Konsultan Pengawas	: PT. Puridimensi
Masa Pelaksanaan	: 365 Hari Kalender
Rencana PHO	: 09 Agustus 2021
Rencana FHO	: 31 Desember 2022

##### b. Peta Lokasi



##### c. Dokumentasi Kegiatan





## 2. Pembagunan Jembatan Klarik 5

### a. Ringkasan Paket

Paket	: Pembangunan Jembatan Klarik 5
Lokasi	: Kepulauan Riau – Natuna
Panjang Penanganan	: 20.60 m
Sumber Dana	: APBN
Nilai Pagu	: Rp 8.660.500.000,00
Nilai Kontrak	: Rp 6.800.000.000,00
Nomor Kontrak	: HK.0201/SP-HS/PJN-PPK1.4/II/2021/02
Tanggal Kontrak	: 19 Februari 2021
Penyedia Jasa	: PT. Rajawali Sakti Prima
Konsultan Pengawas	: PT. Surya Marzq Konsultindo Kso PT. Seecons
Masa Pelaksanaan	: 300 Hari Kalender
Rencana PHO	: 15 Desember 2021
Rencana FHO	: 15 Desember 2022

### b. Peta Lokasi



c. Dokumentasi Kegiatan



3. Pembangunan Jembatan Gantung di Provinsi Kepulauan

a. Ringkasan Paket

Paket	: Pembangunan Jembatan Gantung di Provinsi Kepulauan Riau
Lokasi	: Kepulauan Riau – Natuna
Panjang Penanganan	: 84 m
Sumber Dana	: APBN
Nilai Pagu	: Rp 4.000.000.000,00
Nilai Kontrak	: Rp 3.030.709.000,00
Nomor Kontrak	: HK.0201/SP-HS/PJN-PPK1.4/VI/2021/04
Tanggal Kontrak	: 16 Juni 2021
Penyedia Jasa	: PT. Bangun Natuna Pratama
Konsultan Pengawas	: PT. Surya Marzq Konsultindo Kso PT. Seecons
Masa Pelaksanaan	: 199 Hari Kalender
Rencana PHO	: 31 Desember 2021
Rencana FHO	: 30 Desember 2022

b. Dokumentasi Kegiatan



**Manfaat:** Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs, Pembagunan Jembatan Klarik 5 dan Pembangunan Jembatan Gantung di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dilaksanakan sebagai

penghubung antar wilayah agar bisa dilalui untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat serta distribusi barang dan jasa. Selain dari sebagai sarana penghubung juga dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Pelabuhan Utama Natuna / Pelabuhan Internasional di Teluk Buton (Cargo, Logistik Industri Migas) dan mendukung akses pertahanan keamanan nasional sebagai akses lalu lintas alutsista, maka diusulkan Program Penanganan 15 (lima belas) Jembatan di ruas jalan Teluk Buton – Klarik

**Kendala:** Penanganan Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs, Pembangunan Jembatan Klarik 5 dan Pembangunan Jembatan Gantung di Provinsi Kepulauan Riau dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal tercapainya pelaksanaan program penyelenggaraan jalan untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Pembangunan Jembatan Klarik 2 Cs, Pembangunan Jembatan Klarik 5 dan Pembangunan Jembatan Gantung di Provinsi Kepulauan Riau 100% sesuai dengan target revisi ahir.

#### 4.1.3 Panjang jalan yang terpelihara

Kegiatan pemeliharaan rutin jalan ini merupakan kegiatan pemeliharaan pada ruas jalan dengan kondisi sedang, sangat diperlukan untuk mempertahankan kemantapan dan kondisi jalan agar tetap mampu melayani pengguna jalan dengan aman dan nyaman sesuai dengan umur rencana. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan level IRI (ketidakrataan jalan) sehingga tidak terjadi penurunan drastis setiap tahun. Kegiatan pemeliharaan rutin yang telah dilakukan antara lain : pekerjaan pengendalian tanaman, pekerjaan pembersihan drainase, pengecatan kerb dan median jalan, pengecatan jembatan, Pemeliharaan Rutin Kondisi meliputi pengisian celah/retak permukaan (sealing), penambalan lubang, dan grading operation/reshaping atau pembentukan kembali permukaan untuk perkerasan jalan tanpa penutup, serta Penunjang/Holding meliputi pengaspalan sebagian badan jalan jika pelaksanaan patching tidak efisien dilakukan sehingga mampu menunda penanganan sesuai yang dibutuhkan (rekonstruksi), dimana manfaat pemeliharaan rutin mempertahankan kemantapan jalan, mempertahankan kinerja fungsional dan struktural jalan Nasional dan penyerapan tenaga kerja pekerjaan padat karya di sekitar lokasi pekerjaan.

Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dilaksanakan dengan padat karya swakelola dan padat karya kontraktual. Kegiatan ini melibatkan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur, dan miskin) dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dibayarkan secara tunai mingguan. Tujuan dari padat karya untuk mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian selama masa Pandemi COVID-19 (Program Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN). Pada prinsipnya menggunakan peralatan sederhana, banyak menyerap tenaga kerja, dilaksanakan secara berkelompok dan upah tidak kurang dari UMR atau UMP/UMK tergantung lokasi kegiatan, dibayarkan langsung secara mingguan.



Tabel Capaian Kinerja Panjang jalan yang terpelihara

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL (PK REVISI)	DIPA REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
1.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	121,22	121,22	121,22	100	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Penunjang/Holding	KM	101,47	101,47	101,47	100	100
<b>SKPD-TP PROV. KEPRI</b>							
	Penunjang/Holding	KM	19,75	19,75	19,75	100	100
2.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	KM	456,75	456,75	456,75	-	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Pemeliharaan Rutin	KM	386,47	386,47	386,47	100	100
<b>SKPD-TP PROV. KEPRI</b>							
	Pemeliharaan Rutin	KM	70,28	70,28	70,28	100	100

Uraian Pekerjaan Panjang jalan yang terpelihara: Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan dan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)

No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
1	PADAT KARYA  Padat Karya Rutin Jalan Preservasi Jalan Nongsa – Batu Ampar - Tembesi - Galang	a	Pagu dana	:	Rp. 5.940.080.000	124,48 Km	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
2	PADAT KARYA  Padat Karya Rutin Jalan Preservasi Jalan Nongsa – Batu Ampar - Tembesi - Galang	a	Pagu dana	:	Rp. 4.556.887.000	35,04 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 4.556.887.000			
		c	Kontraktor	:	PT. Putra Cipta Kreasi Pratama			
		d	Konsultan	:	PT. Arci Pratama Konsultan KSO PT. Multi Forma Riau Konsultan			
		e	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	360 Hari Kalender			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
3	PADAT KARYA  Padat Karya Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang (Pulau Karimun)	a	Pagu dana	:	Rp. 787.500.000	26,25 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 787.500.000			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
4	PADAT KARYA  Padat Karya Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sugai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	a	Pagu dana	:	Rp. 990.600.000	33,02 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 990.600.000			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
5	PADAT KARYA  Padat Karya Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro (Pulau Singkep)	a	Pagu dana	:	Rp. 514.500.000	17,15 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 514.500.000			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
6	PADAT KARYA  Padat Karya Rutin Jalan Preservasi Jalan Tarempa - Rintis (Pulau Siantan)	a	Pagu dana	:	Rp. 285.000.000	9,50 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	365 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
7	PADAT KARYA  Padat Karya Rutin Jalan Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro (Pulau Matak)	a	Pagu dana	:	Rp. 642.900.000	21,43 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	365 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:





No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
8	PADAT KARYA Padat Karya Rutin Jalan Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	a	Pagu dana	:	Rp. 2.492.400.000	83,08 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	365 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
9	PADAT KARYA Padat Karya Pemeliharaan Rutin Jalan Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	a	Pagu dana	:	Rp. 2.504.600.000	71,56 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:





**Manfaat:** Pemeliharaan Rutin Jalan dilaksanakan setiap tahun yang berfungsi mempertahankan kemantapan dan kondisi jalan serta mempertahankan level IRI (ketidakrataan jalan) sehingga tidak terjadi penurunan drastis setiap tahun agar tetap mampu melayani pengguna jalan dengan aman dan nyaman sesuai dengan umur rencana.

**Kendala:** Pemeliharaan Rutin Jalan dalam masa pelaksanaan tidak ada kendala sampai dengan akhir tahun 2021.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk tahun berikutnya

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Jalan 100% sesuai dengan target revisi akhir.

#### 4.1.4 Panjang jalan yang ditingkatkan

Panjang jalan yang ditingkatkan terdapat kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur, Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dan Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Drainase).

Pelebaran Jalan Menambah Lajur merupakan kegiatan melebarkan badan jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan dalam menampung volume lalu lintas di atasnya dan menuju standar sesuai dengan spesifikasi. Manfaat kegiatan tersebut antara lain memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta distribusi barang dan jasa. Pada tahun 2021 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau melaksanakan pekerjaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tanjung Berikat dan Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basechamp Batu Aji)

Kegiatan Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dilakukan secara periodik yang bertujuan menjaga kondisi jalan tetap dalam kondisi yang baik setelah pembangunan sehingga mampu mencapai umur yang direncanakan. Kegiatan Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan dilakukan pada ruas jalan yang dalam kondisi rusak ringan dan ruas jalan yang semula ditangani melalui pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan, yang berakibat menurunnya kondisi menjadi kondisi rusak ringan. Output ini terdiri dari beberapa komponen yaitu : penanganan longsor, rehabilitasi/rekonstruksi daerah bencana, rehabilitasi minor dan rehabilitasi mayor.

Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan kegiatan Program Padat Karya. Kegiatan Padat Karya dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Tabel Capaian Kinerja Panjang jalan yang ditingkatkan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL (PK REVISI)	DIPA REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
1.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	KM	4,80	4,80	4,80	100	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	KM	4,80	4,80	4,80	100	100
2.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	KM	13,60	13,60	13,60	100	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	KM	0,40	0,40	0,40	100	100
	Pemeliharaan Preventif	KM	0,45	0,45	0,45	100	100
	Rehabilitasi Minor Jalan	KM	3,60	3,60	3,60	100	100
	Rehabilitasi Mayor Jalan	KM	3,27	3,27	3,27	100	100
	Rekonstruksi Jalan	KM	4,46	4,46	4,46	100	100
	Penanganan Longsoran	KM	0,92	0,92	0,92	100	100
	Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	M	6.530	6.530	6.530	100	100
<b>SKPD-TP PROV. KEPRI</b>							
	Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana	KM	0,20	0,20	0,20	100	100
	Rehabilitasi Minor Jalan	KM	0,30	0,30	0,30	100	100
3.	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	KM	1,25	1,25	1,25	100	100
<b>SKPD-TP PROV. KEPRI</b>							
	Penanganan Longsoran	KM	1,25	1,25	1,25	100	100,00
4.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Drainase)	KM	0,05	0,05	0,05	100	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Penanganan Drainase	KM	0,05	0,05	0,05	100	100
5.	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	KM	281,52	281,52	281,52	100	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Penanganan Drainase	KM	28,85	28,85	28,85	100	100
	Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	KM	166,62	166,62	166,62	100	100
	Penanganan Bahu Diperkeras	KM	2,64	2,64	2,64	100	100
<b>SKPD-TP PROV. KEPRI</b>							
	Penanganan Drainase	KM	18,12	18,12	18,12	100	100
	Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	KM	65,29	65,29	65,29	100	100
6.	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	KM	3,00	3,00	3,00	100	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Penanganan Longsoran	KM	3,00	3,00	3,00	100	100

Uraian Pekerjaan Panjang jalan yang ditingkatkan:

1. Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan

- Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tanjung Berikat

a. Ringkasan Paket

Paket	: Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Tembesi – Tanjung Berikat
Lokasi	: Kepulauan Riau – Batam
Panjang penanganan	: 2 km
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2021
Nilai Pagu	: Rp 22.080.361.000,00
Nilai Kontrak	: Rp 20.198.954.100,00
Tanggal Kontrak	: 08 Februari 2021
Nomor Kontrak	: HK.02.01/SP-HS/PJN-PPK1.2/II/2021/03
Penyedia Jasa	: PT. Pualu Bulan Indo Perkasa
Konsultan Pengawas	: PT. Ottoman Arch
Masa Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
Rencana PHO	: 05 Oktober 2021
Rencana FHO	: 04 Oktober 2022

b. Peta Lokasi



c. Dokumentasi Kegiatan



- Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basechamp Batu Aji)

a. Ringkasan Paket

Paket	: Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan – Sp. Basechamp Batu Aji)
Lokasi	: Kepulauan Riau – Batam
Panjang penanganan	: 2.8 km
Sumber Dana	: APBN Tahun Anggaran 2021
Nilai Pagu	: Rp 28.473.412.000,00
Nilai Kontrak	: Rp 26.198.510.600,00
Tanggal Kontrak	: 18 Februari 2021
Nomor Kontrak	: HK.02.01/SP-HS/PJN-PPK1.2/II/2021/04
Penyedia Jasa	: PT. Krisna Jaya
Konsultan Pengawas	: PT. Ottoman Arch
Masa Pelaksanaan	: 240 Hari Kalender
Rencana PHO	: 15 Oktober 2021
Rencana FHO	: 15 Oktober 2022

b. Peta Lokasi



c. Dokumentasi Kegiatan





**Manfaat:** Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada tahun 2020 dilaksanakan melebarkan badan jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan dalam menampung volume lalu lintas di atasnya dan menuju standar sesuai dengan spesifikasi yang bermanfaat antara lain memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta distribusi barang dan jasa.

**Kendala:** Pelaksanaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada tahun 2021 tidak ada kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam hal tercapainya pelaksanaan program penyelenggaraan jalan untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Pelebaran Jalan Menambah Lajur pada tahun 2021 100% sesuai dengan target revisi ahir.

## 2. Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

### a. Ringkasan Paket

13 JAN 2021

**1 PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DABO – KOTE – PEL. RORO (PULAU SINGKEP)**

Rp. 4.567.526.000,00



- Kontraktor Pelaksana : PT. JAYA SAKTI PERMAI
- Konsultan Pengawas : PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN KSO PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN
- Nomor Kontrak : HK.0201/SP-H5/Bb24-PJN1/PPK1.3/I/2021/01 15 JANUARI 2021
- Nomor Adendum : HK.0201/ADD-02/Bb24-PJN1/PPK1.3/I/2021/01 23 APRIL 2021
- Masa Pelaksanaan : 351 HK (15 Januari – 31 Desember 2021)
- Rencana PHO : 31 Desember 2021
- Rencana FHO : 31 Desember 2022
- Nilai Kontrak : Rp. 4.567.526.000,00
- Nilai Pagu : Rp. 5.025.820.000,00
- Sisa Pagu : Rp. 457.294.000,00

NO	URAIAN	PANJANG	NILAI KONTRAK
1	Penunjangan/Holding	9,84 km	1.172.880.000,00
2	Penanganan Longsor (Abrasi)	0,20 km	1.859.130.000,00
3	Rehabilitasi Jembatan	14,2 m	443.452.000,00
4	Pemeliharaan Berkala Jembatan	73,0 m	1.092.064.000,00
		10,04 km	4.567.526.000,00



18 JAN 2021

**2 PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DAIK – T.J. BUTON – SUNGAI BESAR – PANCUR (PULAU LINGGA)**

Rp. 13.878.792.000,00



- Kontraktor Pelaksana : PT. MIRA
- Konsultan Pengawas : PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN KSO PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN
- Nomor Kontrak : HK.0201/SP-H5/Bb24-PJN1/PPK1.3/I/2021/02 18 JANUARI 2021
- Nomor Adendum : HK.0201/ADD-02/Bb24-PJN1/PPK1.3/I/2021/02 23 APRIL 2021
- Masa Pelaksanaan : 348 HK (18 Januari – 31 Desember 2021)
- Rencana PHO : 31 Desember 2021
- Rencana FHO : 31 Desember 2022
- Nilai Kontrak : Rp. 13.878.792.000,00
- Nilai Pagu : Rp. 15.462.650.000,00
- Sisa Pagu : Rp. 1.583.858.000,00

NO	URAIAN	PANJANG	NILAI KONTRAK
1	Penunjangan/Holding	8,03 km	969.211.000,00
2	Rekonstruksi Jalan	0,59 km	4.228.838.000,00
3	Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	1,63 km	7.955.859.000,00
4	Rehabilitasi Jembatan	7,2 m	183.545.000,00
5	Pemeliharaan Berkala Jembatan	27,0 m	541.340.000,00
		10,25 km	13.878.792.000,00



b. Dokumentasi Kegiatan

**DOKUMENTASI PENANGANAN ABRASI PANTAI (PERSING DAN LANJUT)**



**DOKUMENTASI REKONSTRUKSI JALAN DI DAIK**



**DOKUMENTASI PENANGANAN GEOMETRIK DI DAIK**



**DOKUMENTASI PEKERJAAN ASPALTIC DI DABO**



a. Ringkasan Paket

1.	Nama Proyek	:	PRESERVASI JALAN NONGSA – BATU AMPAR – TEMBESI – GALANG
2.	No. Kontrak	:	HK.02.01/SP-HS/PJN-PPK1.2/I/2021/02
3.	Tanggal Kontrak	:	27 Januari 2021
4.	Tanggal PHO	:	22 Desember 2021
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 8.455.362.800,00 (termasuk PPN 10 %)
6.	Sumber Dana	:	APBN Murni Tahun 2021
7.	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender
8.	Masa Pemeliharaan	:	365 Hari Kalender
9.	Konsultan Supervisi	:	PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN KSO PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN
10.	Penyedia Jasa	:	PT. PUTRA CIPTA KREASI PRATAMA

b. Peta Lokasi



c. Dokumentasi Kegiatan

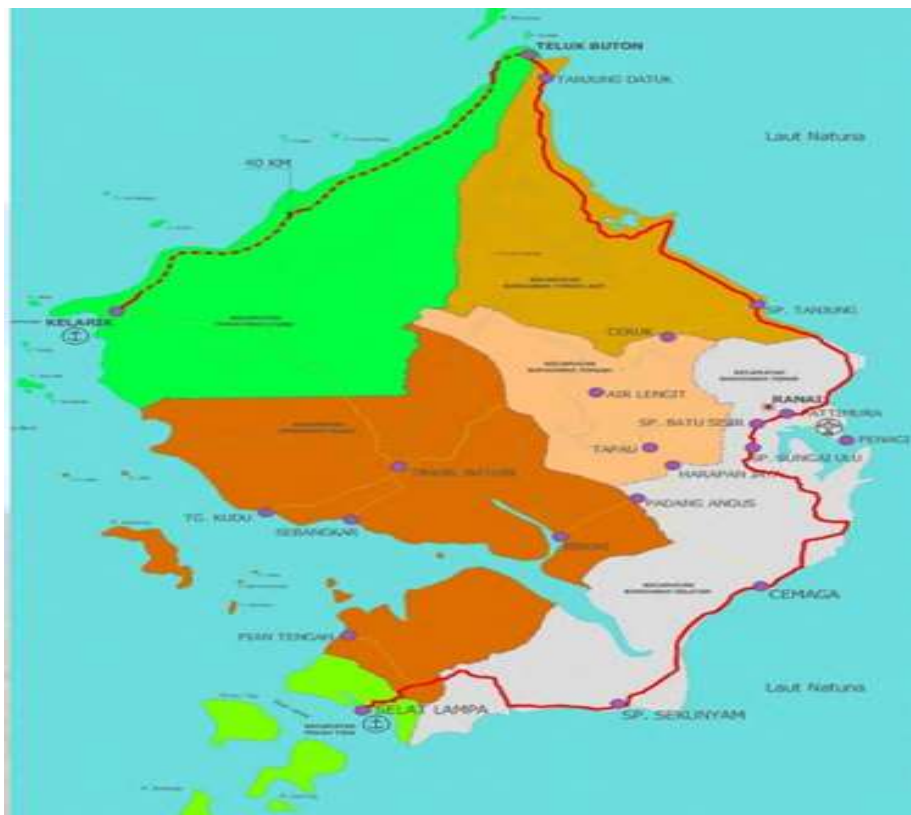




a. Ringkasan Paket

PAKET : PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN SELAT LAMPA – RANAI – TELUK BUTON (PULAU NATUNA)	
DATA KONTRAK	
<b>Nomor &amp; Tanggal Kontrak</b>	
• Nomor Kontrak	HK.0201/SP-HS/PJ N 1-PPKI.4/I/2021/01
• Tanggal Kontrak	15 Januari 2021
<b>Pagu Terkontrak</b>	
• Pemeliharaan Rutin Jalan – Holding (34,81 Km)	Rp. 4.002.614.000,-
• Preservasi Jembatan – Rehabilitasi & Berkala Jembatan (390,61 m)	Rp. 5.480.173.000,-
▶ Rehabilitasi Jembatan (106,40 m)	Rp. 2.236.009.000,-
5 Jembatan : Air Mulung 1, Batu Kapal, Kelanga, Tedung, Air Nabal	
▶ Pemeliharaan Berkala Jembatan (290,0 m)	Rp. 3.244.164.000,-
2 Jembatan : Singsang Bulan dan Semitan	
<b>Penyedia Jasa</b>	<b>PT. ASA JAVA AMALIA</b>
<b>Konsultan Pengawas</b>	<b>PT. EXXO GAMINDO PERKASA KSO CV. VISATAMA MULTI ENGINEERING CONSULTANT</b>
<b>Masa Pelaksanaan</b>	
• Pemeliharaan Rutin Jalan – Holding	351 Hari Kalender
• Rehabilitasi Jembatan	300 Hari Kalender
• Pemeliharaan Berkala Jembatan	300 Hari Kalender
<b>Rencana PHO</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>Rencana FHO</b>	<b>31 Desember 2022</b>

b. Peta Lokasi





c. Dokumentasi Kegiatan



3. Penanganan Drainase, Trotoar dan Fasilitas Keselamatan Jalan

No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
1	<b>PADAT KARYA</b> Padat Karya Penanganan Drainase Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi – Galang (PPK 1.2)	a	Pagu dana	:	Rp. 2.567.883.000	2,00 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
2	PADAT KARYA Padat Karya Penanganan Drainase (PPK 1.2)	a	Pagu dana	:	Rp. 3.000.000.000	5,80 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 3.000.000.000			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket				Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan
						km/m		
3	PADAT KARYA Padat Karya Penanganan Bahu Diperkeras (PPK 1.2)	a	Pagu dana	:	Rp. 500.648.348	1,597 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 500.648.348			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	150 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
4	PADAT KARYA Tambahkan Padat Karya Revitalisasi Drainase PPK1.3 Provinsi Kepulauan Riau	a	Pagu dana	:	Rp. 3.988.660.000	3,43 KM	93,40 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	240 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
5	PADAT KARYA Tambahkan Padat Karya Perbaikan Lereng PPK1.3 Provinsi Kepulauan Riau	a	Pagu dana	:	Rp. 1.500.000.000	0.50 KM	91,34 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	240 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
6	<b>PADAT KARYA</b> Padat Karya Pemeliharaan Rutin Jalan Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	a	Pagu dana	:	Rp. 1.282.633.335	71,56 KM	91,25 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
7	<b>PADAT KARYA</b> Penanganan Marka Jalan Nongsa – Batu Ampar – Tembesi - Galang	a	Pagu dana	:	Rp. 4.447.985	57,7 KM	51,76 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:





No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
8	PADAT KARYA Tambahkan Padat Karya Revitalisasi Drainase PPK 1.4	a	Pagu dana	:	Rp. 3.928.756.000	2,5 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	120 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
9	PADAT KARYA Tambahkan Padat Karya Bahu Diperkeras PPK 1.4	a	Pagu dana	:	Rp. 499.352.000	1,04 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
10	PADAT KARYA Tambahkan Padat Karya Perbaikan Lereng PPK 1.4	a	Pagu dana	:	Rp. 1.500.000.000	0,5 KM	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	120 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



#### 4.1.5 Panjang jembatan yang dipelihara

Preservasi Rutin Jembatan pada dasarnya menjaga jembatan dalam tetap dalam kondisi baik, pemeliharaan rutin jembatan antara lain mencakup pembersihan secara umum, membuang tumbuhan liar dan sampah, pembersihan dan melancarkan lubang saluran jembatan, pengecatan sederhana dan pemeliharaan permukaan lantai kendaraan.

Tabel Capaian Kinerja Panjang jembatan yang dipelihara

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK					
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		
			AWAL (PK REVISI)	DIPA REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
1.	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	KM	4.704,10	4.704,10	4.704,10	100	100	
<b>SATKER PJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>								
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	KM	4.704,10	4.704,10	4.704,10	100	100	

Uraian Pekerjaan Padat Karya Preservasi Rutin Jembatan:

No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
1	PADAT KARYA  Padat Karya Rutin Jembatan Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang	a	Pagu dana	:	Rp. 1.435.523.000	2.592,4 M	99,30 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
2	PADAT KARYA  Padat Karya Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang (Pulau Karimun)	a	Pagu dana	:	Rp. 9.337.000	6,00 M	100 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 9.337.000			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
3	PADAT KARYA  Padat Karya Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sugai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	a	Pagu dana	:	Rp. 180.090.000	173,70 M	91,01 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 180.090.000			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
4	PADAT KARYA  Padat Karya Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro (Pulau Singkep)	a	Pagu dana	:	Rp. 173.873.000	79,80 M	98,92 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	Rp. 173.873.000			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	330 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:





No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
5	PADAT KARYA  Padat Karya Rutin Jalan Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	a	Pagu dana	:	Rp. 842.800.000	602,00 M	98,01 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	365 Hari Kalender			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



No	Jenis Paket/ Nama Paket	Informasi Paket			Target	Progres (%)	Kendala/ Permasalahan	
					km/m			
6	PADAT KARYA  Padat Karya Rutin Jembatan Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	a	Pagu dana	:	Rp. 1.750.280.000	1.250 M	97,62 %	-
		b	Nilai Kontrak	:	-			
		c	Kontraktor	:	-			
		d	Konsultan	:	-			
		e	Masa Pelaksanaan	:	-			
		f	Masa Pemeliharaan	:	-			

Dokumentasi:



**Manfaat:** Preservasi Rutin Jembatan dilaksanakan setiap tahun yang berfungsi mempertahankan kemantapan dan kondisi Jembatan agar tetap mampu melayani pengguna Jembatan dengan aman dan nyaman dan dapat meningkatkan pertumbuhan prekonomian antar wilayah didaerah tersebut.

**Kendala:** Preservasi Rutin Jembatan dalam masa pelaksanaan tidak terdapat kendala sampai dengan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

**Solusi:** Meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk tahun berikutnya.

**Keberhasilan/Kegagalan:** Tercapainya pelaksanaan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 100% sesuai dengan target revisi ahir.

#### 4.1.6 Panjang jembatan yang ditingkatkan

Preservasi Jembatan atau pemeliharaan berkala jembatan adalah upaya menjaga jembatan tetap dalam kondisi yang baik. Kegiatan pemeliharaan berkala jembatan dilakukan secara periodik dimana struktur yang ada sudah mengalami penurunan tingkat pelayanan, sehingga diperlukan peningkatan kualitas layanan agar kemampuan daya dukung dapat memenuhi kualifikasi teknis jembatan sesuai umur rencana. Setelah pembangunan, kegiatan yang dilakukan antara lain : pengecatan ulang, penggantian lapis permukaan, pembersihan jembatan secara keseluruhan, pemeliharaan perletakan atau landasan, penggantian expansion joint dan lain sebagainya. Sedangkan perbaikan sederhana mencakup pada penggantian elemen/bagian yang kecil, perbaikan tiang dan sandaran, perkuatan bagian - bagian yang bergerak, perkuatan bagian yang struktural, perbaikan tebing yang longsor atau terkena erosi, perbaikan bangunan pengaman yang sederhana dan lain sebagainya.

Tabel Capaian Kinerja Panjang jembatan yang ditingkatkan

NO	OUTPUT	SAT	CAPAIAN KINERJA FISIK				
			TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	
			AWAL (PK REVISI)	DIPA REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR
1.	Preservasi Jembatan	KM	3.272,60	3.272,70	3.272,70	100	100
<b>SATKER PJJN WILAYAH I PROV. KEPRI</b>							
	Rehabilitasi Jembatan	KM	1.737,90	1.738,00	1.738,00	100	100
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	KM	1.534,70	1.534,70	1.534,70	100	100

Uraian Pekerjaan Panjang jembatan yang ditingkatkan:

##### a. Ringkasan Paket

1.	Nama Proyek	:	PRESERVASI JEMBATAN NONGSA – BATU AMPAR – TEMBESI – GALANG
2.	No. Kontrak	:	HK.02.01/SP-H5/PJN-PPK1.2/XII/2020/01
3.	Tanggal Kontrak	:	28 Desember 2020
4.	Tanggal PHO	:	4 Juni 2021
5.	Nilai Kontrak	:	Rp. 2.947.791.000,00 (termasuk PPN 10 %)
6.	Sumber Dana	:	APBN Murni Tahun 2021
7.	Masa Pelaksanaan	:	150 Hari Kalender
8.	Masa Pemeliharaan	:	365 Hari Kalender
9.	Konsultansi Supervisi	:	PT. ARCI PRATAMA KONSULTAN KSO PT. MULTI FORMA RIAU KONSULTAN
10.	Penyedia Jasa	:	PT. PUNCAK TIMUR PARAHYANGAN KSO PT. FAZHAR BANGUN DINAMIKA

b. Peta Lokasi



c. Dokumentasi Kegiatan

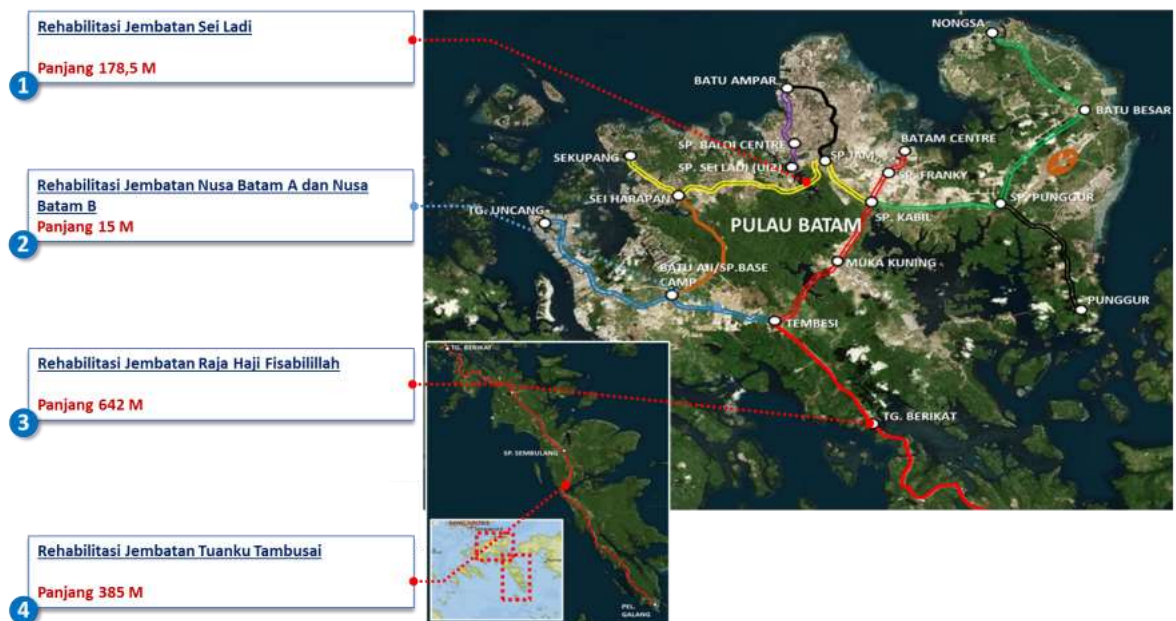




a. Ringkasan Paket

1. Nama Proyek	: Rehabilitasi Jembatan Rj. Haji Fisabilillah Cs (Refocusing)
2. Kontraktor	: PT. SARANA INDO TEKNIK
3. No. Kontrak	: HK.02.01/SP-HS/PJN-PPK1.2/IX/2020/03
4. Tanggal Kontrak	: 16 September 2020
5. Tanggal PHO	: 14 April 2021
6. Nilai Kontrak	: Rp. 23.708.247.000,00 (termasuk PPN 10 %) Tahun 2020 : 5.942.182.000,00 Tahun 2021 : 17.766.065.000,00
7. Sumber Dana	: APBN Murni Tahun 2020 - 2021
8. Masa Pelaksanaan	: 210 Hari Kalender
9. Masa Pemeliharaan	: 365 Hari Kalender
10. Konsultan Supervisi	: PT. Nuansa Galaxy KSO PT. Kriyasa Abdi Nusantara

b. Peta Lokasi



c. Dokumentasi Kegiatan



## 4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap realisasi yang dicapai sebagai perbaikan capaian kinerja setiap tahunnya. Hal ini akan menjadi bahan acuan untuk melaksanakan perencanaan kedepan dan strategi pencapaian target perencanaan tersebut. Adapun perbandingan rata-rata capaian kinerja output Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau selama 1 (satu) tahun terakhir pada tahun 2021. Tabel perbandingan ini akan diperoleh gambaran apakah target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam renstra bisa tercapai atau sebaliknya.

Tabel 4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

NO	OUTPUT		SAT	2020			2021		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
1		<b>Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun</b>		<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>100,00</b>	<b>10,58</b>	<b>8,45</b>	<b>79,86</b>
	CBC 008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP)	KM	3,75	3,75	100,00	10,58	8,45	100,00
2		<b>Panjang Jembatan dibangun</b>		<b>19,11</b>	<b>19,11</b>	<b>100,00</b>	<b>95,47</b>	<b>83,49</b>	<b>87,45</b>
	CBF 007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP)	KM	19,11	19,11	100,00	95,47	83,49	100,00
3		<b>Panjang jalan yang terpelihara</b>		<b>554,07</b>	<b>554,07</b>	<b>100,00</b>	<b>577,97</b>	<b>577,97</b>	<b>100,00</b>
	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	554,07	554,07	100,00	121,22	121,22	100,00
	CDC 016	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	KM	-	-	-	456,75	456,75	100,00
4		<b>Panjang jalan yang ditingkatkan</b>		<b>45,48</b>	<b>45,48</b>	<b>100,00</b>	<b>304,22</b>	<b>304,22</b>	<b>100,00</b>
	CBC 002	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	KM	1,00	1,00	100,00	4,80	4,80	100,00
	CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	KM	22,05	22,05	100,00	13,60	13,60	100,00
	CDC 021	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	KM	-	-	-	1,25	1,25	100,00
	CDC 004	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Drainase)	KM	22,43	22,43	100,00	0,05	0,05	100,00
	CDC 020	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	KM	-	-	-	281,52	281,52	100,00
	CDC 029	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	KM	-	-	-	3,00	3,00	100,00
5		<b>Panjang jembatan yang dipelihara</b>		<b>5.642,90</b>	<b>5.642,90</b>	<b>100,00</b>	<b>4.704,10</b>	<b>4.704,10</b>	<b>100,00</b>
	CDF 014	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	M	5.642,90	5.642,90	100,00	4.704,10	4.704,10	100,00
6		<b>Panjang jembatan yang ditingkatkan</b>		<b>475,20</b>	<b>475,20</b>	<b>100,00</b>	<b>3.272,70</b>	<b>3.272,70</b>	<b>100,00</b>
	CDF 002	Preservasi Jembatan	M	475,20	475,20	100,00	3.272,70	3.272,70	100,00

Pencapaian Kinerja selama satu tahun pertama pada renstra 2020-2024 bisa terealisasi sesuai antara terget yang ada pada renstra dan pelaksanaan yang terealisasi pada tahun 2021 rata-rata realisasi volume pada seluruh output dengan pencapaian 100% dapat dipenuhi. Pada pencapaian antara target awal dan terhadap target revisi realisasi pada seluruh output terpenuhinya dengan pencapaian 100%.

### 4.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2021 dengan rincian penyerapan anggaran berdasarkan Output disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Realisasi Anggaran BPJN Kepulauan Riau TA. 2021

Sasaran Program / Output		Satuan	Capaian Kinerja Fisik					Keterangan
			Target		Realisasi	Capaian		
			Awal (PK Revisi)	Dipa Revisi Akhir		Thd Awal	Thd Akhir	
<b>Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun</b>								
CBC 008	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	Km	92.614.875	101.810.795	75.230.231	81,23	73,89	
	a Pembangunan Jalan	Km	92.614.875	101.810.795	75.230.231	81,23	73,89	
<b>Panjang Jembatan dibangun</b>								
CBF 007	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	M	37.009.274	42.583.430	37.009.274	100,00	86,91	
	a Pembangunan Jembatan	M	33.978.565	39.552.721	33.978.565	100,00	85,91	
	b Pembangunan Jembatan Gantung	Unit	3.030.709	3.030.709	3.030.709	100,00	100,00	
<b>Panjang jalan yang terpelihara</b>								
CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	14.576.492	14.576.492	14.576.491	100,00	100,00	
CDC 016	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	Km	16.617.335	16.617.335	16.617.088	100,00	100,00	
<b>Panjang jalan yang ditingkatkan</b>								
CBC 002	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Km	46.397.465	46.397.465	46.397.465	100,00	100,00	
CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	79.395.173	79.395.173	79.075.992	99,60	99,60	
	a Rehabilitasi / Rekonstruksi Daerah Bencana	Km	5.001.168	5.001.168	5.001.168	100,00	100,00	
	b Pemeliharaan Preventif	Km	48.939	48.939	48.939	100,00	100,00	
	c Rehabilitasi Minor Jalan	Km	8.032.054	8.032.054	8.032.054	100,00	100,00	
	d Rehabilitasi Mayor Jalan	Km	12.468.130	12.468.130	12.468.129	100,00	100,00	
	e Rekonstruksi Jalan	Km	20.799.472	20.799.472	20.799.472	100,00	100,00	
	f Penanganan Longsoran	Km	21.318.658	21.318.658	20.999.479	98,50	98,50	
	g Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	M	11.726.752	11.726.752	11.726.751	100,00	100,00	
CDC 021	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	Km	2.932.096	2.932.096	2.932.096	100,00	100,00	
	a Penanganan Longsoran	Km	2.932.096	2.932.096	2.932.096	100,00	100,00	
CDC 004	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	2.724.774	2.724.774	2.724.774	100,00	100,00	
	-Penanganan Drainase	Km	2.724.774	2.724.774	2.724.774	100,00	100,00	
CDC 020	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	Km	45.070.363	45.070.363	45.064.837	99,99	99,99	
	-Penanganan Drainase	Km	31.686.398	31.686.398	31.683.146	99,99	99,99	
	-Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	12.383.965	12.383.965	12.381.709	99,98	99,98	
	-Penanganan Bahu Diperkeras	Km	1.000.000	1.000.000	999.982	100,00	100,00	
CDC 029	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	Km	4.567.883	4.567.883	4.567.872	100,00	100,00	
<b>Panjang jembatan yang dipelihara</b>								
CDF 014	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	M	4.391.903	4.391.903	4.391.890	100,00	100,00	
<b>Panjang jembatan yang ditingkatkan</b>								
CDF 002	Preservasi Jembatan	M	42.693.633	42.693.633	42.693.586	100,00	100,00	
	a Rehabilitasi Jembatan	M	25.717.227	25.717.227	25.717.225	100,00	100,00	
	b Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	16.976.406	16.976.406	16.976.361	100,00	100,00	
<b>Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>								
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	15.568.981	15.568.981	15.245.680	97,92	97,92	
CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	24.743.663	24.743.663	24.328.412	98,32	98,32	
EAD 002	Layanan Sarana Internal	Unit	3.262.005	3.262.005	3.261.742	99,99	99,99	
EAE 003	Layanan Prasarana Internal	Unit	1.680.480	1.680.480	1.677.661	99,83	99,83	
EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	8.143.260	8.143.260	8.131.656	99,86	99,86	
EAA 005	Layanan Perkantoran	Layanan	13.230.955	13.230.955	13.050.955	98,64	98,64	

#### 4.3.1 Analisis atas efisiensi sumber daya terhadap capaian kinerja dan anggaran

Berdasarkan Permen PUPR nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terbentuklah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau dengan wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau pada tahun 2021 didukung oleh unit satuan kerja yang terdiri atas 2 (dua) satuan kerja dengan jumlah PNS 39 orang dan Non PNS 111 orang.

Meskipun BPJN Kepulauan Riau baru terbentuk dengan jumlah sumber daya manusia yang ada dalam memenuhi target capaian kinerja pada Tahun 2021 berhasil dicapai dengan beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1. Memberdayakan SDM yang ada sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidangnya masing-masing,
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja SDM yang ada
3. Membuat komitmen dan integritas yang tinggi terhadap SDM yang ada di BPJN Kepulauan Riau dalam penyelesaian pekerjaan.

Pagu Anggaran yang ada di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 470.390.686.000. Adapun realisasi penyerapan anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 436.977.701.000 dengan persentase 92,90%. Dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada di BPJN Kepulauan Riau terhadap realisasi anggaran tahun 2021 telah dilakukan antara lain:

1. Upaya percepatan penyerapan anggaran untuk mencapai target hingga berhasil mencapai hasil yang baik pada akhir tahun 2021
2. Mempercepat proses Lelang Dini di tahun 2021
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Pengendalian terhadap progres keuangan
4. Membuat rencana penyerapan yang akan dievaluasi pencapaiannya setiap bulan
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi setiap SDM yang ada dalam organisasi dalam pencapaian target dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya.

Tabel 4.3.1 Realisasi Anggaran BPJN Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021

KODE	NAMA SATUAN KERJA	PAGU			REALISASI			PROGRES	
		(Rp Ribu)			(Rp Ribu)			Keu	Fis
		RPM	PHLN	TOTAL	RPM	PHLN	TOTAL		
04329039	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	19.919.868	0	19.919.868	19.917.019	0	19.917.019	99,99	100
04420125	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU	26.644.313	0	26.644.313	25.878.609	0	25.878.609	97,13	100
04498585	PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KEPULAUAN RIAU	390.424.812	0	390.424.812	357.925.531	0	357.925.531	91,68	92,7
04902083	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI KEP. RIAU	33.401.693	0	33.401.693	33.247.308	0	33.247.308	99,54	100
TOTAL		470.390.686	0	470.390.686	436.968.467	0	436.968.467	92,89	93,94

#### 4.4 Paket Strategis

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) yang dibiayai dari dana SBSN. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau di pada PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Kabupaten Natuna.

Gambaran umum Kabupaten Natuna merupakan Kabupaten paling utara di Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus kepulauan terluar Nusantara yang terkenal dengan penghasil minyak dan gas. Potensi yang dimiliki Kabupaten Natuna terdapat SDA Perikanan Laut Mencapai 1 Jt Ton/Tahun Dengan Kisaran Pemanfaatan 36%, Perkiraan potensi gas mencapai 222 Triliyun ft<sup>3</sup>, Perkiraan potensi recoverable gas 46 tof (46.000 bcf) atau setara dengan 8.383 milyar barel minyak dan Memiliki beberapa wisata seperti Pantai Tanjung, Alif Stone Park, Pulau Senua, Tanjung Datuk, Masjid Agung Natuna, Dll.

Latar belakang embangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, yang menyebutkan bahwa Pulau Natuna ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) yang meliputi lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan dan kawasan strategis pariwisata nasional.

Dalam Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2012, disebutkan bahwa daerah Selat Lampa – Sekunyam merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan fungsi kegiatan industri berbasis migas dan sektor wisata laut.

Informasi Paket Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (Pengalihan Trase) (UMYC) sebagai berikut :

<b>DATA KONTRAK</b>	
<b>Nomor &amp; Tanggal Kontrak</b>	
• Nomor Kontrak	HK.0201/SP-HS/PJN1-PPK 1.4/IX/2020/07
• Tanggal Kontrak	08 September 2020
<b>Pagu Terkontrak (7,10 Km)</b>	<b>Rp 68.156.714.000,-</b>
Nilai Kontrak Tahun 2020	Rp. 18.141.720.000,-
Nilai Kontrak Tahun 2021	Rp. 41.779.923.000,-
Nilai Kontrak Tahun 2022	Rp. 8.235.071.000,-
<b>Penyedia Jasa</b>	<b>PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINERING KSO PT. AMANAH ANAK NEGERI</b>
<b>Konsultan Supervisi</b>	<b>PT. SURYA MARZQ KONSULTINDO</b>
<b>Masa Pelaksanaan</b>	<b>540 Hari Kalender</b>
<b>Rencana PHO</b>	<b>01 Maret 2022</b>
<b>Rencana FHO</b>	<b>01 Maret 2023</b>





### KONDISI PEKERJAAN

Berdasarkan Survey Lapangan, terdapat perubahan trase jalan yang semula ditunjukkan pada garis merah, menjadi garis warna kuning, hal ini karena apabila mengikuti trase pada garis merah terdapat pekerjaan galian dan timbunan yang semakin banyak.

Kondisi di lapangan saat ini pekerjaan sedang focus untuk membuka jalan / menembus jalan sepanjang 200 meter (STA 08 + 800 s/d STA 08 + 600, medan berupa tebing dengan kemiringan 80°) agar jalan terhubung seluruhnya

Selain itu pekerjaan juga sedang berfokus untuk melakukan pelebaran badan jalan menuju standar dari STA 09 + 350 s/d STA 08 + 800

### KENDALA DAN TINDAK LANJUT

NO	URAIAN KENDALA	TINDAK LANJUT
<b>PEMBANGUNAN JALAN SELAT LAMPA - TELUK DEPIH - SP. SEKUNYAM (PENGALIHAN TRASE) (UMYC)</b>		
1.	Kondisi Cuaca ekstrim Di Pulau Natuna, mengakibatkan intensitas hujan meningkat, maka dari itu tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan blasting, akibat medan pekerjaan memiliki kemiringan 80° hal ini ditakutkan dapat mengakibatkan kecelakaan karena permukaan yang digunakan sebagai pijakan (batuan) licin.	Dilakukan percepatan salah satunya dengan penambahan jam kerja saat kondisi cuaca baik
2.	Pada lokasi STA 09 + 000 s/d STA 08 + 600 yang memiliki kemiringan 80° pekerjaan CRD kurang efektif karena alat CRD yang dapat beroperasi hanya 2 buah, 1 buah dari arah Selat Lampa dan 1 buah dari arah Teluk Depih.	Maka metode pelaksanaan sekarang difokuskan untuk membuka badan jalan dari STA 09 + 000 s/d STA 08 + 600 dengan lebar badan jalan 2 – 3 meter, setelah terbuka maka barulah dilakukan penambahan alat CRD yang beroperasi sesuai dengan rencana penagananan untuk melebarkan badan jalan menuju standart
3.	Dibutuhkan penambahan alat untuk melakukan penghamparan timbunan dari hasil galian di lokasi – lokasi yang gradanya blm mencapai nilai standar, selain itu akibat intensitas kerja dalam menggali batuan lunak terdapat alat excavator yang mengalami kerusakan, dan sedang diperbaiki	Dilakukan penambahan alat berupa motor grader, dan perbaikan alat excavator

**FOTO DOKUMENTASI**  
PEMBANGUNAN JALAN SELAT LAMPA - TELUK DEPIH - SP. SEKUNYAM (PENGALIHAN TRASE) (UMYC)



**Pelaksanaan Pekerjaan Galian Batu (Blasting) – Penggunaan CRD**



**Pelaksanaan Pekerjaan Galian Batu (Blasting) – Peledakan**



**Pelaksanaan Pekerjaan Galian Batu (Blasting) – Pembersihan Hasil Ledakan**



**Pelaksanaan Pekerjaan Beton F'c 20 Mpa – Box Culvert**



**FOTO DOKUMENTASI**  
**PEMBANGUNAN JALAN SELAT LAMPA - TELUK DEPIH - SP. SEKUNYAM (PENGALIHAN TRASE) (UMYC)**



**Pelaksanaan Pekerjaan Box Culvert Fc' 20 MPa**




**Pelaksanaan Pekerjaan Galian Batu (Blasting)**



**Pelaksanaan Pekerjaan Perapihan Badan Jalan**

#### **4.5 Paket Diresmikan dan Penghargaan**

Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepulauan Riau di tahun anggaran 2021 Sampai dengan Bulan Desember tidak terdapat paket kegiatan yang diresmikan atau mendapatkan penghargaan.



**BAB V**

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Permasalahan

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau sampai dengan bulan Desember tahun 2021 sudah menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dan dikarenakan BPJN Kepulauan Riau masih tebilang baru terbentuk akan terus mencari tahu tentang permasalahan yang sering terjadi dan berusaha untuk mengatasinya

### 5.2 Rekomendasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM yang ada dalam pencapaian target baik itu realisasi terhadap fisik maupun realisasi terhadap keuangan sehingga pencapaian yang diharapkan bias terpenuhi. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan mutu dalam hal pelaksanaan program penyelenggaraan jalan sehingga kemantapan jalan nasional bisa ditingkatkan dan dipertahankan kondisinya tetap baik dan diharapkan dengan kemantapan jalan nasional baik bisa meningkatkan prekonomian, pariwisata, penghubung antar wilayah dan akses menuju kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kepulauan Riau.





## **LAMPIRAN**

- PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2021
- PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2021
- Catatan Kaki (CAKI) LKIP



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAIZAL  
Jabatan : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA**

**HEDY RAHADIAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100 %	100,00 %
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	83,33 %	83,33 %
	<b>Rincian Output</b>		
	CBC 008 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	3,75 Km	9,61 Km
	a. Pembangunan Jalan	3,75 Km	9,61 Km
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	3,75 Km	9,61 Km
	CBF 007 Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	19,11 M	83,49 M
	a. Pembangunan Jembatan	19,11 M	83,49 M
	b. Pembangunan Jembatan Gantung	- M	1,00 Unit
	CBC 002 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1,00 Km	4,80 Km
	<b>IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100 %	100,00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2,46 %	2,54 %
	<b>Rincian Output</b>		
	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	554,07 Km	578,01 Km
	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	22,05 Km	14,07 Km
	a. Rehabilitasi / Rekonstruksi Daerah Bencana	- Km	0,60 Km
	b. Pemeliharaan Preventif	2,93 Km	0,45 Km
	c. Rehabilitasi Minor Jalan	12,99 Km	3,90 Km
	d. Rehabilitasi Mayor Jalan	1,55 Km	3,27 Km
	e. Rekonstruksi Jalan	4,13 Km	5,01 Km
	f. Penanganan Longsor	0,45 Km	0,84 Km
	g. Perbaiki Geometrik dan Perlengkapan Jalan	- M	6.530,00 M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020		Target 2021	
	CDC 004 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	22,43	Km	29,19	Km
	- Penanganan Drainase	22,43	Km	29,19	Km
	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	5.842,90	M	4.703,90	M
	CDF 002 Preservasi Jembatan	475,20	M	3.272,60	M
	a. Rehabilitasi Jembatan	475,20	M	1.737,90	M
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	-	M	1.534,70	M
	<b>IKSP 2 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>				
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100,00	%	100,00	%
Parameter	Rating Keselamatan Jalan Nasional	4,40	%	4,40	%
	<b>Rincian Output</b>				
CDC 004	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	-	Km	-	Km

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran

Rp 435.857.895

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Jakarta, 08 Januari 2021

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional  
Kepulauan Riau



RAIZAL



REVISI

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAIZAL  
Jabatan : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN  
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK PERTAMA** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

HEDY RAHADIAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<b>IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100.00 %	100.00 %
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	83.00 %	83.00 %
	<b>Rincian Output</b>		
	<b>CBC 008</b> Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	3.75 Km	9.61 Km
	a. Pembangunan Jalan	3.75 Km	9.61 Km
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	3.75 Km	9.61 Km
	<b>CBF 007</b> Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	19.11 M	83.49 M
	a. Pembangunan Jembatan	19.11 M	83.49 M
	b. Pembangunan Jembatan Gantung	- M	1.00 Unit
	<b>CBC 002</b> Pelebaran Jalan Menambah Lajur	1.00 Km	4.80 Km
	<b>IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional</b>		
	<b>IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional</b>	100.00 %	100.00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.46	2.69
	<b>Rincian Output</b>		
	<b>CDC 001</b> Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	549.07 Km	121.22 Km
	<b>CDC 016</b> Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	- Km	456.75 Km
	<b>CDC 002</b> Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	22.05 Km	13.60 Km
	a. Rehabilitasi / Rekonstruksi Daerah Bencana	- Km	0.60 Km
	b. Pemeliharaan Preventif	2.93 Km	0.45 Km
b. Rehabilitasi Minor Jalan	12.99 Km	3.90 Km	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020		Target 2021	
	d. Rehabilitasi Mayor Jalan	1,55	Km	3,27	Km
	e. Rekonstruksi Jalan	4,13	Km	4,46	Km
	f. Penanganan Longsoran	0,45	Km	0,92	Km
	g. Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan	-	M	6,530.00	M
CDC 021	<b>Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)</b>	-	Km	<b>1,25</b>	<b>Km</b>
	a. Penanganan Longsoran	-		1,25	Km
CDC 004	<b>Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan</b>	<b>22,43</b>	<b>Km</b>	<b>0,05</b>	<b>Km</b>
	- Penanganan Drainase	22,43	Km	0,05	Km
CDC 020	<b>Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)</b>	-	Km	<b>46,97</b>	<b>Km</b>
	- Penanganan Drainase	-	Km	46,97	Km
CDC 029	<b>Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)</b>	-	Km	<b>3,00</b>	<b>Km</b>
	a. Penanganan Longsoran	-	Km	3,00	Km
CDF 001	<b>Preservasi Rutin Jembatan</b>	<b>5,642.90</b>	<b>M</b>	-	<b>M</b>
CDF 014	<b>Preservasi Rutin Jembatan (PEN)</b>	-	<b>M</b>	<b>4,704.10</b>	<b>M</b>
CDF 002	<b>Preservasi Jembatan</b>	<b>475.20</b>	<b>M</b>	<b>3,272.70</b>	<b>M</b>
	a. Rehabilitasi Jembatan	475.20	M	1,738.00	M
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	-	M	1,534.70	M
CBR 001	<b>Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan</b>	-	<b>Dok</b>	<b>4,00</b>	<b>Dok</b>
CBR 002	<b>Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik</b>	<b>1,00</b>	<b>Dok</b>	<b>1,00</b>	<b>Dok</b>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL KEPULAUAN RIAU  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2020	Target 2021
	<b>IKSP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional</b>		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100.00 %	100.00 %
	Parameter <i>Rating Keselamatan Jalan Nasional</i>	4.30	4.30
	<b>Rincian Output</b>		
CDC 020	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	- Km	234.55 Km
	- Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	- Km	231.91 Km
	- Penanganan Bahu Diperkeras	- Km	2.64 Km

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Anggaran  
Rp 455,620,610,000

Direktur Jenderal Bina Marga

Hedy Rahadian

Batam, November 2021  
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan  
Riau



Faizal

## CATATAN KAKI LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj) TAHUN 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(8)/(4)*100	(9)=(9)/(5)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional										455.620.810	470.390.686	436.977.702	95,81	92,90	Total Anggaran
		Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	9,61 KM	10,58 KM	8,45 KM	79,86	87,92	79,86				92.614.875	101.810.795	75.230.231	81,23	73,89	
			9,61 KM	10,58 KM	8,45 KM	79,86	87,92	79,86	Provinsi Kepulauan Riau			92.614.875	101.810.795	75.230.231	81,23	73,89	
			9,61 KM	10,58 KM	8,45 KM	79,86	87,92	79,86	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			92.614.875	101.810.795	75.230.231	81,23	73,89	
			9,61 KM	10,58 KM	8,45 KM	79,86	87,92	79,86	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			92.614.875	101.810.795	75.230.231	81,23	73,89	
			4,71 KM	4,71 KM	3,55 KM	75,35	75,35	75,35		p Pembangunan Jalan Selat Lampa Teluk Deph Sp. Sekunjam (Pengalihan Trase) (MYC) (Refocusing)	Kab. Natuna	55.705.671	55.705.671	38.321.207	68,79	68,79	
			4,90 KM	4,90 KM	4,90 KM	100,00	100,00	100,00		CT Pembangunan Jalan Teluk Buton - Sei Tekan	Kab. Natuna	36.909.204	36.909.204	36.909.024	100,00	100,00	
			- KM	0,97 KM	- KM	-	-	-		CP Pembangunan Jalan dan Jembatan Teluk Buton - Klarik Di Kab. Natuna	Kab. Natuna	-	9.195.920	-	-	-	
		Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	83,49 M	95,47 M	83,49 M	87,45	100,00	87,45				37.009.274	42.583.430	37.009.274	100,00	86,91	
			83,49 M	95,47 M	83,49 M	87,45	100,00	87,45	Provinsi Kepulauan Riau			37.009.274	42.583.430	37.009.274	100,00	86,91	
			83,49 M	95,47 M	83,49 M	87,45	100,00	87,45	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			37.009.274	42.583.430	37.009.274	100,00	86,91	
			83,49 M	95,47 M	83,49 M	87,45	100,00	87,45	339 Pembangunan Jembatan			37.009.274	42.583.430	37.009.274	100,00	86,91	
			62,89 M	62,89 M	62,89 M	100,00	100,00	100,00		T Pembagunan Jembatan Klarik 2 Cs (Refocusing)	Kab. Natuna	26.498.565	26.498.565	26.498.565	100,00	100,00	
			20,60 M	20,60 M	20,60 M	100,00	100,00	100,00		JK Pembangunan Jembatan Klarik 5	Kab. Natuna	7.480.000	7.480.000	7.480.000	100,00	100,00	
			-	11,98 M	- M	-	-	-		CP Pembangunan Jalan dan Jembatan Teluk Buton - Klarik Di Kab. Natuna	Kab. Natuna	-	5.574.156	-	-	-	
			1,00 Unit	1,00 Unit	1,00 Unit	100,00	100,00	100,00		GN Pembangunan Jembatan Gantung di Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna	3.030.709	3.030.709	3.030.709	100,00	100,00	
		Pelebaran Jalan Menambah Lajur	4,80 KM	4,80 KM	4,80 KM	100,00	100,00	100,00				46.397.465	46.397.465	46.397.465	100,00	100,00	
			4,80 KM	4,80 KM	4,80 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			46.397.465	46.397.465	46.397.465	100,00	100,00	
			4,80 KM	4,80 KM	4,80 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			46.397.465	46.397.465	46.397.465	100,00	100,00	
			4,80 KM	4,80 KM	4,80 KM	100,00	100,00	100,00	328 Pelebaran Jalan Menambah Lajur			46.397.465	46.397.465	46.397.465	100,00	100,00	
			2,00 KM	2,00 KM	2,00 KM	100,00	100,00	100,00		CR Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tanjung Berikat	Kota Batam	20.198.954	20.198.954	20.198.954	100,00	100,00	
			2,80 KM	2,80 KM	2,80 KM	100,00	100,00	100,00		CS Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Diponegoro (Sp. Sei Harapan - Sp. Basechamp Batu Aj)	Kota Batam	26.198.511	26.198.511	26.198.511	100,00	100,00	
		Rating Kondisi Jalan Nasional															
		Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	121,22 Km	121,22 KM	121,22 KM	100,00	100,00	100,00				14.576.492	14.576.492	14.576.491	100,00	100,00	
			121,22 Km	121,22 KM	121,22 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			12.140.561	12.140.561	12.140.560	100,00	100,00	
			101,47 Km	101,47 KM	101,47 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			12.140.561	12.140.561	12.140.560	100,00	100,00	
			101,47 Km	101,47 KM	101,47 KM	100,00	100,00	100,00	329 Penunjangannya/Holding			12.140.561	12.140.561	12.140.560	100,00	100,00	
			13,75 Km	13,75 KM	13,75 KM	100,00	100,00	100,00		PA Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Geseck) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	1.438.978	1.438.978	1.438.978	100,00	100,00	
			35,04 Km	35,04 KM	35,04 KM	100,00	100,00	100,00		PB Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	4.556.877	4.556.877	4.556.877	100,00	100,00	
			8,03 Km	8,03 KM	8,03 KM	100,00	100,00	100,00		PD Preservasi Jalan dan Jembatan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	969.211	969.211	969.211	100,00	100,00	
			9,84 Km	9,84 KM	9,84 KM	100,00	-	100,00		PE Preservasi Jalan dan Jembatan Dabo - Kote - Pel. Roro (Pulau Singkep)	Kab. Lingga	1.172.880	1.172.880	1.172.880	100,00	100,00	
			34,81 Km	34,81 KM	34,81 KM	100,00	100,00	100,00		PH Preservasi Jalan dan Jembatan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	Kab. Natuna	4.002.615	4.002.615	4.002.614	100,00	100,00	
			19,75 KM	19,75 KM	19,75 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			2.435.931	2.435.931	2.435.931	100,00	100,00	
			19,75 KM	19,75 KM	19,75 KM	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			2.435.931	2.435.931	2.435.931	100,00	100,00	
			19,75 KM	19,75 KM	19,75 KM	100,00	100,00	100,00	329 Penunjangannya/Holding			2.435.931	2.435.931	2.435.931	100,00	100,00	
			19,75 KM	19,75 KM	19,75 KM	100,00	100,00	100,00		B Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs, Km16 (Sp. Geseck) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	2.435.931	2.435.931	2.435.931	100,00	100,00	
		Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (PEN)	456,75 Km	456,75 KM	456,75 KM	100,00	100,00	100,00				16.617.335	16.617.335	16.617.088	100,00	100,00	
			386,47 Km	386,47 KM	386,47 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			14.157.580	14.157.580	14.157.333	100,00	100,00	
			386,47 Km	386,47 KM	386,47 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			14.157.580	14.157.580	14.157.333	100,00	100,00	
			386,47 Km	386,47 KM	386,47 KM	100,00	100,00	100,00	319 Pemeliharaan Rutin			14.157.580	14.157.580	14.157.333	100,00	100,00	
			71,56 Km	71,56 KM	71,56 KM	100,00	100,00	100,00		KA Padat Karya Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Geseck) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	2.504.600	2.504.600	2.504.600	100,00	100,00	
			124,48 Km	124,48 KM	124,48 KM	100,00	100,00	100,00		KB Padat Karya Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	5.940.080	5.940.080	5.940.078	100,00	100,00	
			26,25 Km	26,25 KM	26,25 KM	100,00	100,00	100,00		KC Padat Karya Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang (Pulau Karimun)	Kab. Karimun	787.500	787.500	787.489	100,00	100,00	
			33,02 Km	33,02 KM	33,02 KM	100,00	100,00	100,00		KE Padat Karya Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	889.218	889.218	889.204	100,00	100,00	
			17,15 Km	17,15 KM	17,15 KM	100,00	100,00	100,00		KF Padat Karya Preservasi Jalan Dabo - Kote - Pel. Roro (Pulau Singkep)	Kab. Lingga	615.882	615.882	615.882	100,00	100,00	
			9,50 Km	9,50 KM	9,50 KM	100,00	100,00	100,00		KG Padat Karya Preservasi Jalan Tarempa - Rintis (Pulau Siantan)	Kab. Anambas	86.500	86.500	86.500	100,00	100,00	
			21,43 Km	21,43 KM	21,43 KM	100,00	100,00	100,00		KH Padat Karya Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro (Pulau Matuk)	Kab. Anambas	557.759	557.759	557.744	100,00	100,00	
			83,08 Km	83,08 KM	83,08 KM	100,00	100,00	100,00		KI Padat Karya Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	Kab. Natuna	2.776.041	2.776.041	2.775.836	99,99	99,99	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(9)*100	(9)=(6)/(9)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
			70,28 Km	70,28 KM	70,28 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			2.459.755	2.459.755	2.459.755	100,00	100,00	
			70,28 Km	70,28 KM	70,28 KM	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			2.459.755	2.459.755	2.459.755	100,00	100,00	
			70,28 Km	70,28 KM	70,28 KM	100,00	100,00	100,00	319 Pemeliharaan Rutin			2.459.755	2.459.755	2.459.755	100,00	100,00	
			70,28 Km	70,28 KM	70,28 KM	100,00	100,00	100,00		A Padat Karya Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs/Km16 (Sp. Gesek) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	2.459.755	2.459.755	2.459.755	100,00	100,00	
		CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	13,60 KM	13,60 KM	13,60 KM	100,00	100,00	100,00				79.395.173	79.395.173	79.075.992	99,60	99,60	
			13,10 KM	13,10 KM	13,10 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			77.613.017	77.613.017	77.293.836	99,59	99,59	
			13,10 KM	13,10 KM	13,10 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PJJ Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			77.613.017	77.613.017	77.293.836	99,59	99,59	
			0,40 KM	0,40 KM	0,40 KM	100,00	100,00	100,00	315 Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana			3.706.400	3.706.400	3.706.400	100,00	100,00	
			0,20 KM	0,20 KM	0,20 KM	100,00	100,00	100,00		PA Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	1.791.458	1.791.458	1.791.458	100,00	100,00	
			0,20 KM	0,20 KM	0,20 KM	100,00	100,00	100,00		PB Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	1.914.942	1.914.942	1.914.942	100,00	100,00	
			0,45 KM	0,45 KM	0,45 KM	100,00	100,00	100,00	321 Pemeliharaan Preventif			48.939	48.939	48.939	100,00	100,00	
			0,45 KM	0,45 KM	0,45 KM	100,00	100,00	100,00		H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Refocusing)	Kab. Natuna	48.939	48.939	48.939	100,00	100,00	
			3,60 KM	3,60 KM	3,60 KM	100,00	100,00	100,00	322 Rehabilitasi Minor Jalan			7.544.666	7.544.666	7.544.666	100,00	100,00	
			2,33 KM	2,33 KM	2,33 KM	100,00	100,00	100,00		B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Refocusing)	Kota Batam	4.526.054	4.526.054	4.526.054	100,00	100,00	
			0,25 KM	0,25 KM	0,25 KM	100,00	100,00	100,00		D Preservasi Jalan Dak - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Refocusing)	Kab. Lingga	712.347	712.347	712.347	100,00	100,00	
			1,02 KM	1,02 KM	1,02 KM	100,00	100,00	100,00		H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Refocusing)	Kab. Natuna	2.306.265	2.306.265	2.306.265	100,00	100,00	
			3,27 KM	3,27 KM	3,27 KM	100,00	100,00	100,00	323 Rehabilitasi Mayor Jalan			12.468.130	12.468.130	12.468.129	100,00	100,00	
			1,50 KM	1,50 KM	1,50 KM	100,00	100,00	100,00		B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Refocusing)	Kota Batam	5.765.896	5.765.896	5.765.896	100,00	100,00	
			0,37 KM	0,37 KM	0,37 KM	100,00	100,00	100,00		D Preservasi Jalan Dak - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Refocusing)	Kab. Lingga	1.161.132	1.161.132	1.161.132	100,00	100,00	
			0,90 KM	0,90 KM	0,90 KM	100,00	100,00	100,00		H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Refocusing)	Kab. Natuna	3.557.557	3.557.557	3.557.557	100,00	100,00	
			0,50 KM	0,50 KM	0,50 KM	100,00	100,00	100,00		PB Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	1.983.545	1.983.545	1.983.544	100,00	100,00	
			4,46 Km	4,46 KM	4,46 KM	100,00	100,00	100,00	324 Rekonstruksi Jalan			20.799.472	20.799.472	20.799.472	100,00	100,00	
			0,00 Km	0,00 KM	0,00 KM	100,00	100,00	100,00		B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Refocusing)	Kota Batam	1.212.494	1.212.494	1.212.494	100,00	100,00	
			1,50 Km	1,50 KM	1,50 KM	100,00	100,00	100,00		D Preservasi Jalan Dak - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Refocusing)	Kab. Lingga	5.245.157	5.245.157	5.245.157	100,00	100,00	
			2,02 Km	2,02 KM	2,02 KM	100,00	100,00	100,00		G Preservasi Jalan Peninim - Payalaman - Pel. Roro (Refocusing)	Kab. Anambas	7.814.783	7.814.783	7.814.783	100,00	100,00	
			0,35 Km	0,35 KM	0,35 KM	100,00	100,00	100,00		H Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Refocusing)	Kab. Natuna	2.298.200	2.298.200	2.298.200	100,00	100,00	
			0,59 Km	0,59 KM	0,59 KM	100,00	100,00	100,00		PD Preservasi Jalan dan Jembatan Dak - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	4.228.838	4.228.838	4.228.838	100,00	100,00	
			0,92 KM	0,92 KM	0,92 KM	100,00	100,00	100,00	331 Penanganan Longsor			21.318.658	21.318.658	20.999.479	98,50	98,50	
			0,50 KM	0,50 KM	0,50 KM	100,00	100,00	100,00		A Preservasi Jalan Jalan Km 16 (sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Refocusing)	Kab. Bintan	8.519.440	8.519.440	8.519.440	100,00	100,00	
			0,14 KM	0,14 KM	0,14 KM	100,00	100,00	100,00		PA Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	8.365.945	8.365.945	8.365.503	99,99	99,99	
			0,20 KM	0,20 KM	0,20 KM	100,00	100,00	100,00		PE Preservasi Jalan dan Jembatan Dabo - Koto - Pel. Roro (Pulau Singkep)	Kab. Lingga	1.859.130	1.859.130	1.859.130	100,00	100,00	
			0,08 KM	0,08 KM	0,08 KM	100,00	100,00	100,00		TJ Penanganan Longsor Jalan Nasional di Pulau Santan, Kab Anambas	Kab. Anambas	2.574.143	2.574.143	2.295.406	87,62	87,62	
			6530,00 M	6530,00 M	6530,00 M	100,00	100,00	100,00	332 Perbaikan Geometrik dan Perlengkapan Jalan			11.726.752	11.726.752	11.726.751	100,00	100,00	
			4900,00 M	4900,00 M	4900,00 M	100,00	100,00	100,00		PA Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	3.770.892	3.770.892	3.770.892	100,00	100,00	
			1630,00 M	1630,00 M	1630,00 M	100,00	100,00	100,00		PD Preservasi Jalan dan Jembatan Dak - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	7.955.860	7.955.860	7.955.859	100,00	100,00	
			0,50 KM	0,50 KM	0,50 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			1.782.156	1.782.156	1.782.156	100,00	100,00	
			0,50 KM	0,50 KM	0,50 KM	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			1.782.156	1.782.156	1.782.156	100,00	100,00	
			0,20 KM	0,20 KM	0,20 KM	100,00	100,00	100,00	315 Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Bencana			1.294.768	1.294.768	1.294.768	100,00	100,00	
			0,20 KM	0,20 KM	0,20 KM	100,00	100,00	100,00		C Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs/Km16 (Sp. Gesek) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	1.294.768	1.294.768	1.294.768	100,00	100,00	
			0,30 KM	0,30 KM	0,30 KM	100,00	100,00	100,00	322 Rehabilitasi Minor Jalan			487.388	487.388	487.388	100,00	100,00	
			0,30 KM	0,30 KM	0,30 KM	100,00	100,00	100,00		D Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs/Km16 (Sp. Gesek) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	487.388	487.388	487.388	100,00	100,00	
		CDC 021 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan (PEN)	1,25 KM	1,25 KM	1,25 KM	100,00	100,00	100,00				2.932.096	2.932.096	2.932.096	100,00	100,00	
			1,25 KM	1,25 KM	1,25 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			2.932.096	2.932.096	2.932.096	100,00	100,00	
			1,25 KM	1,25 KM	1,25 KM	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			2.932.096	2.932.096	2.932.096	100,00	100,00	
			1,25 KM	1,25 KM	1,25 KM	100,00	100,00	100,00	331 Penanganan Longsor			2.932.096	2.932.096	2.932.096	100,00	100,00	
			1,25 KM	1,25 KM	1,25 KM	100,00	100,00	100,00		H Tambahan Padat Karya Penanganan Perbaikan Lereng Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs/Km16 (Sp. Gesek) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	2.932.096	2.932.096	2.932.096	100,00	100,00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(9)*100	(9)=(6)/(9)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
		CDC 004 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	0,05 Km	0,05 KM	0,05 KM	100,00	100,00	100,00				2.724.774	2.724.774	2.724.774	100,00	100,00	
			0,05 Km	0,05 KM	0,05 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			2.724.774	2.724.774	2.724.774	100,00	100,00	
			0,05 Km	0,05 KM	0,05 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			2.724.774	2.724.774	2.724.774	100,00	100,00	
			0,05 Km	0,05 KM	0,05 KM	100,00	100,00	100,00	403 Penanganan Drainase			2.724.774	2.724.774	2.724.774	100,00	100,00	
			0,04 Km	0,04 KM	0,04 KM	100,00	100,00	100,00		B Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Refocusing)	Kota Batam	1.879.246	1.879.246	1.879.246	100,00	100,00	
			0,01 Km	0,01 KM	0,01 KM	100,00	100,00	100,00		PB Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	845.528	845.528	845.528	100,00	100,00	
		CDC 021 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	46,97 KM	46,97 KM	46,97 KM	100,00	100,00	100,00				31.686.398	31.686.398	31.683.146	99,99	99,99	
			28,85 Km	28,85 KM	28,85 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			24.597.689	24.597.689	24.594.440	99,99	99,99	
			28,85 Km	28,85 KM	28,85 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			24.597.689	24.597.689	24.594.440	99,99	99,99	
			28,85 Km	28,85 KM	28,85 KM	100,00	100,00	100,00	403 Penanganan Drainase			24.597.689	24.597.689	24.594.440	99,99	99,99	
			3,37 Km	3,37 KM	3,37 KM	100,00	100,00	100,00		KA Padat Karya Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Geseck) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	3.202.406	3.202.406	3.202.394	100,00	100,00	
			2,58 Km	2,58 KM	2,58 KM	100,00	100,00	100,00		KB Padat Karya Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	2.350.676	2.350.676	2.350.676	100,00	100,00	
			1,10 Km	1,10 KM	1,10 KM	100,00	100,00	100,00		KC Padat Karya Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang (Pulau Karimun)	Kab. Karimun	1.237.149	1.237.149	1.237.149	100,00	100,00	
			0,93 Km	0,93 KM	0,93 KM	100,00	100,00	100,00		KD Padat Karya Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	1.197.215	1.197.215	1.197.215	100,00	100,00	
			0,60 Km	0,60 KM	0,60 KM	100,00	100,00	100,00		KE Padat Karya Preservasi Jalan Dabo - Koba - Pel. Roro (Pulau Singkep)	Kab. Lingga	536.205	536.205	536.205	100,00	100,00	
			0,20 Km	0,20 KM	0,20 KM	100,00	100,00	100,00		KF Padat Karya Preservasi Jalan Tanempa - Rintis (Pulau Santan)	Kab. Anambas	203.709	203.709	203.385	99,35	99,35	
			0,20 Km	0,20 KM	0,20 KM	100,00	100,00	100,00		KG Padat Karya Preservasi Jalan Peninting - Payalaman - Pel. Roro (Pulau Matla)	Kab. Anambas	203.709	203.709	203.702	100,00	100,00	
			2,63 Km	2,63 KM	2,63 KM	100,00	100,00	100,00		KH Padat Karya Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	Kab. Natuna	2.456.615	2.456.615	2.454.753	99,92	99,92	
			3,50 Km	3,50 KM	3,50 KM	100,00	100,00	100,00		TA Tambahan Padat Karya Rewelisasi Drainase PPK 1.1 Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Bintan	2.800.000	2.800.000	2.800.000	100,00	100,00	
			5,81 Km	5,81 KM	5,81 KM	100,00	100,00	100,00		TB Tambahan Padat Karya Rewelisasi Drainase PPK 1.2 Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam	3.000.000	3.000.000	2.999.999	100,00	100,00	
			3,43 Km	3,43 KM	3,43 KM	100,00	100,00	100,00		TC Tambahan Padat Karya Rewelisasi Drainase PPK 1.3 Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga	3.988.660	3.988.660	3.988.664	100,00	100,00	
			4,50 Km	4,50 KM	4,50 KM	100,00	100,00	100,00		TD Tambahan Padat Karya Rewelisasi Drainase PPK 1.4	Kab. Natuna	3.421.345	3.421.345	3.421.318	100,00	100,00	
			18,12 Km	18,12 KM	18,12 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			7.088.709	7.088.709	7.088.706	100,00	100,00	
			18,12 Km	18,12 KM	18,12 KM	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			7.088.709	7.088.709	7.088.706	100,00	100,00	
			18,12 Km	18,12 KM	18,12 KM	100,00	100,00	100,00	403 Penanganan Drainase			7.088.709	7.088.709	7.088.706	100,00	100,00	
			1,14 Km	1,14 KM	1,14 KM	100,00	100,00	100,00		G Tambahan Padat Karya Rewelisasi Drainase Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs./Km16 (Sp. Geseck) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	2.657.496	2.657.496	2.657.495	100,00	100,00	
			12,48 Km	12,48 KM	12,48 KM	100,00	100,00	100,00		EA Penanganan Drainase Padat Karya Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs./Km16 (Sp. Geseck) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	91.285	91.285	91.284	100,00	100,00	
			4,50 Km	4,50 KM	4,50 KM	100,00	100,00	100,00		EB Penanganan Drainase Padat Karya Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs./Km16 (Sp. Geseck) - Kijang Cs - Sialang - Sp. Lagoi (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	4.339.928	4.339.928	4.339.927	100,00	100,00	
		CDC 023 Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP) (PEN)	3,00 KM	3,00 KM	3,00 KM	100,00	100,00	100,00				4.567.883	4.567.883	4.567.872	100,00	100,00	
			3,00 Km	3,00 KM	3,00 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			4.567.883	4.567.883	4.567.872	100,00	100,00	
			3,00 Km	3,00 KM	3,00 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			4.567.883	4.567.883	4.567.872	100,00	100,00	
			3,00 Km	3,00 KM	3,00 KM	100,00	100,00	100,00	331 Penanganan Longoran			4.567.883	4.567.883	4.567.872	100,00	100,00	
			2,00 Km	2,00 KM	2,00 KM	100,00	100,00	100,00		TG Tambahan Padat Karya Perbaikan Lereng PPK 1.2 Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam	2.567.883	2.567.883	2.567.875	100,00	100,00	
			0,50 Km	0,50 KM	0,50 KM	100,00	100,00	100,00		TH Tambahan Padat Karya Perbaikan Lereng PPK 1.3 Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Lingga	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	
			0,50 Km	0,50 KM	0,50 KM	100,00	100,00	100,00		TI Tambahan Padat Karya Perbaikan Lereng PPK 1.4 Provinsi Kepulauan Riau	Kab. Natuna	500.000	500.000	499.997	100,00	100,00	
		CDF 014 Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	4704,10 M	4704,10 M	4704,10 M	100,00	100,00	100,00				4.391.903	4.391.903	4.391.890	100,00	100,00	
			4704,10 M	4704,10 M	4704,10 M	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			4.391.903	4.391.903	4.391.890	100,00	100,00	
			4704,10 M	4704,10 M	4704,10 M	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			4.391.903	4.391.903	4.391.890	100,00	100,00	
			4704,10 M	4704,10 M	4704,10 M	100,00	100,00	100,00	325 Pemeliharaan Rutin Jembatan			4.391.903	4.391.903	4.391.890	100,00	100,00	
			1250,20 M	1250,20 M	1250,20 M	100,00	100,00	100,00		KA Padat Karya Preservasi Jalan Km. 16 (Sp. Geseck) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	1.750.280	1.750.280	1.750.280	100,00	100,00	
			2592,40 M	2592,40 M	2592,40 M	100,00	100,00	100,00		KB Padat Karya Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	1.435.523	1.435.523	1.435.511	100,00	100,00	
			6,00 M	6,00 M	6,00 M	100,00	100,00	100,00		KC Padat Karya Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang (Pulau Karimun)	Kab. Karimun	9.337	9.337	9.337	100,00	100,00	
			173,70 M	173,70 M	173,70 M	100,00	100,00	100,00		KD Padat Karya Preservasi Jalan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	180.090	180.090	180.090	100,00	100,00	
			79,80 M	79,80 M	79,80 M	100,00	100,00	100,00		KE Padat Karya Preservasi Jalan Dabo - Koba - Pel. Roro (Pulau Singkep)	Kab. Lingga	173.873	173.873	173.873	100,00	100,00	
			602,00 M	602,00 M	602,00 M	100,00	100,00	100,00		KH Padat Karya Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	Kab. Natuna	842.800	842.800	842.799	100,00	100,00	
		CDF 002 Preservasi Jembatan	3272,60 M	3272,70 M	3272,70 M	100,00	100,00	100,00				42.693.633	42.693.633	42.693.586	100,00	100,00	
			3272,60 M	3272,70 M	3272,70 M	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			42.693.633	42.693.633	42.693.586	100,00	100,00	
			3272,60 M	3272,70 M	3272,70 M	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			42.693.633	42.693.633	42.693.586	100,00	100,00	
			173,90 M	173,90 M	173,90 M	100,00	100,00	100,00	326 Rehabilitasi Jembatan			25.717.227	25.717.227	25.717.225	100,00	100,00	
			988,50 M	988,50 M	988,50 M	100,00	100,00	100,00		K Rehabilitasi Jembatan Fisabilah CS (Refocusing)	Kota Batam	17.766.065	17.766.065	17.766.065	100,00	100,00	
			621,70 M	621,70 M	621,70 M	100,00	100,00	100,00		JA Preservasi Jembatan Km. 16 (Sp. Geseck) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab. Bintan	5.088.154	5.088.154	5.088.154	100,00	100,00	
			7,20 M	7,20 M	7,20 M	100,00	100,00	100,00		PD Preservasi Jalan dan Jembatan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	183.545	183.545	183.545	100,00	100,00	
			14,20 M	14,20 M	14,20 M	100,00	100,00	100,00		PE Preservasi Jalan dan Jembatan Dabo - Koba - Pel. Roro (Pulau Singkep)	Kab. Lingga	443.452	443.452	443.452	100,00	100,00	
			106,30 M	106,40 M	106,40 M	100,00	100,00	100,00		PH Preservasi Jalan dan Jembatan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	Kab. Natuna	2.236.011	2.236.011	2.236.009	100,00	100,00	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(8)*100	(9)=(6)/(9)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
			1534,70 M	1534,70 M	1534,70 M	100,00	100,00	100,00	333 Pemeliharaan Berkala Jembatan			16.976.406	16.976.406	16.976.361	100,00	100,00	
			891,10 M	891,10 M	891,10 M	100,00	100,00	100,00		JA Preservasi Jembatan Km. 16 (Sp. Gabek) - rangkai uban - Sarang (Pulau Batang)	Kab. Bintan	9.151.004	9.151.004	9.151.003	100,00	100,00	
			253,60 M	253,60 M	253,60 M	100,00	100,00	100,00		JB Preservasi Jembatan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	2.947.791	2.947.791	2.947.791	100,00	100,00	
			27,00 M	27,00 M	27,00 M	100,00	100,00	100,00		PD Preservasi Jalan dan Jembatan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur (Pulau Lingga)	Kab. Lingga	541.339	541.339	541.339	100,00	100,00	
			73,00 M	73,00 M	73,00 M	100,00	100,00	100,00		PE Preservasi Jalan dan Jembatan Dabo - Kole - Pel. Roro (Pulau Singkep)	Kab. Lingga	1.092.064	1.092.064	1.092.064	100,00	100,00	
			290,00 M	290,00 M	290,00 M	100,00	100,00	100,00		PH Preservasi Jalan dan Jembatan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	Kab. Natuna	3.244.208	3.244.208	3.244.164	100,00	100,00	
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	4,00 DOK	4,00 DOK	4,00 DOK	100,00	100,00	100,00				15.568.981	15.860.607	15.245.680	97,92	96,12	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			9.418.309	9.418.309	8.833.252	93,79	93,79	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	Satker BPJN Kepulauan Riau			9.418.309	9.418.309	8.833.252	93,79	93,79	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	310 Bantuan Teknis			2.907.588	2.907.588	2.326.004	80,00	80,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		A Bantuan Teknis (KMP) Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	2.907.588	2.907.588	2.326.004	80,00	80,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	342 Pengumpulan, pengolahan, updating dan analisa data			3.843.583	3.843.583	3.843.583	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		B Pengumpulan, Pengolahan, Updating dan Analisa Data	Kepulauan Riau	3.843.583	3.843.583	3.843.583	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	402 Manajemen Pengendalian			1.177.851	1.177.851	1.174.378	99,71	99,71	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		C Monitoring dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau PPK BAGIAN UMUM DAN TU	Kepulauan Riau	239.210	239.210	239.056	99,94	99,94	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		D Monitoring dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Kepulauan Riau	295.208	295.208	295.075	99,95	99,95	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		E Monitoring dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Kepulauan Riau	217.735	217.735	216.886	99,61	99,61	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		F Monitoring dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau PPK PRESERVASI	Kepulauan Riau	295.208	295.208	292.964	99,24	99,24	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		V Monitoring dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau KPA/Kepala Satuan Kerja BPJN Kepri	Kepulauan Riau	130.490	130.490	130.397	99,93	99,93	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	413 Penyusunan Dokumen Lingkungan			1.489.287	1.489.287	1.489.287	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		G Penyusunan Dokumen Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau BPJN KEPRI	Kepulauan Riau	1.489.287	1.489.287	1.489.287	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			5.334.911	5.626.537	5.596.667	104,91	99,47	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau			5.334.911	5.626.537	5.596.667	104,91	99,47	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	001 Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan			5.334.911	5.626.537	5.596.667	104,91	99,47	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		A Paket 02 Core Team Consultant Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	3.619.289	3.619.289	3.590.061	99,19	99,19	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		B Monitoring dan Evaluasi SATKER P2JN KEPRI	Kepulauan Riau	999.999	999.999	999.616	99,96	99,96	
			0,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	-	100,00		AN Monitoring Over Dimention Over Load dengan menggunakan alat bantu	Kepulauan Riau	715.623	1.007.249	1.006.990	140,72	99,97	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			611.226	611.226	611.226	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	Satker P2JN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			611.226	611.226	611.226	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	316 Bahan Jalan dan Jembatan			611.226	611.226	611.226	100,00	100,00	
			65,00 TON	65,00 TON	65,00 TON	100,00	100,00	100,00		MA Tambalan Cepat Mantap Jenis Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA)	Kepulauan Riau	193.050	193.050	193.050	100,00	100,00	
			1,00 LS	1,00 LS	1,00 LS	100,00	100,00	100,00		MR Rosin	Kepulauan Riau	418.176	418.176	418.176	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			204.535	204.535	204.535	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			204.535	204.535	204.535	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	316 Bahan Jalan dan Jembatan			204.535	204.535	204.535	100,00	100,00	
			15,00 TON	15,00 TON	15,00 TON	100,00	100,00	100,00		FA Tambalan Cepat Mantap Jenis Cold Paving Hot Mix Asbuton (CPHMA)	Kepulauan Riau	44.550	44.550	44.550	100,00	100,00	
			1,00 LS	1,00 LS	1,00 LS	100,00	100,00	100,00		FB Rosin	Kepulauan Riau	159.985	159.985	159.985	100,00	100,00	
	CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	94,12	100,00	100,00				24.743.863	24.452.037	24.328.412	98,32	99,49	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	94,12	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			24.743.863	24.452.037	24.328.412	98,32	99,49	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	94,12	100,00	100,00	Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau			24.743.863	24.452.037	24.328.412	98,32	99,49	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00	307 Perencanaan Teknik (DED)			10.702.859	10.582.938	10.582.938	98,88	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		C Paket 01 Perencanaan Teknis Jalan Nasional dan Rehabilitasi Jembatan di Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	2.401.795	2.401.795	2.401.795	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		AH Paket Swakekela Perencanaan Teknis Pelebaran Menambah Lajur Jalan Tembesi - Tg. Benkat di Kota Batam	Kota Batam	516.172	459.806	459.806	89,08	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		AI Paket Swakekela Perencanaan Teknis Penanganan Banjir Pulau Batam dan Pulau Bintan	Kota Batam - Kab. Bintan	1.410.055	1.346.500	1.346.499	95,49	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		Paket Perencanaan Teknis/DED - Pelebaran Menuju Standar Jalan Sp. Jeletung AJ - Pasir Panjang di Kab. Karimun dan Sp. Sekunyam - Desa Cemaga di Kab. Natuna, Prov. Kep. Riau	Kepulauan Riau	2.843.896	2.843.896	2.843.896	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		AK Paket Perencanaan Teknis/DED - Pembangunan Jembatan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam, Kab. Natuna, Prov. Kep. Riau	Kab. Natuna	2.182.836	2.182.836	2.182.836	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		AL Paket Perencanaan/DED Penanganan Longsor Jalan dan Jembatan Nasional di Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	1.348.105	1.348.105	1.348.105	100,00	100,00	



NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(9)*100	(9)=(6)/(9)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
			1,00 DOK	1,00 DOK	0,91 DOK	90,91	90,91	90,91	307 Perencanaan Teknik (DED)			14.040.804	13.869.099	13.745.475	97,90	99,11	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		Paket 03 Pengawasan Preservasi Jalan Km 16 (sp, Gesek) - Kijang CS - Sialang D -sp, Lagoi dan Preservasi Jalan dan Jembatan Km 16 (sp, Gesek) - Tanjung Uban - Sialang	Kab, Bintan	2.163.147	2.163.147	2.163.147	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		E Paket 04 Pengawasan Preservasi Jalan dan Jembatan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang	Kota Batam	1.534.171	1.534.171	1.534.171	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		F Paket 05 Pengawasan Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang, Preservasi Jalan dan Jembatan Daik - Tj. Buton - Sungai Besar - Pancur dan Preservasi Jalan dan Jembatan Dabo - Kole - Pel. Roro	Kab. Lingga - Kab. Karimun	1.526.335	1.526.335	1.526.334	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		G Paket 06 Pengawasan Preservasi Jalan Tarempa- Rinis dan Preservasi Jalan Paniring - Payalaman - Pel. Roro	Kab, Anambas	341.363	341.363	341.363	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		H Paket 07 Pengawasan Preservasi Jalan dan Jembatan Selat Lampa - Ranai - Fakuk Buton	Kab, Natuna	1.278.462	1.278.462	1.278.462	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		I Paket 08 Pengawasan Pelebaran Menambah Lajur Jalan di Kota Batam	Kota Batam	1.538.294	1.510.294	1.509.728	98,14	99,96	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		J Paket 09 Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Teluk Buton - Sei Tekan	Kab, Natuna	2.670.918	2.670.918	2.670.918	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		K Paket Pengawasan Rehabilitasi Jembatan di Pulau Bintan dan Batam (REFOCUSING)	Kota Batam - Kab, Bintan	212.047	212.047	212.047	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		L Paket Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Pulau Natuna (REFOCUSING)	Kab, Natuna	593.461	593.461	593.461	100,00	100,00	
			1,00 DOK	1,00 DOK	1,00 DOK	100,00	100,00	100,00		M Paket Pengawasan Pembangunan Jalan Selat Lampa - Teluk Depih - Sp. Sekunyam (MYC)	Kab, Natuna	2.094.561	2.037.901	1.915.844	91,47	94,01	
			1,00 DOK	1,00 DOK	- DOK	-	-	-		AN Pengawasan Pembangunan Jalan dan Jembatan Teluk Buton - Klinik (MYC)	Kab, Natuna	88.045	1.000	-	-	-	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional															
		CDC 02) Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (PEN)	234,55 Km	234,55 KM	234,55 KM	100,00	100,00	100,00				13.383.965	13.383.965	13.381.691	99,98	99,98	
			169,26 Km	169,26 KM	169,26 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			11.120.147	11.120.147	11.117.873	99,98	99,98	
			169,26 Km	169,26 KM	169,26 KM	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			11.120.147	11.120.147	11.117.873	99,98	99,98	
			166,62 Km	166,62 KM	166,62 KM	100,00	100,00	100,00	405 Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan			10.120.147	10.120.147	10.117.891	99,98	99,98	
			25,34 Km	25,34 KM	25,34 KM	100,00	100,00	100,00		KA Padat Karya Preservasi Jalan Km, 16 (Sp, Gesek) - Tanjung Uban - Sialang (Pulau Bintan)	Kab, Bintan	2.782.663	2.782.663	2.782.634	100,00	100,00	
			57,70 Km	57,70 KM	57,70 KM	100,00	100,00	100,00		KB Padat Karya Preservasi Jalan Nongsa - Batu Ampar - Tembesi - Galang (Pulau Batam - Galang)	Kota Batam	4.447.985	4.447.985	4.447.750	99,99	99,99	
			26,25 Km	26,25 KM	26,25 KM	100,00	100,00	100,00		KC Padat Karya Preservasi Jalan Tj. Balai - Meral - Pasir Panjang (Pulau Karimun)	Kab, Karimun	1.057.999	1.057.999	1.056.023	99,81	99,81	
			57,33 Km	57,33 KM	57,33 KM	100,00	100,00	100,00		KH Padat Karya Preservasi Jalan Selat Lampa - Ranai - Teluk Buton (Pulau Natuna)	Kab, Natuna	1.831.500	1.831.500	1.831.484	100,00	100,00	
			2,64 Km	2,64 KM	2,64 KM	100,00	100,00	100,00	406 Penanganan Bahu Diperkeras			1.000.000	1.000.000	999.982	100,00	100,00	
			1,60 Km	1,60 KM	1,60 KM	100,00	100,00	100,00		TE Tambahan Padat Karya Bahu Diperkeras PPK 1,2 Provinsi Kepulauan Riau	Kab, Bintan	500.648	500.648	500.646	100,00	100,00	
			1,04 Km	1,04 KM	1,04 KM	100,00	100,00	100,00		TF Tambahan Padat Karya Bahu Diperkeras PPK 1,4 Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam	499.352	499.352	499.336	100,00	100,00	
			65,29 Km	65,29 KM	65,29 KM	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			2.263.818	2.263.818	2.263.818	100,00	100,00	
			65,29 Km	65,29 KM	65,29 KM	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			2.263.818	2.263.818	2.263.818	100,00	100,00	
			65,29 Km	65,29 KM	65,29 KM	100,00	100,00	100,00	405 Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan			2.263.818	2.263.818	2.263.818	100,00	100,00	
			65,29 Km	65,29 KM	65,29 KM	100,00	100,00	100,00		EC Padat Karya Preservasi Jalan Tanjungpinang Cs/Km16 (Sp, Gesek) - Kijang Cs - Sialang - Sp, Lagoi (Pulau Bintan)	Kab, Bintan	2.263.818	2.263.818	2.263.818	100,00	100,00	
	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya																
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR															
		EAD 002 Layanan Sarana Internal	2,00 UNIT	2,00 UNIT	2,00 UNIT	100,00	100,00	100,00				3.262.005	3.262.005	3.261.742	99,99	99,99	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			3.012.005	3.012.005	3.012.004	100,00	100,00	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Satker BPJN Kepulauan Riau			3.012.005	3.012.005	3.012.004	100,00	100,00	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantran			3.012.005	3.012.005	3.012.004	100,00	100,00	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		Q Pengadaan Fasilitas Perkantran	Kepulauan Riau	1.173.650	1.173.650	1.173.650	100,00	100,00	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		R Sewa Mess BPJN KEPRU	Kepulauan Riau	312.000	312.000	312.000	100,00	100,00	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		S Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Pembelian Masker, Hand Sanitizer untuk Kebutuhan Seluruh Pegawai PNS dan Non PNS	Kepulauan Riau	261.555	261.555	260.393	99,56	99,56	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		Z Pengadaan Sarana Internal Rumah Susun ASN Kementerian PUPR di BPJN Kepri	Kepulauan Riau	1.264.800	1.264.800	1.261.994	99,78	99,78	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			250.000	250.000	249.668	99,87	99,87	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			250.000	250.000	249.668	99,87	99,87	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			170.000	170.000	169.818	99,89	99,89	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		EU Pengadaan Perangkat Pengolah Data	Kepulauan Riau	170.000	170.000	169.818	99,89	99,89	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas perkantran			80.000	80.000	79.850	99,81	99,81	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		EV Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantran	Kepulauan Riau	80.000	80.000	79.850	99,81	99,81	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	EAC 003	Layanan Prasarana Internal	2,00 UNIT	2,00 UNIT	2,00 UNIT	100,00	100,00	100,00				1.680.480	1.680.480	1.677.661	99,83	99,83	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			780.480	780.480	777.808	99,66	99,66	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Satker BPJN Kepulauan Riau			780.480	780.480	777.808	99,66	99,66	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan			780.480	780.480	777.808	99,66	99,66	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		U Renovasi Gedung dan Ruang Kantor BPJN Kepri	Kota Batam	780.480	780.480	777.808	99,66	99,66	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			900.000	900.000	899.853	99,98	99,98	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau			900.000	900.000	899.853	99,98	99,98	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00	055 Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan			900.000	900.000	899.853	99,98	99,98	
			1,00 UNIT	1,00 UNIT	1,00 UNIT	100,00	100,00	100,00		AM Renovasi Kantor	Kota Batam	900.000	900.000	899.853	99,98	99,98	
	EAC 004	Layanan Dukungan Manajemen Satker	4,00 LAYANAN	4,00 LAYANAN	4,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00				8.143.260	8.143.260	8.131.656	99,86	99,86	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			1.789.919	1.789.919	1.786.460	99,81	99,81	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Satker BPJN Kepulauan Riau			1.789.919	1.789.919	1.786.460	99,81	99,81	
			0,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	-	100,00	052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			50.821	50.821	50.735	99,83	99,83	
			0,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	-	100,00		T Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Kepulauan Riau	50.821	50.821	50.735	99,83	99,83	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			1.739.098	1.739.098	1.735.725	99,81	99,81	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		K Honorarium Pejabat/Pengadaan BPJN KEPRI	Kepulauan Riau	8.160	8.160	8.160	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		L Kegiatan Rapat Koordinasi di Lingkungan BPJN Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	141.244	141.244	140.391	99,40	99,40	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		M Administrasi Kegiatan PPK Bagian TU dan Kepegawaian	Kepulauan Riau	279.263	279.263	279.010	99,91	99,91	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		N Administrasi Kegiatan PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Kepulauan Riau	366.442	366.442	366.142	99,92	99,92	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		O Administrasi Kegiatan PPK PEMBANGUNAN JALAN dan JEMBATAN	Kepulauan Riau	297.254	297.254	297.790	100,18	100,18	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		P Administrasi Kegiatan PPK PRESERVASI	Kepulauan Riau	368.609	368.609	368.228	99,35	99,35	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		W Keperluan Operasional Kantor KPA/Kepala Satuan Kerja BPJN Kepri	Kepulauan Riau	105.034	105.034	105.027	99,99	99,99	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		X Administrasi Kegiatan KPA/Kepala Satuan Kerja BPJN Kepri	Kepulauan Riau	173.092	173.092	172.977	99,93	99,93	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			1.853.174	1.853.174	1.852.992	99,99	99,99	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau			1.853.174	1.853.174	1.852.992	99,99	99,99	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			23.167	23.167	23.166	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		P Persiapan Pemukharian Data Dasar Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monlbring)	Kepulauan Riau	23.167	23.167	23.166	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			1.804.703	1.804.703	1.804.522	99,99	99,99	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		Q Sewa Kendaraan Operasional PPK Pengawasan P2JN	Kepulauan Riau	113.200	113.200	113.200	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		R Belanja Foto Copy SATKER P2JN	Kepulauan Riau	29.400	29.400	29.400	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		S Pelaksanaan Tes Kesehatan, Pembelian Masker dan Hand Sanitizer Untuk Kebutuhan Seluruh Pegawai PNS dan Non PNS P2JN KEPRI	Kepulauan Riau	166.700	166.700	166.562	99,92	99,92	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		T Perjalanan Dinas Ke Pusat/ Antar Provinsi PPK Pengawasan P2JN	Kepulauan Riau	57.136	57.136	57.124	99,98	99,98	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		U Sewa Kendaraan Operasional SATKER P2JN	Kepulauan Riau	226.400	226.400	226.400	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		V Perjalanan Dinas Ke Pusat/ Dinas Antar Provinsi SATKER P2JN	Kepulauan Riau	321.063	321.063	321.063	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		W Sewa Mess SATKER P2JN	Kepulauan Riau	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		X Honorarium Pejabat/Pengadaan SATKER P2JN KEPRI	Kepulauan Riau	8.160	8.160	8.160	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		Y Perjalanan Dinas Ke Pusat/ Dinas Antar Provinsi PPK Perencanaan	Kepulauan Riau	69.830	69.830	69.830	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		Z Sewa Kendaraan Operasional PPK Perencanaan	Kepulauan Riau	113.200	113.200	113.200	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AB Biaya kebutuhan Perkambran	Kepulauan Riau	166.320	166.320	166.290	99,98	99,98	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AC Pengadaan Tenaga Outsourcing	Kepulauan Riau	109.110	109.110	109.110	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AD Pengadaan Seragam Dinas/Kerja	Kepulauan Riau	45.708	45.708	45.708	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AE Sewa Kendaraan Roda 6 (Transportasi Pemindahan Barang Kantor)	Kepulauan Riau	28.476	28.476	28.476	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AM Pengadaan Perangkat Olah Data	Kepulauan Riau	250.000	250.000	249.999	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN			25.304	25.304	25.304	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AA Perjalanan Dinas Koordinas dan Pelaporan Keuangan BMN	Kepulauan Riau	25.304	25.304	25.304	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			3.747.299	3.747.299	3.742.182	99,86	99,86	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Satker P2JN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			3.747.299	3.747.299	3.742.182	99,86	99,86	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			108.180	108.180	108.049	99,88	99,88	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EA Kegiatan rencana program dan Penyusunan anggaran	Kepulauan Riau	108.180	108.180	108.049	99,88	99,88	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			36.600	36.600	36.590	99,97	99,97	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EC Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	Kepulauan Riau	36.600	36.600	36.590	99,97	99,97	

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	VOLUME CAPAIAN	REAL FIS EMON (%)	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD AKHIR (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN CAPAIAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (%)	REALISASI THD REVISI (%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(7)*100	(7)	(8)=(6)/(4)*100	(9)=(6)/(9)*100	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(15)/(13)*100	(17)=(15)/(14)*100	(18)
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			3.436.339	3.436.339	3.431.673	99,86	99,86	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EE Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan Salker Induk	Kepulauan Riau	1.118.209	1.118.209	1.118.181	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EF Pencegahan Penyebaran COVID-19	Kepulauan Riau	428.300	428.300	427.928	99,91	99,91	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EG Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah tangga dan Perlengkapan PPK 1,1 Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	188.500	188.500	188.497	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EJ Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan PPK 1,2 Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	178.810	178.810	178.695	99,94	99,94	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EK Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan PPK 1,3 Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	250.610	250.610	250.609	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EM Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan PPK 1,4 Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	271.910	271.910	271.763	99,95	99,95	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EU Pemeliharaan Ruang Kantor	Kepulauan Riau	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EW Pengangkutan Alat Berat	Kepulauan Riau	150.000	150.000	146.000	97,33	97,33	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN			166.180	166.180	165.870	99,81	99,81	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		EP Penyusunan laporan keuangan BMN	Kepulauan Riau	43.740	43.740	43.624	99,73	99,73	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		ES Pendampingan Serpikasi BMN Berupa Tanah 22 Bidang	Kepulauan Riau	122.440	122.440	122.246	99,84	99,84	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			752.868	752.868	750.022	99,62	99,62	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	SKPD-TP Provinsi Kepulauan Riau			752.868	752.868	750.022	99,62	99,62	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			19.732	19.732	19.732	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		D Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring)	Kepulauan Riau	19.732	19.732	19.732	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	055 Pelayanan umum Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			664.760	664.760	661.928	99,57	99,57	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		E Administrasi Kegiatan Salker Induk	Kepulauan Riau	664.760	664.760	661.928	99,57	99,57	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN			68.376	68.376	68.362	99,98	99,98	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		F Perjalanan Dinas Pelaporan dan Koordinasi Keuangan dan BMN	Kepulauan Riau	68.376	68.376	68.362	99,98	99,98	
	EAA 005 Layanan Perkantoran		3,00 LAYANAN	3,00 LAYANAN	3,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00				13.230.955	13.230.955	13.050.955	98,64	98,64	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			11.643.600	11.643.600	11.478.246	98,58	98,58	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Satker BPJN Kepulauan Riau			11.643.600	11.643.600	11.478.246	98,58	98,58	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	001 Gaji dan Tunjangan			4.637.069	4.637.069	4.481.869	96,65	96,65	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		H Pembayaran Gaji dan Tunjangan BPJN KEPRI	Kepulauan Riau	4.637.069	4.637.069	4.481.869	96,65	96,65	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			7.006.531	7.006.531	6.996.377	99,86	99,86	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		I Honorarium Pegawai Non PNS di Lingkungan BPJN Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	5.990.535	5.990.535	5.984.282	99,90	99,90	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		J Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran BPJN KEPRI	Kepulauan Riau	876.480	876.480	872.579	99,55	99,55	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		Y Pengelolaan Rumah Susun ASN Kementerian PUPR di BPJN Kepri	Kepulauan Riau	139.516	139.516	139.516	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			569.945	569.945	569.384	99,90	99,90	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Satker P2JN Provinsi Kepulauan Riau			569.945	569.945	569.384	99,90	99,90	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	001 Gaji dan Tunjangan			32.430	32.430	32.430	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		N Belanja Lembur SATKER P2JN KEPRI	Kepulauan Riau	32.430	32.430	32.430	100,00	100,00	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			537.515	537.515	536.954	99,90	99,90	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		O Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Kepulauan Riau	537.515	537.515	536.954	99,90	99,90	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Provinsi Kepulauan Riau			1.017.410	1.017.410	1.003.325	98,62	98,62	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	Satker PUN Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau			1.017.410	1.017.410	1.003.325	98,62	98,62	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	001 Gaji dan Tunjangan			21.226	21.226	21.189	99,83	99,83	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AA Uang Lembur dan Uang Makan Lembur	Kepulauan Riau	21.226	21.226	21.189	99,83	99,83	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			996.184	996.184	982.136	98,59	98,59	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AB Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Perkantoran Satker PUN 1 Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	822.694	822.694	822.693	99,97	99,97	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	100,00	100,00	100,00		AD Langgan Daya dan Jasa Salker PUN 1 Provinsi Kepulauan Riau	Kepulauan Riau	173.490	173.490	159.673	92,04	92,04	